

Parsono



Pendidikan Kewarganegaraan



3

UNTUK SMP/MTs KELAS IX



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Parsono

3

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP/MTs Kelas IX



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan 3

Untuk SMP/MTs Kelas IX

Disusun oleh:
Parsono

Setting : Tri Asmoro
Layout : Gurdiono, dkk.
Ilustrasi : Tesa
Ukuran : 17,6 x 25

370.114 7

PAR

p

PARSONO

Pendidikan Kewarganegaraan 3 : Untuk SMP/MTs IX
/ disusun Parsono , penyunting, Joko Suparto, Dwi Priyani,
Sriyadi ; ilustrasi, Tesa. -- Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional. 2009
v, 204 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 199-200

Indeks

ISBN 978-979-068-153-8 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-068-165-1

1.Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran

I. Judul II. Joko Suparto III. Dwi Priyani IV. Sriyadi V. Tesa

Hak Cipta Buku ini Dibeli Departemen Pendidikan Nasional dari
Penerbit Setiaji

Diterbitkan Oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh..

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Dewasa ini dikembangkan pendidikan berbasis keunggulan sebagai jawaban tantangan era globalisasi yang saat ini melanda dunia. Pendidikan berbasis keunggulan merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian.

Sejalan dengan hal tersebut, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun buku materi Pendidikan Kewarganegaraan. Buku ini untuk membantu siswa dalam mengembangkan kompetensi dan potensinya menjadi warga masyarakat dan warga negara yang berkualitas dan berkarakter.

Penulisan materi di dalam buku ini berdasarkan standar isi untuk satuan pendidikan SMP/MTs dengan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Semua kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan buku ini, sangat kami harapkan. Akhirnya bagi para siswa, selamat belajar dan berkreasi mengembangkan potensi dirimu.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab 1 Pembelaan Negara	1
A. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara	4
B. Bentuk-bentuk Usaha Pembelaan Negara	13
C. Peran Serta dalam Usaha Pembelaan Negara.....	19
Uji Pemahaman Konsep.....	32
Bab 2 Otonomi Daerah	41
A. Pengertian Otonomi.....	44
B. Kebijakan Publik	73
Uji Pemahaman Konsep	81
Bab 3 Globalisasi	89
A. Pengertian dan Arti Pentingnya Globalisasi Bagi Indonesia	92
B. Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional di Era Globalisasi.....	97
C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	107
D. Sikap terhadap Dampak Globalisasi	116
Uji Pemahaman Konsep	127
Bab 4 Prestasi Diri	135
A. Arti Pentingnya Prestasi Diri bagi Keunggulan Bangsa	137
B. Potensi Diri untuk Berprestasi sesuai Kemampuan	145
C. Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi	153
Uji Pemahaman Konsep	161
Pelatihan Ulangan Umum	169
Pelatihan Prediksi Ujian Akhir	180
Daftar Pustaka	199
Indeks	201



Bab 1

Pembelaan Negara



Sumber: Dokumen Pribadi

Pada bab bela negara ini akan dipelajari hal-hal sebagai berikut:

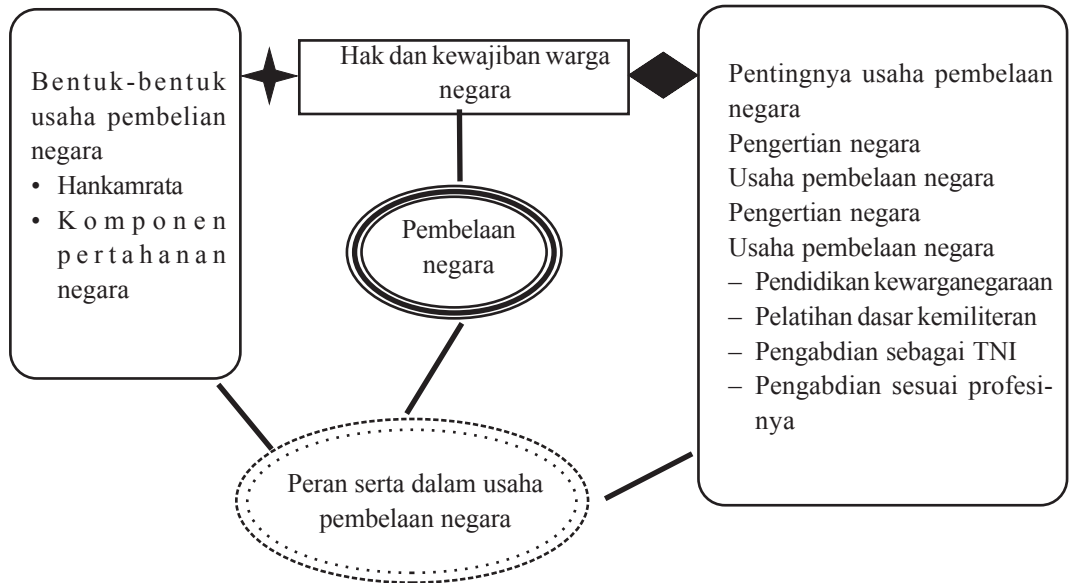
- A. Pentingnya usaha pembelaan negara
- B. Bentuk-bentuk usaha bela negara
- C. Peran serta dalam usaha pembelaan negara

Setelah bab ini berakhir, para siswa diharapkan mencoba menganalisis tugas dan menjawab soal-soal pengembangan materi.





Peta Konsep



Kata Kunci

Setiap warga negara harus berusaha melaksanakan hak dan kewajiban bela negara demi keutuhan bangsa dan negara.

Kata-kata kunci pelajaran ini:

Negara, sifat negara, fungsi negara, tujuan negara, unsur negara, bela negara, dasar hukum bela negara, sistem Hankamrata, motivasi bela negara.



Tujuan Pembelajaran:

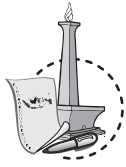
Setelah mempelajari materi pembelaan negara ini para siswa diharapkan mampu:

1. memberikan pengertian negara;
2. menyebutkan fungsi negara;
3. menyebutkan tujuan negara;
4. menyebutkan unsur berdirinya negara;
5. memberikan pengertian pembelaan negara;
6. menjelaskan arti pentingnya pembelaan negara;
7. mengkaji dasar hukum bela negara;
8. menjelaskan sistem pertahanan rakyat semesta;
9. menjelaskan motivasi bela negara.

Setelah berabad-abad bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan, sehingga kehidupan rakyat sangat menderita. Menyadari hal tersebut timbullah gerakan yang dipelopori oleh pemuda-pemuda putra bangsa untuk membangkitkan kesadaran nasional. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 perjuangan tersebut mencapai puncaknya, yaitu kemerdekaan. Dengan kemerdekaan, berarti kita bangsa Indonesia telah memiliki negara sebagai tempat tinggal. Negara sebagai tempat tinggal bangsa Indonesia harus dipertahankan dari ancaman yang datang baik ancaman dari dalam maupun dari luar.

Maka dari itu seluruh warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk membela dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban moral warga negara tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945.





A. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara

1. Pengertian negara

Menurut etimologi Negara berasal dari bahasa asing “the State” (bahasa Inggris) atau “de Staat” (bahasa Belanda), “der Staat” (bahasa Jerman), bahasa Prancis “l’Etat” dan bahasa Italia “lo stato”. Istilah *staat* mula-mula digunakan di Eropa Barat pada abad XV. Kata *staat*, *state*, dan *etat* berasal bahasa Latin “Status” atau “Statum” yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap.

Kata “negara” yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta “nagari” atau “negara” yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia *negeri* atau *negara* artinya tempat tinggal.

Dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca tahun 1365 menjelaskan tentang Negara Majapahit. Dalam buku digambarkan tentang pemerintahan Majapahit yang menghormati musyawarah, hubungan antardaerah, dan hubungan dengan negara-negara tetangga.

Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun ke luar. Dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Negara sebagai organisasi puncak dan juga organisasi kekuasaan mempunyai fungsi yang berbeda dengan organisasi lain yang ada di negara tersebut. Sehingga para ahli merumuskan fungsi negara secara berbeda-beda tergantung pada titik berat perhatian dan latar belakang perumusan tujuan



Pengertian Negara menurut pendapat para ahli antara lain:

1. *George Jellinek*
Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia mendiami wilayah tertentu.
2. *G.W.F.Hegel*
Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.





3. *Karl Marx*
Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis/kapitalis) untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain (proletariat/buruh).

4. *Mr. Kranenburg*
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa.

Gambar 1.1:
TNI merupakan salah satu pilar bela negara
Sumber: Kompas 30 Desember 2004

dan fungsi negara tersebut. Selain itu juga dipengaruhi oleh pandangan atau ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Miriam Budiardjo (1978 : 46) bahwa fungsi negara dirumuskan sebagai berikut:

- Melaksanakan ketertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dan perselisihan dalam masyarakat. Dalam hal ini negara sebagai stabilisator.
- Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bagi negara-negara baru, fungsi dianggap sangat penting karena untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.
- Fungsi pertahanan yaitu untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.



- Menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Dari uraian di atas, salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa agar negara tetap tegak dan berdiri adalah fungsi pertahanan.



Dalam mewujudkan fungsi pertahanan negara harus memiliki alat-alat pertahanan dan peran serta segenap warga negara dalam menyelenggarakan pertahanan negara sebagai upaya bela negara. Peran serta warga negara dalam pembelaan negara merupakan tuntutan untuk mewujudkan fungsi-fungsi negara.

Fungsi pertahanan dalam kehidupana negara sangat *urgen* dan merupakan prasyarat bagi fungsi-fungsi yang lain sebab negara hanya dapat menjalankan fungsi ketertiban, kesejahteraan dan keadilan apabila negara mampu mempertahankan diri dari berbagai hambatan, rintangan, dan ancaman baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara“. Dan ditegaskan pula dalam Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara“.

2. Pentingnya bela negara

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 ditegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara“. Banyak alasan mengapa kita sebagai warga negara wajib membela negara. Menurut Chaidir Basrie ada beberapa motivasi yang dapat dijadikan alasan wajib bela negara bagi rakyat Indonesia yaitu:

a. Latar belakang sejarah

Kemerdekaan yang kita capai bukan hadiah dari bangsa lain melainkan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Dalam merebut kemerdekaan tersebut banyak pengorbanan baik jiwa, raga, harta, dan tenaga. Meskipun kita hanya memiliki senjata bambu runcing, karena memiliki sikap dan semangat yang kuat akhirnya dapat tercapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan dapat diperoleh ternyata silih berganti ancaman yang timbul baik ancaman dari dalam negeri seperti pemberontakan dan pelanggaran peraturan yang berlaku maupun ancaman dari luar negeri seperti serangan



5. Logemann

Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaan. Organisasi itu adalah ikatan-ikatan fungsi atau lapangan-lapangan kerja tetap.

6. Roger E. Soltau

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat.





7. Bellefroid
Negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tertentu dan yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan bersama.

Gambar 1.2:
Peta Indonesia
Sumber: Atlas, Ragam Budaya Nusantara dan Dunia

dari negara lain yaitu dengan adanya pelanggaran kedaulatan Indonesia yang dilakukan Malaysia.

Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut.

b. *Kedudukan geografis dan geostrategis negara RI*

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Beberapa di antaranya dapat dijadikan kompartemen strategis yang terdiri atas pulau-pulau perlawanan. Posisi silang antara dua benua dan dua samudera memiliki nilai strategis dalam hubungan antarbangsa, khususnya dalam arti transportasi komunikasi, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan hankam.



c. *Kondisi demografis bangsa Indonesia*

Kondisi demografis Indonesia memerlukan kewaspadaan terhadap keamanan. Hal ini berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. Jika tenaga kerja yang sedemikian banyak tidak diimbangi tersedianya lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran. Banyaknya pengangguran akan berakibat kerawanan sosial.

d. *Potensi sumber daya alam*

Wilayah Indonesia yang luas memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun di laut.



Dengan demikian bangsa Indonesia harus mampu mengamankan dan mendayagunakan segenap kekayaan alam tersebut demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

e. *Perkembangan pengetahuan ilmu dan teknologi*

Perkembangan pengetahuan ilmu dan teknologi telah membawa perubahan penting bagi kehidupan manusia termasuk dalam hal peralatan perang. Untuk itu rakyat dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi adanya penggunaan alat modern dalam perang.

f. *Kedudukan tanah air yang strategis dengan wilayah yang luas*

Wilayah yang luas dan kekayaan alam yang melimpah memerlukan kekuatan pertahanan negara yang besar yaitu dengan jalan membangun kekuatan TNI kecil dengan cadangan nasional yang besar dan didukung kekuatan seluruh rakyat.



g. *Mewujudkan tujuan negara*

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



8. H.J.Laski
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah, lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Gambar 1.3:
Kegiatan pertanian di Indonesia yang tumbuh subur merupakan salah satu kekayaan alam
Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar





9. *Max Weber*
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

10. *Prof. Mr. Soenarko*
Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (*souverioegn*).

Gambar 1.4:
Sumber: Kepala Staf AL Laksamana Slamet Soebijanto meninjau kesiapan anggota Marinir di Cilandak Jakarta
Sumber: Sindo, 4 Agustus 2006

- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. Usaha pembelaan negara

Bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan, kedaulatan negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Sebab tanpa mampu mempertahankan diri terhadap berbagai ancaman, suatu negara tidak akan mempertahankan keberadaannya.



Untuk mewujudkan tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 diperlukan peran serta warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta



dalam usaha pertahanan dan keamanan negara“. Sedangkan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung“.



Gambar 1.5:
Pasukan Khas TNI AU
memasuki pesawat
terbang untuk terjun di
daerah sasaran operasi
militar
Sumber: Ensiklopedi
Nasional Indonesia

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban.
- b. Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- c. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah Polri.
- d. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Konsep pertahanan dan keamanan negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 30. Sedang konsep bela negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.



11. Prof. R.
Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

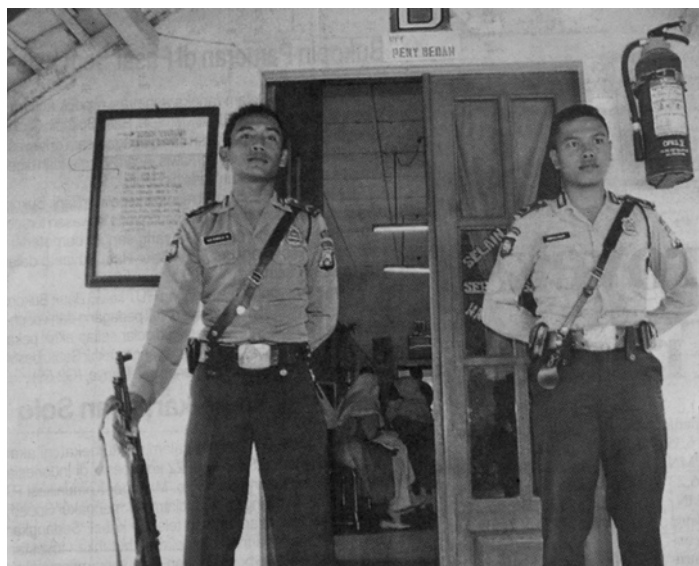




12. Prof. Miriam Budi-hardjo
Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu.

Gambar 1.6: Dua polisi berjaga di depan ruang, tempat sejumlah korban luka akibat carok massal di rawat di RSUD Pamekasan Sumber: Sindo, 14 Juli 2006

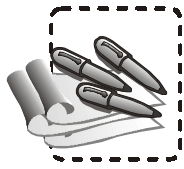
Ditegaskan pula dalam UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban dalam hal ini mempunyai makna bahwa setiap warga negara dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.



Kita masih ingat sang juara tinju Muhammad Ali dari Amerika Serikat yang pernah masuk penjara karena menolak mengikuti wajib militer di negaranya. Di sini negara dibenarkan memaksa warga negaranya dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan. Memang selain itu negara secara teori mempunyai kewenangan memaksa karena negara memiliki sifat khusus yang dikenal dengan sifat hakikat negara yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semua.

Sifat memaksa berarti negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara legal. Untuk mengefektifkan sifatnya itu negara memiliki alat-alat negara seperti polisi dan tentara.





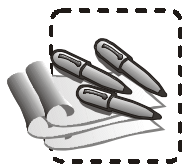
Kegiatan Siswa

1. Opini

Pada waktu upacara bendera hari Senin, hampir setiap kelas ada siswa peserta upacara yang enggan untuk menghormati bendera pada waktu pemimpin upacara memberi aba-aba penghormatan bendera merah putih. Ada juga siswa yang menghormati bendera tetapi sikapnya kurang sempurna. Coba beri tanggapan terhadap peristiwa tersebut!

2. Diskusi kelompok

- Coba buat kelompok diskusi yang beranggota 4 orang siswa.
- Angkatlah salah seorang menjadi ketua kelompok diskusi.
- Masalah yang didiskusikan yaitu:
 - Mengapa kita wajib bela negara?
 - Jelaskan arti pentingnya bela negara!
 - Sebutkan contoh tindakan siswa sebagai wujud bela negara!
- Hasil diskusi harus dipresentasikan di depan kelas oleh salah satu anggota kelompok atau ketua kelompok.
- Hasil akhir setelah dipresentasikan diserahkan kepada guru kalian untuk dinilai.



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

- Jelaskan yang dimaksud negara!
- Mengapa kita wajib ikut serta bela negara?
- Apa yang dimaksud bela negara?
- Berilah contoh bela negara yang dapat dilakukan siswa dalam bela negara di sekolah!
- Tuliskan bunyi Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945!



Info Kewarganegaraan

Menurut Prof. Miriam Budi-hardjo, negara mempunyai sifat-sifat yaitu:

- Sifat memaksa**
Artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekuasaan fisik secara legal agar peraturan-perundang-undangan ditaati untuk mencapai suasana masyarakat yang tertib.
- Sifat monopoli**
Artinya negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dan masyarakat.
- Sifat mencakup semua**
Artinya semua peraturan-perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.





B. Bentuk-bentuk Usaha Pembelaan Negara



Info Kewarganegaraan

Fungsi negara menurut para pakar:

1. *John Locke* *m e m b a g i* fungsi negara menjadi:
 - a. *F u n g s i* legislatif: *m e m b u a t* UU
 - b. *F u n g s i* eksekutif: *m e l a k s a n a* kan peraturan
 - c. *F u n g s i* federatif: *m e n g u r u s i* urusan luar negeri dan urusan perang serta damai.
2. *M o n t e s -* *q u i e u*, *f u n g s i* negara sebagai berikut:
 - a. *F u n g s i* legislatif: *m e m b u a t* UU.
 - b. *F u n g s i* eksekutif: *m e l a k s a n a* kan UU.

Pengalaman sejarah kita menunjukkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Untuk itu pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan tersebut mampu memberi aspirasi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul oleh lingkungan tersebut.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3, Pasal 30 Ayat 1 dan 2, UU No. 20/1982, dan UU No. 3/2002 semua menegaskan tentang pembelaan dan pertahanan negara, bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan RI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara Kesatuan RI sebagai satu kesatuan pertahanan negara. Pertahanan keamanan diselenggarakan dengan melalui dua upaya pembinaan yaitu yang pertama adalah upaya membina pertahanan untuk mencegah setiap ancaman dari luar negeri. Dan yang kedua adalah upaya membina keamanan untuk mencegah setiap ancaman dari dalam negeri. Kedua upaya itu dilakukan dengan membangun dan membina kemampuan seluruh kekuatan bangsa serta negara.



Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Pertahanan Rakyat Semesta

Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Pertahanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dengan TNI dan POLRI sebagai inti pertahanan.



- c. Fungsi yudikatif: mengawasi agar semua peraturan ditaati.
3. Van Vollen Hoven, fungsi negara mencakup empat tugas pokok:
 - a. Regeling
 - b. Bestuur
 - c. Rechtspraak
 - d. Politie

Gambar 1.7:
TNI Manunggal Masuk
Desa di Desa Dukuh,
Tangen, Sragen
Sumber: Solo Pos, 8
September 2006

Perlawanan rakyat semesta diwujudkan dua cara yaitu dengan menanamkan dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap ideologi Pancasila dan melatih keterampilan bela negara dan dengan mendayagunakan kemandirian TNI dan POLRI dengan rakyat termasuk cadangan TNI. Kekuatan cadangan TNI tersusun sebagai berikut:

1. Purnawirawan TNI.
2. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan perwira cadangan nasional.
3. Wanra atau perlawanan rakyat yang bertugas membantu operasi tempur, intelijen, dan teritorial.





Info Kewarganegaraan

4. *Goodnow, membagi fungsi negara menjadi dua:*
 - a. *Policy making*
 - b. *Policy Executing*
5. *M.Kusnadi, SH, membagi fungsi negara menjadi dua:*
 - a. *menjamin ketertiban*
 - b. *mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.*
6. *Charles E. Merriam*
 - a. *Keamanan ekstern.*
 - b. *Pemeliharaan ketertiban intern.*
 - c. *Keadilan*
 - d. *Kesejahteraan.*
 - e. *Kebebasan.*
7. *Jacobson A. dan Lipman M.H. bahwa fungsi negara ada tiga yaitu:*

4. Kamra atau kewanran rakyat yang bertugas membantu operasi kewanran dan ketertiban masyarakat.

Komponen atau unsur pertahanan keamanan negara:

1. Rakyat terlatih

Rakyat terlatih merupakan komponen dasar bagi kesemestaan dan keserbagunaan pertahanan keamanan negara. Komponen ini agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi:

- a. Fungsi ketertiban umum, untuk memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan segenap perangkatnya, dan demi kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Fungsi perlindungan rakyat, untuk menanggulangi gangguan ketertiban hukum dan gangguan ketenteraman masyarakat.
- c. Fungsi keamanan rakyat, untuk menanggulangi gangguan keamanan atau subversi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- d. Fungsi perlawanan rakyat, untuk menanggulangi, melawan atau menghancurkan musuh yang hendak menyerang atau menduduki wilayah RI.

2. TNI dan cadangan TNI

TNI dan cadangan TNI merupakan komponen utama karena merupakan kekuatan utama di dalam pertahanan negara. TNI dan cadangan TNI menjalankan fungsi yaitu sebagai penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman terhadap bangsa dan negara baik dari dalam maupun dari luar negeri dan pelatih rakyat. Rakyat dilatih agar memiliki kemampuan dan keterampilan bela negara. Kemampuan yang dimaksud adalah tekad, sikap, dan tindakan untuk membela tanah airnya yang dilandasi oleh keyakinan terhadap ideologi Pancasila dan ketangkasan keprajuritan.

3. Perlindungan masyarakat

Perlindungan masyarakat merupakan komponen khusus di dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.



Fungsi perlindungan masyarakat adalah menanggulangi atau memperkecil malapetaka yang diakibatkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

4. Sumber daya alam, sumber daya bantuan, dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung

Betapapun besarnya kekuatan suatu pertahanan keamanan negara tidak akan mampu bertahan lama, kalau tidak didukung oleh sumber daya alam / buatan dan prasarana.

Usaha menghancurkan negara Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dalam bentuk serangan negara lain terhadap kedaulatan negara Indonesia. Penghancuran yang datang dari dalam negeri kita sendiri seperti pemberontakan, separatis, konflik etnis yang berkepanjangan, dan kelompok-kelompok lain yang tidak menyukai pemerintahan yang sah.

Dalam Keppres No. 79/1969 disebutkan “Dalam rangka pemerintahan umum, negara RI mempunyai fungsi pertahanan keamanan nasional yang selanjutnya disingkat Hankamnas, yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara, yang khusus ditujukan kepada tercapainya keamanan bangsa dan negara, keamanan perjuangan nasional dalam rangka ketahanan nasional berdasarkan Pancasila, baik ke dalam aspek nasional maupun internasional”.

Melihat hal tersebut negara kita menerapkan pola pertahanan dan keamanan dengan sistem doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata).

Keamanan berarti kedamaian dan tidak ada ancaman bahaya. Negara dikatakan aman jika seluruh warganya hidup dengan tenteram, tertib, dan tidak tertekan. Keamanan terganggu berarti kekacauan dan tidak ada ketertiban dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadaan tersebut sistem pertahanan negara RI didasarkan pada doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Dalam



- a. Fungsi esensial.
- b. Fungsi jasa.
- c. Fungsi perniagaan

Fungsi esensial merupakan fungsi yang dibutuhkan dalam suatu negara demi kelanjutan kehidupan negara.

Fungsi esensial meliputi:

1. *Pemeliharaan angkatan perang untuk pertahanan terhadap serangan dari luar atau menindas pergolakan dalam negeri.*
2. *Pemeliharaan angkatan kepolisian untuk menindas kejahatan dan penjahat.*
3. *Pemeliharaan pengadilan untuk menegakkan hukum.*





4. Mengadakan perhubungan luar negeri.

5. Mengadakan sistem pemungutan pajak.

Fungsi jasa (service functions) yaitu seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara, yang meliputi pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, terusan-terusan dan sebagainya. Fungsi jasa ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam suatu negara tersebut.

doktrin ini sasaran operasi pertahanan keamanan nasional bertujuan untuk:

- Mencegah dan menghancurkan serangan terbuka terhadap kedaulatan nasional negara RI.
- Menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional negara RI.
- Ikut dalam memelihara kemampuan Hankam di Asia Tenggara dengan tujuan negara Asia Tenggara bebas dari campur tangan asing.

Kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Cara yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam ikut serta bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional, keanggotaan rakyat terlatih secara wajib, keanggotaan TNI secara sukarela atau wajib; keanggotaan cadangan TNI secara sukarela atau wajib dan keanggotaan perlindungan masyarakat secara sukarela.



Kegiatan Siswa

1. Studi kasus

Negara Asing Pendukung Separatis di Papua

Menurut berita Harian Kompas, 9 September 2003 Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda menyatakan, pemerintah kini terus mewaspadaikan kemungkinan dukungan sejumlah negara dari kawasan Asia Pasifik terhadap keinginan sekelompok orang di Papua yang menggagas kemerdekaan Papua, lepas dari Republik Indonesia. Indonesia akan meminta negara-negara pendukung integritas teritorial Indonesia untuk konsisten dengan sikapnya.



Pertanyaan terhadap kasus tersebut:

- a. Apa yang menjadi alasan sekelompok orang di Papua menggagas lepas dari Republik Indonesia?
- b. Menurut kalian apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut?
- c. Apa yang seharusnya dilaksanakan saudara kita yang ada di Papua agar kehidupan mereka lebih sejahtera?

2. Tugas membuat kliping

- a. Bentuklah kelompok belajar yang beranggotakan 5 orang siswa.
- b. Setiap kelompok pilihlah salah satu ketua kelompok.
- c. Ketua kelompok memberi tugas kepada masing-masing anggota untuk mencari berita atau gambar yang bertemakan “Bhinneka Tunggal Ika” dari guntingan surat kabar/koran atau majalah atau internet (*print*).
- d. Setelah berita yang digunting tersebut terkumpul, tempelkan pada buku/kertas gambar.
- e. Setiap guntingan berita/gambar harap diberi komentar.
- f. Komentar harus dari hasil diskusi kelompok.
- g. Setelah kliping selesai dikumpulkan kepada guru kalian untuk mendapat nilai.
- h. Selamat mengerjakan!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Sebutkan tujuan pertahanan negara!
2. Apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional itu?
3. Sebutkan komponen pertahanan dan keamanan negara!
4. Jelaskan yang dimaksud doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta!
5. Sebutkan tugas perlindungan masyarakat!



Info
Kewarganegaraan

Fungsi perniagaan (business functions) yang meliputi fungsi jaminan sosial, pengesahan pengangguran, perlindungan deposito-deposito. Fungsi ini dapat diselenggarakan pula secara individu apabila negara tidak menyelenggarakan.

Menurut Jacobson dan Lipman (1936) dalam F. Isjawa (1980:165), jika dilihat dari ideologi terdapat beberapa dari fungsi negara antara lain:

1. Teori Anarkhisme
Anarkhisme didasarkan pada anggapan bahwa kodrat manusia adalah baik dan bijaksana.





C. Peran Serta dalam Usaha Pembelaan Negara



Info Kewarganegaraan

2. *Teori Individualisme Individualisme adalah paham yang menempatkan kepentingan individu sebagai pusat perhatian dalam berbagai hal, sehingga individualisme lebih menekankan pada kebebasan perorangan dalam berbagai bidang kehidupan.*

3. *Teori Sosialisme Sosialisme menghendaki campur tangan negara dalam bidang perekonomian, maka sosialisme atau kolektivisme merupakan antithese dari individualisme dan anarkhisme.*

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan dalam keikutsertaannya pada segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 9 Ayat 1 UU No. 3/2002).

Hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara tidak terbatas pada kegiatan yang berkenaan dengan tugas militer (TNI), tetapi meliputi juga aktivitas lain yang berkaitan dengan usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara serta keselamatan bangsa dan negara.

Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam penjelasan Pasal 9 UU No. 3/2002 ditegaskan bahwa upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam mengabdikan kepada negara dan bangsa.

Apabila dilihat ketentuan tersebut, maka keikutsertaan siswa dalam upaya bela negara melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002, berarti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 sudah tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan kewarganegaraan.
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.



3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib.
4. Pengabdian sesuai dengan profesi.

Keikutsertaan siswa sebagai warga negara dalam hal bela negara adalah mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan.

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa upaya bela negara wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi.

Pasal 37 Ayat 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.

Rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan usaha bela negara. Kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan realisasi dari konsep nasionalisme (rasa kebangsaan) dan cinta tanah air (patriotisme). Kesadaran berbangsa dan cinta tanah air merupakan ciri kesadaran bela negara.

Penjelasan Pasal 9 Ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 ditegaskan pula bahwa pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Hal ini bermakna bahwa untuk memperoleh pemahaman tentang kesadaran bela negara dapat ditempuh dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dapat ditempuh melalui jalur pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

2. Pelatihan dasar kemiliteran

Salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer selain TNI adalah unsur mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Menurut data Departemen Pertahanan dan Keamanan tahun



Info
Kewarganegaraan

4. Teori

Komunisme Sosialisme dan komunis hampir sama karena sama-sama bertujuan untuk keperluan fungsi negara dan menuntut penguasaan bersama dari alat produksi. Peletak ajaran sosialisme adalah Karl Marx, pertama kali dipraktikkan di Rusia oleh Stalin, 1917.

5. Teori Sindikalisme

Sindikalisme adalah serikat pekerja, yang merupakan gerakan politik, dimulai di Prancis tahun 1890 ketika syndicalisme revolusionaire sebagai gerakan buruh yang bersifat politis dapat mempengaruhi dan menguasai gerakan serikat pekerja Prancis.





Tujuan negara secara umum adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Pendapat para ahli tentang tujuan negara yaitu:

1. Plato

Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

2. R.F. Soltau

Memungkinkan rakyat mengembangkan dan mengungkapkan daya ciptanya sebebasmungkin.

3. H.J. Laski

Tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.

2003 jumlah Resimen Mahasiswa lebih kurang 25.000 orang dan alumni resimen mahasiswa sekitar 62.000 orang. Menwa dilatih keterampilan kemiliteran baik fisik maupun strategi kemiliteran.

3. Pengabdian sebagai prajurit TNI

Dalam era reformasi telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI dan Polri.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri di sini berperan dalam bidang keamanan negara.

Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara. TNI berperan dalam bidang pertahanan negara.

Tentara nasional sebagai alat negara mempunyai tugas:

- Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
- Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.
- Melaksanakan operasi militer selain perang.
- Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Dalam menghadapi ancaman tidak hanya dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia saja, tetapi hal itu tergantung pada



jenis ancaman yang dihadapi bangsa dan negara. Apabila jenis ancaman militer, maka Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen pendukung. Sedangkan apabila ancaman yang dihadapi berupa ancaman nonmiliter, maka unsur utamanya adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk antara lain:

- a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat nonkomersial.
- c. Spionase yang dilakukan oleh bangsa lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
- d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan negara.
- e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan terorisme dalam negeri.
- f. Pemberontakan bersenjata.
- g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Menurut Departemen Pertahanan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu kekuatan nasional negara (*Instrumen of National Power*), disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Dalam tugasnya Tentara Nasional Indonesia melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah operasi militer dalam menghadapi



4. *John Locke*
Tujuan negara adalah kebaikan umat manusia.

5. *Niccollo Machiavelli*
Tujuan negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat.

6. *Thomas Aquinas dan Agustinus*
Untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.





7. *Dante*

Tujuan negara adalah menciptakan perdamaian dunia dengan cara menggunakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia.

8. *Immanuel Kant*

Tujuan negara adalah membentuk dan memelihara hak dan kemerdekaan warga negara.

9. *Kranenburg*

Tujuan negara bukan hanya menjaga ketertiban hukum serta melindungi hak dan kebebasan warga negara saja, melainkan negara secara aktif harus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi. Sedangkan OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata gerakan sparatis (*Counter Insurgency*), tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian.

Ancaman terhadap bangsa dan negara dipandang dari sudut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu ancaman yang bersifat tradisional dan nontradisional. Ancaman tradisional adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain yang berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menghadapi ancaman dan gangguan militer dari luar negeri, kekuatan negara disusun dalam komponen utama Tentara Nasional Indonesia, didukung komponen cadangan, dan komponen pendukung yaitu segenap sumber daya nasional yang dimiliki bangsa Indonesia.

Ancaman yang bersifat nontradisional dilakukan oleh aktor nonnegara yang berupa aksi teror, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotik, dan obat-obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan.

Ancaman bangsa Indonesia di masa yang akan datang datang diperkirakan berasal dari ancaman nontradisional baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul dari dalam negeri itu sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh globalisasi yang berkembang pesat saat ini.

Implikasi terhadap globalisasi sangat mempengaruhi perubahan situasi keamanan dunia dengan munculnya berbagai isu keamanan baru. Isu keamanan yang lalu lebih menonjol aspek geopolitik dan geostrategi seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata strategi, sekarang berkembang isu keamanan baru seperti terorisme, perampokan dan pembajakan, penyelundupan dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.



Ancaman dan gangguan pertahanan Indonesia di era global ini menurut Departemen Pertahanan (2003) diperkirakan berbentuk:


- a. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.
- b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
- c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
- d. Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antarsuku, agama, maupun ras/ keturunan dalam skala yang luas.
- e. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisir lainnya.
- f. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.
- g. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perampokan, penangkapan ikan ilegal, pencemaran, dan perusakan ekosistem.
- h. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.
- i. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.
- j. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Menurut Departemen Pertahanan (2003) bahwa berbagai keragaman aspek kehidupan bangsa, maka persatuan bangsa dan keutuhan kesatuan wilayah Indonesia merupakan geopolitik



10. Tujuan negara menurut kaum sosialis Memberi kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap manusia (masyarakat).





Info
Kewarganegaraan

Bela negara adalah tindakan untuk menjaga dan melindungi keutuhan bangsa dan negara dan merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara.

bangsa Indonesia. Geopolitik tersebut berkembang dalam dua dimensi pemikiran dasar yaitu kewilayahan sebagai suatu realita dan kehidupan masyarakat sebagai fenomena hidup. Perjuangan dalam rangka kepentingan nasional harus tetap didasarkan pada dua dimensi pemikiran tersebut. Dengan demikian pertahanan negara berperan dan berfungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

4. Pengabdian sesuai dengan profesi

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 yang dimaksud pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diidentifikasi beberapa profesi tersebut terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya yaitu petugas PMI, para medis, tim SAR, POLRI, Linmas, dan petugas bantuan sosial.

Dari uraian di atas jelas bahwa setiap warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Siswa dan mahasiswa ikut serta membela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, anggota resimen mahasiswa melalui latihan dasar kemiliteran, TNI dalam menanggulangi ancaman militer dan nonmiliter tertentu, POLRI termasuk warga sipil lainnya dalam menanggulangi ancaman nonmiliter, dan kelompok profesi tertentu dapat ikut serta membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing.

Keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam pembelaan negara masing-masing warga negara tidak sama, sesuai dengan kedudukan masing-masing.



Contoh upaya membela negara yang telah diperankan oleh TNI sejak perang kemerdekaan sampai era reformasi antara lain menghadapi Agresi Belanda, menghadapi ancaman gerakan federalis dan sparatis APRA, RMS, PRRI / PERMESTA, Papua Merdeka, separatis Aceh, melawan PKI, DI/TII, dan sebagainya. Demikian pula dengan POLRI telah melakukan upaya pembelaan negara terutama yang berkaitan dengan ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kerusuhan, penyalahgunaan narkoba, dan konflik komunal.

Secara historis rakyat Indonesia telah melakukan suatu tindakan perjuangan dalam upaya pembelaan negara. Contoh upaya pembelaan negara yang dilakukan oleh komponen rakyat antara lain:

- a. Periode perang kemerdekaan pertama.
- b. Pada periode perang kemerdekaan kedua ada organisasi Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan.
- c. Tahun 1958-1960 muncul Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa.
- d. Tahun 1961 dibentuk Hansip, Wanra, Kamra sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/OPR.
- e. Perwira cadangan yang dibentuk tahun 1963.
- f. Kemudian menurut UU No. 20/1982 ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota Perlindungan Masyarakat.

Masih banyak cara upaya pembelaan negara yang dapat dilakukan oleh rakyat Indonesia melalui profesinya masing-masing seperti TIM ASR untuk mencari dan menolong korban bencana alam, PMI, dan para medis.

Menurut UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 5 menegaskan bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan RI sebagai satu kesatuan. Kesatuan seluruh wilayah negara kesatuan RI



Unsur negara menurut ahli kenegaraan Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu negara harus memenuhi syarat yaitu: rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain.



sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap bagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab bersama segenap bangsa Indonesia.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara tidak hanya lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan sekitar kita bertempat tinggal. Adapun bentuk partisipasi warga masyarakat dalam upaya pembelaan negara di lingkungan dengan melaksanakan kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Dan bagi seorang siswa SMP ikut sertanya upaya pembelaan negara dengan jalan menjaga rumah dari segala macam gangguan, belajar giat, disiplin, mengikuti upacara bendera, serta menaati tata tertib sekolah.



Kegiatan Siswa

Coba lakukan pengamatan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal kalian!

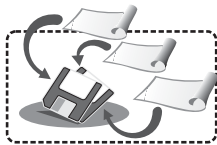
1. Di lingkungan sekolah, hal-hal yang diamati adalah: situasi sekolah setiap hari mengenai ketertiban, pakaian, keamanan, dan keadaan kelas dan juga pada waktu upacara bendera. Sebutkan bentuk ketidaktertiban dan jelaskan menurut pandangan kalian!
2. Di lingkungan tempat tinggal, hal-hal yang diamati adalah:
 - a. Gambarkan situasi keamanan lingkungan tempat tinggal kalian!
 - b. Kalau tidak aman, gangguan apa saja yang kerap kali timbul di lingkungan kalian?
 - c. Apabila lingkungan kalian aman, kegiatan apa yang dilakukan warga lingkungan kalian?
 - d. Tindakan apa yang dilakukan warga lingkungan untuk menjaga lingkungan tetap aman dan tertib?





Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Sejak kapan negara Indonesia memenuhi unsur berdirinya negara, jelaskan!
2. Bagaimana pendapatmu terhadap nelayan asing yang mencari ikan di wilayah laut teritorial Indonesia?
3. Bagaimana peran warga negara dalam upaya bela negara?
4. Sebutkan tindakan pelajar yang menunjukkan keikutsertaannya dalam upaya bela negara!
5. Sebutkan contoh keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan rakyat semesta!



Rangkuman

Bangsa Indonesia yang telah berhasil merebut kemerdekaan dari bangsa lain. Dengan direbutnya kembali kemerdekaan kita, berarti lahirlah suatu negara merdeka dan berdaulat. Negara yang telah kita miliki ini perlu dipertahankan dan dibela. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 UUD 1945. Pasal ini mengandung pengertian bahwa semua warga negara tanpa kecuali berhak dan wajib membela dan mempertahankan negara. Membela negara berarti melakukan tindakan untuk menjaga, melindungi, kelangsungan dan keutuhan bangsa dan negara.



Rakyat atau warga negara yang merupakan salah satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara setiap warga negara memiliki jaminan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002.

Menurut Undang-Undang tersebut keikutsertaan pembelaan negara dapat diselenggarakan melalui: 1) Pendidikan Kewarganegaraan, 2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib dan, 4) Melalui pengabdian sesuai dengan profesi.

Ancaman yang dihadapi suatu negara dapat berbentuk ancaman militer dan non-militer.

Selain mempunyai fungsi dan tujuan, negara juga memiliki unsur-unsur sebagai syarat negara berdiri. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika menyebutkan bahwa unsur-unsur berdirinya suatu negara yaitu penduduk yang tetap (penghuni), wilayah permanen, pemerintah tertentu, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur konstitutif suatu negara yang harus dipenuhi menurut hukum internasional.

Menurut ahli kenegaraan Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu negara harus memenuhi syarat yaitu: rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain.





Glosarium

ancaman	= usaha yang dilaksanakan secara konsep-sional melalui tindak politik dan/atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan bangsa dan negara
bentuk	= sistem, susunan
bungsi	= kegunaan suatu hal
keamanan	= keadaan bebas dari bahaya
ketertiban	= keadaan serba teratur baik
negara	= organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat
partisipasi	= ikut serta
pembelaan	= proses, cara, perbuatan membela
polisi	= badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
semesta	= seluruh, segenap, semuanya
siskamling	= sistem keamanan lingkungan
TNI	= Tentara Nasional Indonesia yang bertugas operasi tempur
usaha	= upaya, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya



Tugas

Bacalah ilustrasi di bawah ini, kemudian diskusikan permasalahan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia!

Keselamatan negara dan bangsa seperti halnya dalam rumah, keselamatan rumah kita tergantung pada kita dan menjadi tanggung



jawab segenap warganya. Keamanan berarti adanya ketertiban dan tidak ada bahaya yang mengancam. Rumah kita dikatakan aman jika seluruh warganya merasa dapat hidup dengan tertib, tenteram, dan tidak tertekan. Jika terjadi suasana kacau di dalam rumah, tentu warganya akan ikut kacau, tidak tenteram dan merasa cemas. Gangguan akan dapat menimbulkan kecemasan. Keamanan masyarakat yang terganggu dapat mengakibatkan kekacauan dan tidak ada ketertiban. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga ketertiban. Ketertiban akan membawa rasa aman bagi warga masyarakat. Begitu juga halnya negara. Jika negara memiliki suasana yang terib warganya pun merasa aman. Keamanan menjamin timbulnya ketenteraman. Jika dalam masyarakat terdapat ketenteraman, negara pun akan diliputi suasana tenteram pula. Anggota masyarakat harus merasa aman dari perbuatan sewenang-wenang dan keselamatan hidupnya harus terjamin.

Apabila dalam negara masyarakatnya tertib, kehidupan warganya pun akan tertib pula. Kita tidak dapat mengharapkan terwujudnya ketertiban itu tanpa kita usahakan. Ketertiban itu sebenarnya adalah kepentingan kita semua. Oleh karena itu, ketertiban itu juga menjadi tanggung jawab kita semua. Semua perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat akan dapat mengganggu keamanan masyarakat. Kejahatan apapun merupakan musuh bersama bagi seluruh anggota masyarakat.

1. Apa yang harus dilakukan agar masyarakat dapat terjamin keamanan dan ketertibannya?
2. Mengapa ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama?
3. Coba beri contoh perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat!
4. Sebutkan usaha untuk menciptakan kehidupan tertiba dan aman dalam masyarakat!





Uji Pemahaman Konsep

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya ancaman seluruh bangsa dan negara. Hal ini ditegaskan dalam Wawasan Nusantara dalam bidang
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial budaya
 - d. hankam
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara terdapat dalam
 - a. UUD 45 Pasal 27 Ayat 3
 - b. UUD 45 Pasal 30 Ayat 1
 - c. UUD 45 Pasal 30 Ayat 2
 - d. UU Nomor 3 Tahun 2002
3. Syarat-syarat pembelaan negara diatur dalam UU Nomor
 - a. 5/1974
 - b. 1/1985
 - c. 3/1999
 - d. 3/2002
4. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat
 - a. semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatannya sendiri
 - b. semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan senjata canggih
 - c. pertahanan negara yang disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejah-teraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan internasional



- d. pertahanan negara disusun dengan memperlihatkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke
5. Dasar penyusunan pertahanan negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai
- negara yang luas
 - negara yang besar
 - negara kepulauan
 - negara maritim
6. Perhatikan pernyataan berikut!
- Untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara.
 - Menjaga keutuhan wilayah NKRI.
 - Menjaga keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
 - Menjaga hasil pembangunan nasional.
 - Menjaga rakyat dari serangan musuh yang datang.
 - Menjaga dan melindungi dari kehancuran.
- Pernyataan di atas yang merupakan tujuan pertahanan negara adalah
- 1, 2, 3, dan 4
 - 2, 3, 4, dan 5
 - 3, 4, 5, dan 6
 - 4, 5, 6, dan 1
7. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan
- seluruh wilayah Negara Kesatuan RI sebagai satu kesatuan pertahanan negara
 - wilayah yang telah diperoleh dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia
 - pembangunan nasional yang telah sampai tingkat tinggal landas
 - mempertahankan hasil pembangunan nasional di segala bidang kehidupan



8. Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya
 - a. menghadapi musuh
 - b. menanggulangi ancaman
 - c. mempertahankan negara
 - d. menangkal serangan
9. Dalam sistem pertahanan kita yang menjadi komponen utama adalah
 - a. TNI
 - b. rakyat
 - c. polisi
 - d. ABRI
10. Perlawanan rakyat semesta dapat dilakukan dengan cara antara lain
 - a. memperkuat cadangan TNI yang dilengkapi senjata
 - b. mendayagunakan kemandirian TNI dengan rakyat
 - c. melatih rakyat untuk melakukan pertahanan teritorial
 - d. penggunaan alat perang oleh rakyat terlatih
11. Rakyat terlatih merupakan komponen dasar sebab
 - a. harus dibina agar memiliki kemampuan sepadan untuk melaksanakan perang
 - b. tanpa rakyat terlatih, kesemestaan itu tidak akan memiliki dasar yang kuat
 - c. untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kelancaran roda pemerintahan
 - d. untuk menanggulangi gangguan ketertiban hukum dan gangguan ketenteraman masyarakat
12. Perhatikan pernyataan berikut!
 - 1) Untuk memelihara ketertiban masyarakat.
 - 2) Menanggulangi gangguan ketertiban hukum.
 - 3) Kelancaran roda pemerintahan dan segenap perangkatnya.
 - 4) Menanggulangi gangguan keamanan masyarakat.



- 5) Kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- 6) Menanggulangi musuh yang hendak menyerang.
- Pernyataan di atas yang merupakan fungsi ketertiban umum bagi rakyat terlatih adalah
- 1, 2, dan 3
 - 1, 3, dan 5
 - 2, 4, dan 6
 - 1, 5, dan 6
13. Rakyat terlatih mempunyai fungsi perlindungan rakyat yaitu
- untuk menanggulangi ketertiban umum dan gangguan ketenteraman masyarakat
 - kelancaran roda pemerintahan dan perangkatnya
 - kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
 - untuk menanggulangi gangguan keamanan atau subversi yang dapat mengganggu stabilitas
14. Untuk menanggulangi gangguan keamanan atau subversi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan termasuk fungsi ... dalam rakyat terlatih.
- ketertiban umum
 - perlindungan rakyat
 - keamanan rakyat
 - perlawanan rakyat
15. Kekuatan rakyat yang merupakan pangkal kekuatan bagi pelaksanaan pertahanan nasional dan sumber pokok bantuan tempur adalah
- Wanra
 - Kamra
 - Hansip
 - Linmas
16. Yang berpartisipasi langsung dalam Hankamrata bidang pertahanan adalah
- Linmas
 - Hansip
 - Wanra
 - TNI



17. Kekuatan rakyat sebagai bantuan hukum terutama bidang Kamtibmas adalah
- Polri
 - TNI
 - Hansip
 - Kamra
18. Yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat dalam menanggulangi bencana alam dan akibat perang adalah
- TNI
 - Wanra
 - Kamra
 - Hansip
19. TNI dan cadangan TNI termasuk komponen utama sebab
- setiap saat harus siap bertempur melawan musuh baik dari dalam maupun dari luar
 - merupakan kekuatan utama di dalam pertahanan kemanan negara
 - setiap saat siap dan tanggap terhadap setiap keadaan yang bisa mengancam keselamatan bangsa dan negara
 - memiliki semangat keprajuritan dalam mempertahankan negara dari serangan musuh
20. Tindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman terhadap bangsa dan negara baik dari dalam maupun dari luar, merupakan fungsi
- rakyat terlatih
 - TNI dan cadangan TNI
 - perlindungan masyarakat
 - sumber daya bantuan
21. Di bawah ini yang *bukan* termasuk cadangan TNI adalah
- | | |
|----------|-----------|
| a. Wanra | c. Hansip |
| b. Kamra | d. Polri |



22. Yang termasuk komponen khusus dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara adalah
- perlindungan masyarakat
 - sumber daya alam
 - sumber daya buatan
 - prasarana nasional
23. Betapapun besarnya kekuatan suatu pertahanan keamanan negara tidak akan mampu bertahan lama, kalau tidak didukung oleh
- militer yang kuat
 - sumber daya alam/buatan dan prasarana
 - TNI dan Polri
 - kekuatan rakyat
24. Sistem pertahanan yang mengikutsertakan kekuatan rakyat dan TNI sebagai inti pertahanan disebut sistem pertahanan
- konvensional
 - rakyat semesta
 - kontinental
 - balistik
25. Hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta yang penyelenggara-annya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengenal menyerah baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah merupakan makna dari
- UU No 20/1982 Pasal 4
 - UU No. 3/2002 Pasal 4
 - UUD 45 Pasal 30 Ayat 1
 - UUD 45 Pasal 27 Ayat 3



26. Perhatikan pernyataan berikut!

- 1) Pendidikan kewarganegaraan.
- 2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- 3) Pengabdian sebagai prajurit TNI.
- 4) Pengabdian sesuai dengan profesi.
- 5) Berperang melawan musuh yang datang.
- 6) Memahami sistem pertahanan kemanan negara.

Pernyataan di atas yang termasuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. 1, 2, 3, dan 4 | c. 3, 4, 5, dan 6 |
| b. 2, 3, 4, dan 5 | d. 4, 5, 6, dan 1 |

27. Perlawanan rakyat semesta memiliki sifat-sifat sebagai berikut, *kecuali*

- a. kerakyatan
- b. kesemestaan
- c. kewilayahan
- d. integritas

28. Seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, merupakan perlawanan rakyat semesta yang bersifat

- | | |
|----------------|----------------|
| a. kerakyatan | c. kewilayahan |
| b. kesemestaan | d. kebangsaan |

29. Perhatikan pernyataan berikut!

- 1) Kondisi dinamis bangsa Indonesia berupa keuletan dan ketangguhan.
- 2) Kondisi dinamis bangsa Indonesia harus mampu menghadapi tantangan dari mana pun datangnya.
- 3) Kelangsungan dan kelestarian hidup bangsa dan negara sangat diperlukan.
- 4) Tercapainya tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 45.



- 5) Ikut mensukseskan pembangunan nasional yang berarti ikut meningkatkan ketahanan nasional.
- 6) Ikut membina dan memelihara kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pernyataan di atas yang merupakan pengertian ketahanan nasional adalah

- a. 1, 2, 3, dan 4
 - b. 2, 3, 4, dan 5
 - c. 3, 4, 5, dan 6
 - d. 4, 5, 6, dan 1
30. Pendidikan kewarganegaraan bagi setiap warga negara merupakan keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara, yang bertujuan
- a. mengembangkan kemampuan dan kesediaan untuk membela bangsa, negara, dan tanah air
 - b. menjadi warga negara Indonesia yang berani dan penuh semangat
 - c. sebagai tempat belajar untuk menjadi TNI dan Polri
 - d. untuk menjadi bantuan tempur bagi prajurit

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Ancaman terhadap salah satu wilayah Negara Kesatuan RI merupakan ancaman seluruh bangsa dan negara, hal ini ditegaskan dalam
2. Pembelaan negara merupakan tekad dan sikap seluruh warga negara untuk menjaga
3. Bangsa Indonesia dalam membela dan mempertahankan negara senantiasa berdasarkan pada
4. Rakyat terlatih merupakan unsur dasar bagi kesemestaan dan keserbagunaan pertahanan keamanan negara. Contoh yang bukan unsur rakyat terlatih adalah
5. Yang menjadi unsur utama dalam pertahanan Indonesia adalah



6. UU yang mengatur tentang pertahanan negara adalah Undang-Undang No.
7. Usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban warga negara, hal ini ditegaskan dalam
8. Untuk menanggulangi gangguan keamanan atau subversi yang dapat mengganggu stabilitas nasional termasuk fungsi
9. Partisipasi siswa dalam usaha pembelaan negara dapat dilakukan dengan cara
10. Sistem pertahanan yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dan TNI sebagai inti pertahanan disebut

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan hakikat pertahanan negara kita!
2. Sebutkan tujuan pertahanan negara!
3. Sebutkan fungsi pertahanan negara!
4. Sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bagaimana caranya?
5. Sebutkan dua upaya pembinaan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara!
6. Perlawanan rakyat semesta dapat diwujudkan dengan dua cara. Sebutkan!
7. Sebutkan empat fungsi rakyat terlatih!
8. Sebutkan komponen pertahanan keamanan negara!
9. Jelaskan yang dimaksud Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta!
10. Apa fungsi perlindungan masyarakat itu?





Bab 2

Otonomi Daerah



Sumber: Dokumen Pribadi

Pada bab otonomi daerah ini akan dipelajari hal-hal sebagai berikut:

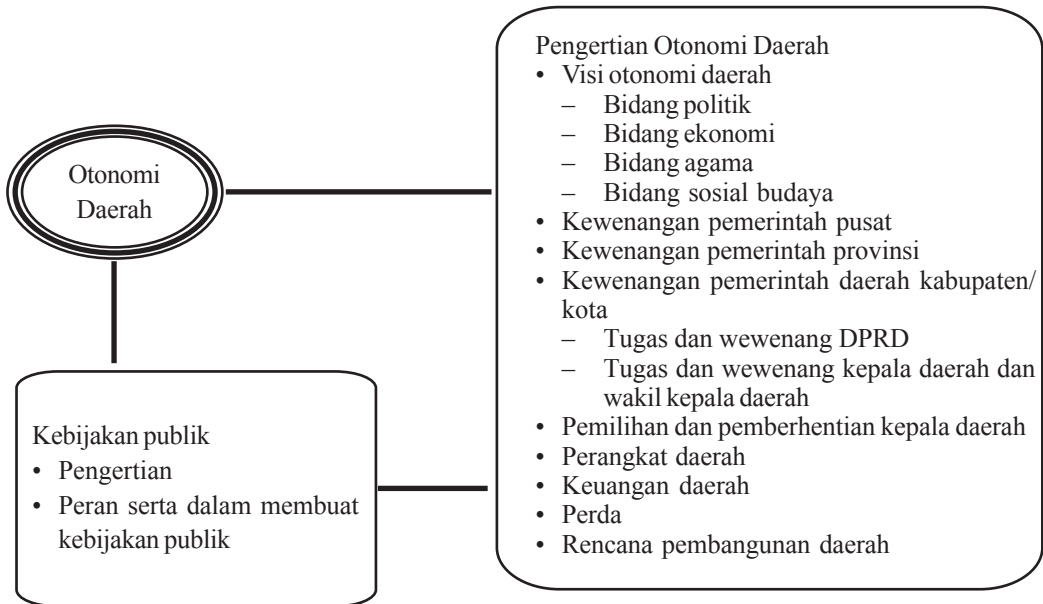
- A. Pengertian otonomi daerah
- B. Kebijakan publik

Setelah bab ini berakhir, para siswa diharapkan mencoba menganalisis tugas dan menjawab soal-soal pengembangan materi.





Peta Konsep



Kata Kunci

Setiap warga negara harus mengetahui, memahami, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kata-kata kunci pelajaran ini:

Otonomi daerah, prinsip otonomi daerah, asas desentralisasi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat.



Bab 2

Otonomi Daerah

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi otonomi daerah ini para siswa diharapkan mampu:

1. memberikan pengertian otonomi daerah;
2. menjelaskan prinsip otonomi daerah;
3. menjelaskan asas desentralisasi;
4. menjelaskan wewenang pemerintah pusat;
5. menjelaskan wewenang pemerintah provinsi;
6. menjelaskan kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
7. menjelaskan kebijakan publik;
8. menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.

Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.





A. Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar daerah dapat menjalankan perannya tersebut, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya



Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



yang disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain prinsip tersebut di atas dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah, sehingga isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yaitu:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan kesinambungan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.



4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi



daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lain, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah dan juga menjalin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah pusat. Menjaga hubungan serasi dengan pemerintah pusat dimaksudkan untuk tetap terjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka tujuan negara.



*Gambar 2.1:
Balai Kota Surakarta
Sumber: Dokumen
Pribadi*

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu, memberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Dalam hal ini pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pengertian desentralisasi di atas, Litvack dan Seddon sebagaimana dikutip oleh Sadu Wasistiono (2002 : 17-



18) menyatakan bahwa desentralisasi adalah *the transfer of authority and responsibility for public function from central government to subordinator quasi-independent government organization or he private sector. Dengan demikian* yang dimaksud desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas maupun kepada sektor swasta.



*Gambar 2.2:
Gedung DPRD Solo
Sumber: Dokumen
Pribadi*

Creema dan Rondinelli (1983) membagi desentralisasi menjadi empat tipe yaitu:

1. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat.
2. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana.



4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

Agar desentralisasi berhasil dengan baik, menurut Litvack dan Seddon yang dikutip Sadu Wasistiono (2002:19) diperlukan lima kondisi, yaitu:

1. Kerangka kerja desentralisasi harus memperlihatkan kaitan antara pembiayaan lokal dan kewenangan fiskal dengan fungsi dan tanggung jawab pemberian pelayanan oleh pemerintah daerah.
2. Masyarakat setempat diberi informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan biaya pelayanan serta sumber-sumbernya, dengan harapan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah menjadi lebih bermakna.
3. Masyarakat memerlukan mekanisme yang jelas untuk menyampaikan pandangannya sebagai upaya mendorong partisipasinya.
4. Harus ada sistem akuntabilitas yang berbasis publik dan informasi yang transparan yang memungkinkan masyarakat memonitor kinerja pemerintah daerah.
5. Harus didesain instrumen desentralisasi seperti kerangka kerja institusional, struktur tanggung jawab pemberian pelayanan dan sistem fiskal antara pemerintah.

Kebijakan otonomi daerah secara yuridis telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. XV / MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan serta Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain alasan yuridis yang disebutkan di atas kebijakan otonomi daerah juga dalam upaya menghadapi globalisasi yang masuk dalam kehidupan kita yang mau tidak mau, suka tidak suka



daerah harus lebih diberdayakan dengan cara diberi kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Otonomi pertama yang telah digulirkan sejak tahun 1999, tujuan utamanya adalah di satu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang sangat berarti. Kemampuan prakarsa dan kreativitas akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik semakin kuat. Menurut Syaikani, Affan Gaffar, dan Ryaas Rasyid (2002 : 172) desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Ini dengan sendirinya akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004, maka kewenangan itu didesentralisasikan ke daerah, ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah, kewenangan mengurus dan mengatur manajemen rumah tangga daerah di serahkan kepada masyarakat di daerah. Dengan demikian pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas, dan pengevaluasi.

Selanjut Syaikauni dkk. (2002 : 173-184) menyatakan bahwa visi otonomi daerah dapat dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu:

1. Bidang politik


Bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi, maka ia harus dipahami



Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab I Pasal 1 UU No. 32/2004 disebut-kan:

- 1. Pemerintah pusat adalah presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.*
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.*





Info
Kewarganegaraan

3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambar 2.3:
Areal Pertanian sebagai penunjang perekonomian daerah
Sumber: Dokumen Pribadi

sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

2. Bidang ekonomi



Bidang ekonomi, otonomi di satu pihak harus mencerminkan lancarnya pelaksanaan kebijakan otonomi nasional di daerah dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai parkarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat yang sejahtera yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.



3. Bidang sosial budaya

Bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan sekitarnya.

Berdasarkan visi tersebut, maka konsep otonomi daerah dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah, kecuali untuk bidang keuangan atau moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan pemerintah pusat yang bersifat strategis nasional.
- b. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi.
- c. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan.
- d. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara.
- e. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi pusat yang bersifat *block grant*.
- f. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial.

Pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak perubahan kewenangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

1. Kewenangan pemerintah pusat

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan



4. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.





7. *Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.*

8. *Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

daerah otonom. Menurut Pasal 10 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004 ada enam urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu:

- a. Politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya.
- b. Bidang pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan perang dan damai, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya.
- c. Bidang keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak sekelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.
- d. Bidang fiskal atau moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.
- e. Bidang yudisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga kemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberi grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Perpu, PP, dan peraturan lain berskala nasional.
- f. Bidang agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya.



Dalam menyelenggarakan urusan tersebut pemerintah dapat menggunakan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan atau menyelenggarakan sendiri, yang dimaksud asas dekonsentrasi adalah bahwa pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah. Sedangkan asas tugas pembantuan adalah bahwa pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

2. Kewenangan pemerintahan provinsi

Kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksud urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yaitu:

- a. Perlindungan hak konstitusional.
- b. Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
- c. Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dalam Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.



9. *Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI.*
10. *Peraturan daerah adalah peraturan provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.*
11. *Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota*





12. Desa atau yang disebut nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan RI

13. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

3. Kewenangan daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain diatur dalam Pasal 18 UU No. 32/2004. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
- b. Pengaturan administrasi.
- c. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.



- d. Pengaturan tata ruang.
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan.
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

4. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota

Menurut Pasal 14 UU No. 32/2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan.
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- n. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.



Gambar 2.4:
Jembatan peng-
hubung antarpulau di
Batam
Sumber: Dokumen
Pribadi

Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di daerah dibentuk DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat





14. *Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.*

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, hal ini ditegaskan dalam UU No. 32/2004 Pasal 40 dan 41.

1. Tugas dan wewenang DPRD

Adapun tugas dan wewenang DPRD adalah

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Mendagri bagi DPRD provinsi dan kepada Mendagri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.



- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

2. Hak DPRD

Sebagai lembaga, DPRD mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 yaitu:

- a. Hak interpelasi.
- b. Hak angket.
- c. Hak menyatakan pendapat.

Sedangkan anggota DPRD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Membela diri.
- f. Imunitas.
- g. Protokoler.
- h. Keuangan dan administrasi.

Selain mempunyai hak anggota DPRD mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No. 32/2004 yaitu :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Kesatuan RI tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan RI.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.



- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah. Kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat daerah tersebut. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan lewat partai politik atau gabungan partai politik peserta Pilkada yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Kepala daerah dengan dibantu seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, yang karena jabatannya juga disebut wakil pemerintah. Sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur sebagai wakil pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Kepala daerah kabupaten disebut bupati, sedangkan daerah kota disebut wali kota yang menjalankan tugas dan wewenangnya selaku kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota.

Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- b. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota.



- c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan menurut Muslimin (1978 : 224), gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membina ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya.
- b. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan lintas sektor mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dimaksud.
- c. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan kesatuan bangsa sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.
- e. Melaksanakan segala tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya.

Dalam Pasal 25 UU No. 32/2004 ditegaskan bahwa kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Mengajukan rancangan Perda.
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sedangkan tugas wakil kepala daerah adalah:

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi.
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26 UU No. 32/2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilarang:

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain.
- b. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun.
- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan.
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25.
- f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



4. Pemilihan dan pemberhentian kepala daerah

Dalam Pasal 24 Ayat 5 UU No. 32/2004 ditegaskan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. Menurut Pasal 86 Ayat 1 UU No. 32/2004 bahwa pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pada Ayat 3 disebutkan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau yang diliburkan.

Selanjutnya dalam Pasal 107 UU No. 32/2004 ditegaskan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Dalam hal pasangan calon yang memperoleh suara terbesar terdapat lebih dari satu pasang calon yang memperoleh suara yang sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 25%, maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.

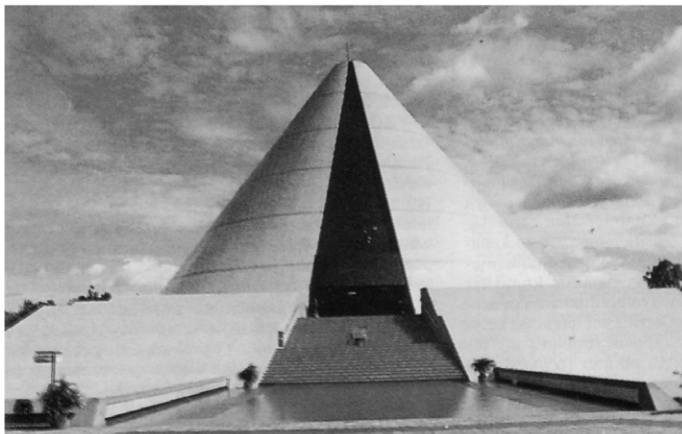
Adapun pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat dilakukan apabila:



- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- f. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

5. Perangkat daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah, kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.



*Gambar 2.5:
Salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Sumber: Ensiklopedi
Nasional Indonesia*

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah.



Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris daerah untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur. Sedangkan sekretaris daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati/wali kota.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/bupati/wali kota dengan persetujuan DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

Badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala



rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Secara umum tugas camat adalah:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Camat dalam menjalankan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat.



Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/wali kota. Lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.



Gambar 2.6:
Kantor Bupati Karang-
anyar
Sumber: Dokumen
Pribadi

Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-perundangan. Lurah bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui camat. Lurah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah.

6. Keuangan daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan terdiri dari atas dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan sumber daya alam. Selanjutnya ditegaskan bahwa, dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- a. PBB sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, serta kehutanan.
- b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, serta kehutanan.
- c. Pajak penghasilan (PPh).

Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi, hal ini ditegaskan Pasal 11 Ayat 3 UU No. 33/2004.

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah.

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

10% dari penerimaan PBB dan 20% dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.



Sementara itu penerimaan negara dari sektor gas alam setelah dikurangi pajak dibagikan dengan imbangan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah.

Dana alokasi umum dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Sedang DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

- a. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional.
- b. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.



*Gambar 2.7:
Kantor Pendapatan
Daerah Kabupaten
Karanganyar
Sumber: Dokumen
Pribadi*

Dari uraian di atas bahwa sumber pendapatan daerah diperoleh dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah lain-lain yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain



pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah yang dimaksud adalah bantuan yang berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan-badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

7. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda berlaku setelah dindangkan dalam lembaran daerah.

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Materi muatan Perda mengandung asas: pengayoman, kemanusiaan; kebangsaan, kekeluargaan, ke-Nusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, gubernur atau bupati/wali kota.

8. Rencana pembangunan daerah

Dalam rangka menyelenggarakan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembanguna nasional.



Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yang meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional.
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.
- c. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Gambar 2.8:
Kegiatan Posyandu
Sumber: Dokumen
Pribadi

- d. Rencana kerja pembangunan daerah, yang disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.





Kegiatan Siswa

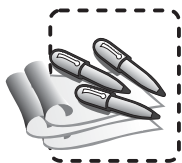
1. Opini

Di kampung Pawisman Gedangan RT 04 RW 02 Desa Kemiri, sedang melaksanakan pengecoran jalan oleh warga RT tersebut. Pengecoran tersebut menggunakan dana yang berasal dari iuran warga. Iuran bagi rumah yang menghadap ke jalan yang dicor Rp 1.000.000,00/kepala keluarga dan mendapat bantuan dana PPK. Warga dengan kerja bakti melakukan pengecoran jalan tersebut.

Tuliskan tanggapan kalian, mengenai kegiatan tersebut, dalam lembaran kertas tersendiri!

2. Tugas kegiatan mandiri secara individu

- Coba buat daftar keberhasilan pembangunan di kampung atau desa kalian, yang meliputi bidang materiil dan spiritual yang didanai dan dikerjakan oleh masyarakat setempat.
- Berilah ulasan pada masing-masing bidang tersebut.
- Setelah selesai hasilnya kalian presentasikan di depan kelas kalian.
- Hasil diserahkan pada guru Pendidikan Kewarganegaraan kalian untuk dinilai



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

- Apa yang dimaksud otonomi daerah itu?
- Sebutkan bidang-bidang yang menjadi wewenang daerah!
- Jelaskan asas desentralisasi!
- Sebutkan kewenangan pemerintah provinsi!
- Sebutkan tugas DPRD kabupaten/kota!





B. Kebijakan Publik

1. Pengertian kebijakan publik

Istilah kebijakan publik (*public policy*) berasal dari kata kebijakan dan publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Biasanya kebijakan berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, atau lembaga. Contoh kebijakan publik: program kerja organisasi, peraturan-peraturan baik undang-undang atau perda, dan sebagainya. Publik artinya orang banyak atau masyarakat umum dari berbagai kalangan yang tidak dibatasi oleh profesi dan status sosial ekonomi. Apabila disingkat kebijakan publik diartikan sebagai konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik yang digunakan untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak.

Untuk memahami arti kebijakan publik dapat kita simak pendapat-pendapat para pakar yaitu:

a. *Dey*

Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.

b. *Edwar III*

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

c. *Kartasmita*

Kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa yang menyebabkannya (3) apa pengaruhnya.

d. *Anderson*

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang



mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan dan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, birokrasi pemerintah, aparat penegak hukum, dan badan-badan pembuat keputusan publik lain.

Jadi kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.



*Gambar 2.9:
Petugas Parkir
Sumber: Solo Pos 25
November 2006*

Kebijakan publik yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan tingkat hirarkinya, apakah di tingkat pusat (nasional), provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa tidak akan bermakna jika tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan penerapan (implementasi) tersebut adalah agar apa-apa yang telah digariskan dapat terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelaksanaan kebijakan publik di masyarakat melibatkan berbagai indikator seperti manusia, dana, dan sarana serta prasarana. Untuk itu kebijakan agar berhasil secara efisien dan efektif sebelum proses perumusan dan pengesahannya disosialisasikan lebih dahulu kepada masyarakat.



Sosialisasi kebijakan publik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media masa baik elektronik seperti internet, TV, email dan radio, maupun cetak seperti koran, majalah, sependuk, dan selebaran.

2. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik

a. Proses pembentukan kebijakan publik

Pembentukan kebijakan publik dilakukan melalui suatu proses yang sering disebut perumusan kebijakan publik. Proses ini dimulai adanya *input* (masukan) berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

Input tersebut dikelompokkan atau diidentifikasi satu per satu sehingga menjadi usulan. Usulan atau input yang telah terekomendasi dibahas bersama oleh pembuat kebijakan publik seperti pemerintah, DPR/DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun akademisi. Pembahasan tersebut menghasilkan keputusan bersama yang disebut kebijakan atau *output* (keluaran).

Output atau keluaran tersebut kemudian diterapkan dan dievaluasi. Hasil evaluasi itu dijadikan masukan untuk memperbaiki kebijakan tersebut. Pembentukan kebijakan publik tersebut berawal dari pembuatan agenda, formulasi dan legitimasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan dampak kebijakan serta koreksi, dan pembuatan kebijakan baru.

Pembuatan agenda adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan suatu kebijakan. Tahap formulasi dan legitimasi merupakan tahap teknis untuk merumuskan masalah yang telah diagendakan, dicari pemecahannya, dan disahkan menjadi kebijakan publik. Untuk memperoleh hasil yang tepat, formulasi kebijakan harus dilakukan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang mendalam dan memadai. Tahap implementasi adalah tahap penerapan atau pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini kebijakan publik diuji apakah kebijakan itu dapat



memecahkan permasalahan atau tidak. Tahap evaluasi kebijakan publik dapat dibagi menjadi evaluasi proses, evaluasi dampak, dan evaluasi analisis strategi.

b. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

Kebijakan publik merupakan hasil kerja sama berbagai pelaku, baik pemerintah, masyarakat, para ahli, maupun lembaga-lembaga sosial. Proses seperti ini telah kita lakukan dalam kehidupan sekolah baik yang menyangkut intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kesiswaan kita telah membuat program kerja. Proses perumusan sampai keputusan pembuatan program kerja tersebut melibatkan seluruh unsur yang tergabung dalam organisasi siswa. Efek pelaksanaannya juga akan dirasakan oleh setiap anggota organisasi. Pedoman pelaksanaan kerja tersebut bersifat memaksa, sehingga pelanggarnya akan mendapat sanksi.

Begitu pula kebijakan publik yang perumusannya melibatkan semua komponen masyarakat akan mengikat semua komponen masyarakat pula. Sehingga bagi pelanggar kebijakan publik akan mendapat sanksi.

Kebijakan publik mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat, misalnya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang larangan merokok di tempat umum. Larangan itu harus ditaati oleh semua masyarakat yang ada di daerah itu.

Dan apabila sudah menjadi kebijakan publik semua komponen masyarakat mau tidak mau harus melaksanakan keputusan tersebut.

c. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan publik

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, khususnya dalam merumuskan kebijakan



publik. Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian kebijakan publik yang ditetapkan atau dikeluarkan senantiasa diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan mengakomodasi masukan yang disampaikan masyarakat tersebut, kebijakan yang dihasilkan segala dampaknya dapat dipertanggungjawabkan. Suasana yang demikian itu mengindikasikan semangat demokrasi telah berkembang di dalam masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik menunjukkan kecintaannya pada daerahnya, sehingga akan tercipta kehidupan daerah yang kondusif dan tenang.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik dapat dilakukan dengan jalan:

- 1) Masyarakat dapat membentuk opini (pemikiran) melalui media masa bahwa masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan, misalnya jalan yang harus diperbaiki karena rusak.
- 2) Menyampaikan aspirasinya pada saat anggota DPRD berkunjung ke kampung-kampung/desa-desa bahwa masyarakat desa/kampung sangat membutuhkan sarana transportasi.
- 3) Mengkritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah yang tidak memihak kepentingan masyarakat, misal kebijakan pembuatan jalan tetapi dalam kebijakan tersebut tidak mencantumkan pasal tentang ganti rugi tanah masyarakat yang terkena jalan.
- 4) Partisipasi juga dapat ditunjukkan dengan memberikan dukungan moral kepada perumus kebijakan. Dalam tahap ini masyarakat harus berperan aktif mengontrol apakah input dari masyarakat tersebut terakomodir atau tidak.
- 5) Masyarakat memberikan masukan masalah yang dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi kepada pemerintah daerah lewat telepon atau SMS dengan menunjukkan fakta-fakta di lapangan.



Selain bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi itu antara lain:

- 1) Kebijakan lingkungan hidup, contoh peran sertanya adalah ikut menjaga kebersihan lingkungan hidup, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjaga sumber daya alam yang ada di daerah, tidak merokok di sembarang tempat, menjaga kesehatan lingkungan, dan sebagainya.
- 2) Kebijakan IMB, misalnya masyarakat tanpa diperingatkan oleh aparat pemerintah apabila ingin mendirikan bangunan memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah.
- 3) Kebijakan retribusi daerah, misalnya apabila kita memiliki mobil angkutan umum membayar retribusi kepada petugas tidak boleh mencari jalan lain menghindari retribusi.



Kegiatan Siswa

Bacalah dengan saksama!

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin mengembangkan kawasan wisata di Kepulauan Karimunjawa dari manca negara maupun nasional.

Tahun 2007 ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat mencapai 12%. Kawasan pariwisata khusus ini murni digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto dan sudah disampaikan langsung pada Rapat Kerja Nasional Pariwisata di Jakarta.

Alasan Karimunjawa dijadikan kawasan wisata khusus sebab Karimunjawa termasuk daerah konservasi, sehingga dalam



pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan kelestarian alam lingkungan yang ada agar tidak rusak.

Ada dua aspek yang menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan pariwisata khusus ini, di antaranya pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan fasilitas pendukung seperti hotel, kafe, dan lain sebagainya.

Setelah kalian membaca program pengembangan pariwisata Karimunjawa tersebut diskusikan masalah di bawah ini dengan kelompok belajar kalian dan hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas oleh salah satu anggota kelompok!

Masalah:

1. Mengapa Karimunjawa dijadikan kawasan pariwisata khusus?
2. Kendala apa yang muncul akibat pengembangan tersebut?
3. Mengapa aspek sumber daya manusia perlu diperhatikan dalam pengembangan tersebut dan apa hubungannya?



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Apa tujuan adanya otonomi daerah?
2. Adakah faktor yang mempengaruhi otonomi daerah?
3. Apakah arti partisipasi masyarakat?
4. Apa arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
5. Bagaimana peran masyarakat dalam otonomi daerah?



Rangkuman

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 dan seiring era reformasi yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas, maka daerah-daerah di Indonesia diberi kewenangan yang lebih luas dan nyata untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.



Dengan daerah diberi otonomi yang lebih luas dan nyata akan menumbuhkan kreativitas di daerah-daerah untuk mengembangkan potensinya, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Dampak lain dengan adanya otonomi daerah kehidupan demokrasi semakin semarak dan dewasa. Hal ini dapat dilihat dalam pemilihan kepala daerah yang damai di masing-masing daerah.

Selain hal tersebut menyangkut kebijakan publik dilakukan dengan lebih transparan. Dengan adanya otonomi tersebut masyarakat berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan daerah.



Glosarium

desa	= kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kelurahan	= kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
kecamatan	= kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
kabupaten	= daerah swatantra tingkat II yang diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri.
provinsi	= wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur.
DPRD	= lembaga perwakilan rakyat daerah.





Tugas

Bentuklah kelompok belajar yang beranggota 4-5 siswa, dan salah satu menjadi ketua kelompok. Bagilah masing-masing siswa mencari berita/gambar dalam surat kabar atau majalah, suruhlah berita/gambar tersebut digunting dan dikumpulkan. Urutkan masing-masing berita atau gambar tersebut menurut bidang, agama; ekonomi; keamanan, dan sosial budaya, serta pariwisata setiap bidang harap diberi komentar berdasarkan hasil diskusi kelompok!

Kemudian buatlah kliping dengan waktu 4 jam pelajaran (dua minggu), kliping kumpulkan pada guru Pendidikan Kewarganegaraan kalian!



Uji Pemahaman Konsep

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Segala kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang disebut
 - a. kebijakan publik
 - a. peraturan pemerintah
 - b. undang-undang
 - c. peraturan hukum
2. Kebijakan publik merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah, ini merupakan penertian kebijakan publik dari
 - a. Dey
 - b. Kartasasmita
 - c. Edwar III
 - d. Anderson



3. Permasalahan yang muncul dari pelaksanaan otonomi daerah antara lain
 - a. timbul rasa kedaerahan yang sempit
 - b. pengangkatan pegawai oleh bupati
 - c. DPRD membuat Perda bersama bupati/wali kota
 - d. anggaran daerah banyak yang devisit
4. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah
 - a. UU No. 22/1999
 - b. UU No. 25/1999
 - c. UU No. 32/2004
 - d. UU No. 33/2004
5. Menurut undang-undang pemerintahan daerah, pemerintahan yang terkecil adalah
 - a. desa
 - b. kalurahan
 - c. kabupaten
 - d. kota
6. Peraturan desa dibuat oleh
 - a. kepala desa
 - b. BPD
 - c. perangkat desa
 - d. kepala desa dan BPD
7. Kepala desa dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada
 - a. LKMD
 - b. BPD
 - c. bupati
 - d. camat
8. Agar kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, maka seluruh rakyat harus ikut berpartisipasi aktif mengikuti perkembangan yang ada antara lain sebagai berikut, *kecuali*
 - a. memberi masukan melalui surat kabar atau media massa
 - b. menyampaikan aspirasi lewat lembaga-lembaga perwakilan rakyat
 - c. mengikuti perkembangan zaman dengan membaca surat kabar
 - d. menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi secara damai



9. Contoh perilaku warga negara dalam melaksanakan kebijakan publik adalah
- ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum
 - ikut membantu pemerintah menimbun bahan bakar minyak
 - membantu polisi dalam menangkap pencuri setiap hari
 - melaksanakan penghematan kebijakan pemerintah pusat
10. Pemerintahan daerah diatur dalam UUD 1945 pasal
- 17
 - 18
 - 19
 - 28
11. Yang membuat Perda provinsi adalah
- gubernur
 - bupati
 - presiden
 - gubernur bersama DPRD provinsi
12. Contoh kebijakan publik yang mengatur pendidikan, *kecuali*
- UU No. 20/2003
 - UU No. 14/2005
 - PP No. 19/2005
 - PP No. 20/2005
13. Kebijakan publik yang dikeluarkan presiden tahun 2005 yang memberatkan kehidupan rakyat adalah
- kenaikan BBM
 - pengangkatan PNS
 - pemberantasan KKN
 - kenaikan harga dasar listrik
14. Bantuan operasional sekolah termasuk kebijakan publik bidang
- ekonomi
 - politik
 - sosial budaya
 - pendidikan



15. Ketentuan bahwa kelulusan tahun pelajaran 2005/2006 bahwa nilai ujian nasional rata-rata 4,51, hal ini merupakan
- kebijakan publik
 - peraturan pemerintahan
 - peraturan menteri
 - keputusan pemerintah
16. Di bawah ini adalah pihak yang paling berperan dalam melaksanakan kebijakan publik adalah
- pemerintah
 - aparatus
 - masyarakat
 - negara
17. Kita sering mendengar istilah otonomi yang merupakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pusat. Istilah otonomi diatur dalam UU No. 32/2004 tentang
- Otonomi Daerah
 - Pemerintah Daerah
 - Pemerintahan Daerah
 - Pemerintahan Otonomi Daerah
18. Bersama bupati, DPRD kabupaten membentuk peraturan daerah, hal ini DPRD kabupaten menjalankan fungsinya sebagai
- wakil rakyat
 - pengawasan
 - anggaran
 - legislasi
19. Pemerintah membuat kebijakan publik untuk
- menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat
 - mengatur kehidupan masyarakat agar masyarakat takut pemerintah
 - memberi sanksi masyarakat yang melanggar peraturan
 - menyadarkan masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat



20. Kebijakan publik dilaksanakan oleh
- masyarakat
 - pemerintah
 - pribadi warga
 - pemerintah dan masyarakat
21. Setelah kebijakan publik dibentuk pemerintah harus melakukan
- pengamanan
 - pengawasan
 - evaluasi
 - penyesuaian
22. Salah satu manfaat kebijakan publik adalah
- membentuk budaya demokrasi
 - menyejahterakan rakyat tertentu
 - membantu masyarakat tertib
 - memudahkan pemerintah pusat
23. Masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda dan dapat hidup bekerja sama secara damai disebut
- masyarakat demokrasi
 - masyarakat hukum
 - masyarakat berbudaya
 - masyarakat madani
24. Perhatikan pernyataan berikut!
- 1) Kesukarelaan
 - 2) Keswasembadaan
 - 3) Kemandirian
 - 4) Melaksanakan semua peraturan
 - 5) Menjalankan perintah
 - 6) Hidup bersama dengan orang lain
- Pernyataan di atas yang merupakan ciri masyarakat madani adalah
- 1, 2, 3, dan 4
 - 2, 3, 4, dan 5
 - 3, 4, 5, dan 6
 - 4, 5, 6, dan 1



25. Tindakan yang harus dilakukan untuk merumuskan kebijakan publik yaitu
- menyampaikan usul dalam bentuk tulisan atau lisan lewat DPRD
 - menulis dalam surat kabar tentang kebutuhan masyarakat banyak
 - mendatangi pemerintah untuk meminta keterangan
 - mengajukan rumusan hukum baru untuk diproses
26. Memberi dorongan moral kepada Pemda yang sedang merumuskan kebijakan publik merupakan
- tindakan reaksioner
 - tindakan negatif
 - tindakan positif
 - tindakan tidak terpuji
27. Dalam perumusan kebijakan publik tidak semua anggota masyarakat berperan serta hal ini disebabkan
- telah terbiasa pada pola lama
 - adanya kesempatan untuk berpartisipasi
 - mengetahui prosedur pembuatan kebijakan publik
 - adanya pengaruh eksternal yang kuat
28. Orang yang memandang positif sebuah kebijakan publik yang akan dikeluarkan akan mendukung peraturan tersebut dengan
- penuh kesadaran
 - penuh semangat
 - semangat membangun
 - semangat disiplin
29. Perumusan kebijakan publik merupakan saat yang tepat bagi anggota masyarakat untuk ikut berpartisipasi, tetapi hal ini jarang dilakukan oleh anggota masyarakat sebab
- masyarakat tidak tahu akan prosedur berpartisipasi
 - masyarakat tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi
 - pembuatan peraturan perlu partisipasi seluruh warga masyarakat
 - masyarakat tidak peduli terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah



30. Faktor eksternal yang membuat anggota masyarakat enggan melakukan kebijakan publik adalah
- adanya pola sentralistik yang tidak sesuai dengan otonomi daerah
 - adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat
 - tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
 - kebijakan publik tidak memihak kepentingan masyarakat
31. Otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, *kecuali*
- pendidikan
 - kebudayaan
 - hukum
 - fiskal
32. Suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah disebut otonomi
- luas
 - daerah
 - khusus
 - nyata
33. Pemerintah kota dikepalai oleh
- bupati
 - gubernur
 - walikota
 - sekda
34. DPRD kabupaten dipilih rakyat secara
- demokratis
 - perwakilan
 - langsung
 - bertahap
35. Peraturan daerah kabupaten dibuat oleh
- DPRD bersama DPRD provinsi
 - DPRD provinsi dengan DPR RI
 - Presiden bersama DPRD
 - DPRD kabupaten bersama bupati



II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Kepala daerah kabupaten adalah
2. Yang mengawasi jalannya pemerintahan daerah adalah
3. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh
4. Pemerintahan daerah diatur dalam UU No.
5. UU No. 33 Tahun 2004 mengatur tentang
6. Sekretariat daerah dipimpin oleh
7. Bupati/wali kota dipilih oleh
8. Bagian hukum dalam pemerintahan daerah merupakan bagian dari asisten
9. Yang bertugas mengadakan fungsi pengawasan adalah
10. Yang menyusun RAPBD kota madya adalah

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Kebijakan publik mencakup bidang apa saja sebutkan!
2. Siapa yang melaksanakan membuat kebijakan publik tersebut!
3. Apa tujuan dibuatnya kebijakan publik?
4. Berilah tiga contoh kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pusat!
5. Sebutkan tiga kebijakan pemerintah pusat yang dianggap oleh publik merugikan masyarakat!
6. Sebutkan tugas DPRD kabupaten/kota!
7. Sebutkan tiga fungsi DPRD provinsi!
8. Sebutkan bidang-bidang yang masih tetap ditangani oleh pemerintah pusat!
9. Sebutkan tugas gubernur!
10. Sebutkan landasan hukum otonomi daerah!





Bab 3

Globalisasi



Sumber: Kompas, 9 Januari 2005

Pada bab globalisasi ini akan dipelajari hal-hal sebagai berikut:

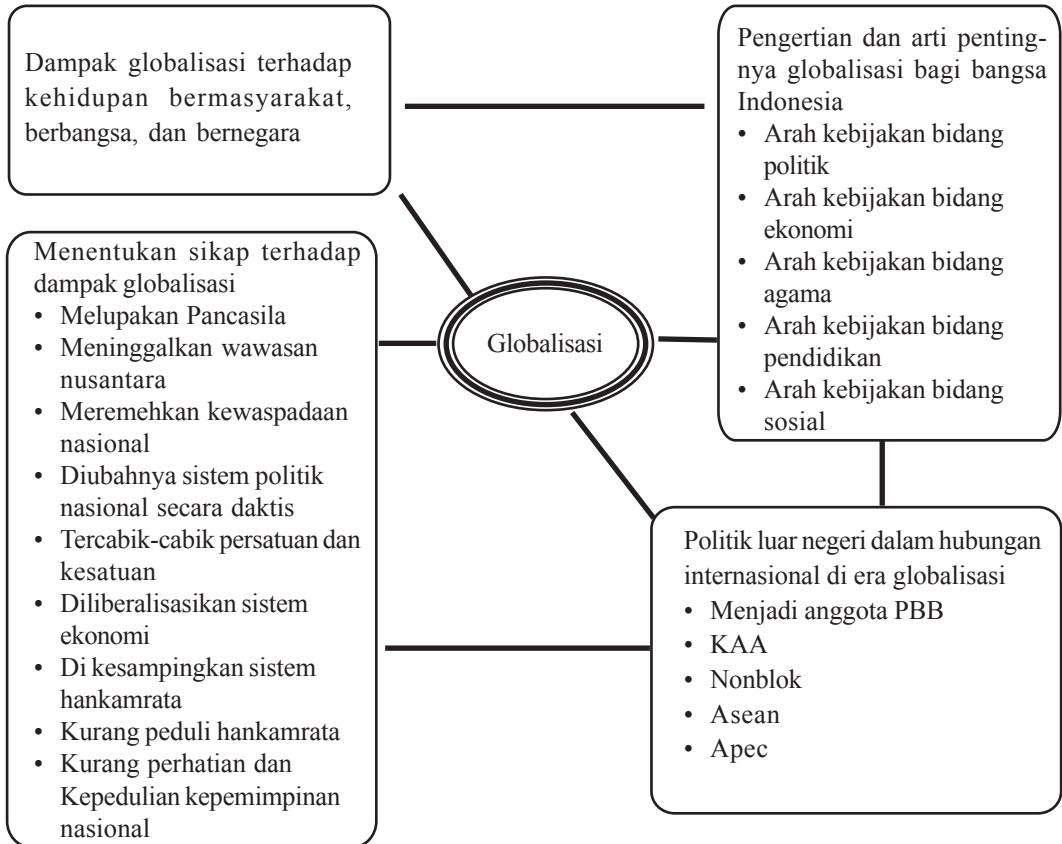
- A. Pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia
- B. Politik luar negeri dalam hubungan internasional di era globalisasi
- C. Dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- D. Menentukan sikap terhadap dampak globalisasi

Setelah bab ini berakhir, para siswa diharapkan mencoba menganalisis tugas dan menjawab soal-soal pengembangan materi.





Peta Konsep



Kata Kunci

Setiap warga negara harus mengetahui, memahami dan menyadari terhadap adanya dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata-kata kunci pelajaran ini:

Globalisasi, arah kebijakan, politik luar negeri bebas aktif, implementasi politik luar negeri bebas aktif, dan dampak globalisasi.



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi globalisasi ini para siswa diharapkan mampu:

1. memberikan pengertian globalisasi;
2. menjelaskan arah kebijakan untuk menghadapi globalisasi;
3. pengertian politik luar negeri bebas aktif;
4. menyebutkan tujuan politik bebas aktif;
5. menjelaskan implementasi politik luar negeri bebas aktif;
6. menyebutkan dampak globalisasi;
7. menyebutkan wujud dari dampak globalisasi.

Kehidupan manusia dalam berinteraksi sudah tidak dibatasi batas-batas suatu negara. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini lingkungan kehidupan kita seolah makin sempit karena kita sekarang ini dapat menikmati peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh belahan bumi. Era yang demikian ini yang disebut era globalisasi. Dalam era ini manusia atau bangsa tidak dapat lepas dari bangsa lain, sehingga diperlukan kerja sama satu dengan yang lain.

Bangsa Indonesia dalam hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea 4. Alinea tersebut merupakan dasar politik luar negeri bebas dan aktif. Ini berarti bangsa Indonesia bebas mengatur pemerintahannya sendiri dan tidak memihak salah satu kekuatan yang ada di dunia serta ikut aktif menciptakan perdamaian dunia. Perwujudan dari politik Indonesia bebas aktif adalah mengadakan hubungan dan kerja sama dengan bangsa lain baik secara bilateral maupun multilateral.





A. Globalisasi Bagi Kehidupan Suatu Bangsa

1. Pengertian Globalisasi

Masa sekarang sering disebut sebagai era globalisasi. Banyak hal yang terjadi atau berlaku di suatu tempat dapat dengan begitu cepat mendunia.



*Gambar 3.1: Sejumlah Pengunjung melihat produk elektronik
Sumber: Solo Pos, 26 September 2006*

Globalisasi dapat diartikan pula sebagai fenomena yang menjadikan dunia semakin mengecil dari segi interaksi hubungan antara sesama manusia. Pada saat yang sama, globalisasi dimaknai sebagai suatu proses kehidupan yang sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik politik, sosial, ekonomi, teknologi, bahasa, budaya, ideologi, serta segenap aspek kehidupan masyarakat lainnya. Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai, utamanya mempengaruhi cara berpikir dan gaya bertindak dari satu negara kepada negara yang lain. Pada masa kini gelombang globalisasi tidak dapat dibendung apalagi dihindari. Semua bangsa di dunia mau tidak mau dan suka tidak suka terlibat di dalamnya.

Sebagai contoh, suasana sepak bola Piala Eropa, suasana “Gila Bola” atau “Sepak Bola Mania” itu tidak hanya mewarnai masyarakat Eropa di mana dilangsungkan pertandingan. Tetapi sepak bola mania juga mewarnai





Globalisasi berasal dari akar kata globe yang dalam bahasa Indonesia disamakan dengan bola dunia. Maksudnya adalah proses mendunia

masyarakat di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia baik di kota-kota sampai pelosok desa, semuanya terjangkau “Gila Bola”.

Kata globalisasi berasal dari kata “globe” yang berarti bola bumi buatan atau peta bumi seperti bola. Jadi globalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Artinya dunia yang begitu luas dan jarak antarnegara yang begitu jauh, kini dkecilkan atau seolah-olah menjadi kecil. Seolah-olah tidak ada lagi batas-batas geografi antarnegara yang satu dengan negara yang lain. Dunia yang begitu luas yang dihuni makhluk hidup ini, seolah-olah dimiliki satu bangsa saja yaitu satu bangsa dunia atau warga dunia.

Lodge mendefinisikan globalisasi sebagai sebuah proses yang dikuasai oleh aliran informasi, perdagangan, dan manusia yang mengglobal. Proses ini dipercepat oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kennedy dan Cohen menyebutkan bahwa transformasi yang terjadi saat ini telah membawa kita pada paham kebijaksanaan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang pantas untuk pengaruh politik, merupakan sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu.

Zaman globalisasi ditandai dengan semakin kecilnya hambatan dalam berkomunikasi antarmasyarakat di dunia. Batas-batas negara atau jauhnya tempat yang satu dengan lainnya tidak lagi menjadi hambatan yang berarti bagi berlangsungnya komunikasi dan juga pertemuan antarwarga masyarakat. Seluruh umat manusia di dunia mudah untuk saling memperhatikan, mengetahui, dan membentuk pandangan bersama mengenai masalah-masalah yang dihadapi.

Zaman sekarang juga disebut era iptek. Iptek menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan. Iptek merupakan faktor penentu dalam kehidupan, bahkan menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat.

Untuk menghadapi era globalisasi dan penerapan iptek diperlukan adanya sikap bijaksana, yaitu kesediaan untuk membuka diri dan sekaligus waspada. Artinya, kita berani menerima pengaruh globalisasi dan penerapan iptek tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang memiliki keunikan tersendiri.



Bagi bangsa Indonesia jati diri adalah nilai-nilai dan norma-norma yang telah membentuk kita sebagai bangsa yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ukuran atau norma guna menentukan penerimaan atau penolakan pengaruh globalisasi dan penerapan iptek.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung konsep dasar mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika manusia dapat menyelaraskan kemajuan lahir batin.

2. Pentingnya globalisasi

Globalisasi terjadi akibat makin meningkatnya perkembangan kebutuhan manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan ditemukannya alat transformasi seperti kereta api, pesawat terbang, mesin cetak, kompas, listrik, mesin uap, radio, telepon, dan sebagainya mempermudah kerja manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Berkembangnya kemajuan teknologi dan industri sampai sekarang ini, makin memudahkan manusia mengadakan komunikasi. Dengan ditemukan alat komunikasi manusia dalam berinteraksi tidak mengenal batas waktu maupun negara. Misalnya kita dapat bercakap-cakap dengan orang di belahan dunia manapun, tanpa pergi jauh-jauh mendatangi negaranya.

Ada beberapa ciri yang menandakan fenomena globalisasi di dunia yaitu:

- a. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan kemajuan teknologi dan industri telah menghasilkan barang-barang seperti HP, TV, satelit, internet dan sebagainya menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepat sehingga mempermudah manusia dalam berkomunikasi dan menikmati hiburan maupun informasi.



- b. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Hal ini akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional.
- c. Peningkatan interaksi budaya melalui media informasi dan komunikasi seperti televisi, film, musik, internet, dan olah raga internasional.
- d. Timbulnya masalah-masalah bersama yang muncul, misalnya masalah lingkungan hidup, krisis ekonomi, inflasi, terorisme, kemiskinan, dan sebagainya.

Dalam era globalisasi akan mempengaruhi bidang-bidang kehidupan manusia seperti bidang ekonomi munculnya perusahaan multinasional (perusahaan yang berdiri di banyak negara). Pada bidang budaya munculnya berbagai peralatan teknologi seperti televisi, radio, internet yang dengan mudah mengakses informasi di berbagai belahan dunia. Bidang teknologi mengakibatkan mobilitas masyarakat dunia semakin besar dengan pergi ke luar negeri dengan mudah atau berbicara dengan berbagai orang di belahan dunia dengan mudah.

Bidang makananpun juga dipengaruhi adanya globalisasi, ini dapat disaksikan dari banyaknya rumah makan atau restoran menyajikan makanan asing khas negara-negara asing. Di kota-kota besar Indonesia dapat ditemukan restoran-restoran dari berbagai negara. Misalnya restoran Italia menyediakan makanan khas Italia seperti pizza dan spageti; restoran McDonald's dan KFC menyediakan makanan khas Amerika Serikat seperti *burger*, *milkshake* (minuman dari susu), *fried chicken* (ayam goreng), *french fries* (kentang goreng), dan *ice cream*.

Bidang politik mempengaruhi kesadaran berdemokrasi bagi warga masyarakat. Selain timbulnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi, politik dalam era globalisasi juga melunturkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong sehingga makin kuatnya semangat individual, kelompok, oposisi, dan diktator. Keterbukaan, tanggung jawab dan profesionalisme dalam penyelenggaraan negara semakin mendapat kritisi dari masyarakat.





Kegiatan Siswa

Opini

1. Hampir setiap hari Dewi menonton film atau sinetron di televisi. Tanpa disadari perilaku yang ditampilkan oleh pemeran sinetron diikuti. Setiap hari pergi sekolah menggunakan asesoris dan mengenakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah seperti berpakaian selalu ketat, tidak mau memasukkan baju. Suatu hari Doni menegurnya. Tetapi teguran itu dianggap angin lalu saja. Dewi berpikir tidak ada yang salah pada dirinya. Ia hanya mengikuti perkembangan mode sekarang. Berikan tanggapan kalian pada permasalahan tersebut. Tulislah hasilnya pada kertas tersendiri!
2. Bondan matanya merah dan badannya kelihatan lemah sebab semalaman kurang tidur. Karena kurang tidur Bondan waktu pelajaran Pak Sono tertidur. Bondan ditegur oleh Pak Sono “mengapa matamu merah dan badanmu lemah begitu?”. Bondan kemudian menceritakan kepada Pak Sono bahwa semalaman tidak tidur samapi jam 4 pagi karena menyaksikan pertandingan sepak bola liga Inggris. Berikan tanggapan kalian pada permasalahan tersebut. Tulislah hasilnya pada kertas tersendiri!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Apa yang dimaksud globalisasi itu?
2. Bagaimana globalisasi terjadi?
3. Sebutkan contoh bentuk globalisasi!
4. Sebutkan pentingnya globalisasi!
5. Sebutkan bidang yang dipengaruhi globalisasi!





B. Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional di Era Globalisasi

Hubungan luar negeri diarahkan pada upaya untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasional, turut serta mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan semangat Dasasila Bandung.

Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri dan memantapkan pemahaman tentang Wawasan Nusantara.

Hubungan luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antarnegara berkembang dan antarnegara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Dalam politik luar negeri ini citra positif Indonesia harus dikembangkan, ditingkatkan, dan diperluas melalui promosi, peningkatan hasil pembangunan, peningkatan diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa serta kegiatan olah raga.



*Gambar 3.2: KTT I ASEAN diselenggarakan di Bali pada 23–24 Februari 1976
Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerja sama antarbangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan terutama untuk meningkatkan investasi, memperluas ekspor barang dan jasa, menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi, mempromosikan tujuan daerah wisata dan memberikan bantuan kemanusiaan di luar negeri.

Perjuangan bangsa Indonesia di dunia internasional yang menyangkut kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri perlu ditingkatkan.

Peran aktif Indonesia terus ditingkatkan dalam mendorong dan mengembangkan hubungan dan kerja sama antarkawasan dan antarnegara. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia harus



diikuti dan dikaji secara saksama agar secara dini dapat memperkirakan terjadinya dampak negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta menghambat kelancaran pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional.

Ketimpangan dan ketidakadilan negara industri maju perlu diperkecil dengan meningkatkan pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional, menghilangkan hambatan-hambatan dalam upaya ekspor negara-negara berkembang sehingga terjadi kesetaraan antara negara industri maju dengan negara-negara berkembang.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus memantapkan diri dalam menghadapi sistem perdagangan bebas yang telah disepakati di tingkat regional, dan global dalam rangka mewujudkan tata ekonomi dunia baru.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial perlu penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap serta kerja sama internasional dengan memanfaatkan forum regional maupun global.

Peran aktif Indonesia dalam pelucutan senjata khususnya senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia terus ditingkatkan Hal ini merupakan amanat politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik bebas aktif artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dan nasibnya sendiri yang berkaitan dengan mewujudkan tujuan nasional dan hubungan internasional. Dalam politik luar negeri bebas aktif bangsa Indonesia harus ikut serta menciptakan perdamaian dunia, hal tersebut ditegaskan dalam tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu ikut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam melaksanakan politik luar negeri harus perpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945.

Adapun tujuan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif antara lain:





Info
Kewarganegaraan

Asal Usul PBB

PBB sebutan yang diciptakan oleh mendiang Presiden Franklin D. Roosevelt tanggal 1 Januari 1942. Piagam PBB disusun oleh 50 negara pada konferensi mengenai organisasi internasional di San Francisco tanggal 25 April – 26 Juni 1945. Para wakil bekerja atas usul yang dirumuskan oleh wakil-wakil Tiongkok, Uni Sovyet, Inggris, dan Amerika Serikat di Dumberton Oaks.

PBB secara resmi berdiri tanggal 24 Oktober 1945 pada saat piagam telah diratifikasi oleh Tiongkok, Prancis, Inggris, Uni Sovyet, dan Amerika Serikat.

Markas besar PBB didirikan di atas tanah yang disumbangkan oleh jutawan John D. Rockefeller Jr. terletak di tepi East River dan tanah tambahan dari New York City.

1. Membentuk satu masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diperolehnya.
3. Membina persahabatan dan persaudaraan antarnegara di dunia dengan prinsip saling menghormati.
4. Menciptakan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
5. Menjalani kerja sama dengan negara-negara di dunia dalam upaya mengembangkan dan membangun bangsa dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan.

Dalam percaturan internasional peranan politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus dimaksimalkan sebab merupakan salah satu sarana mewujudkan kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa. Sehubungan hal tersebut pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dilandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila. Artinya bahwa pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dalam percaturan internasional tampak pada peran Indonesia sebagai:

1. Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Indonesia masuk anggota PBB tanggal 28 September 1950 yang tercatat menjadi anggota ke-60. Tetapi Indonesia pernah keluar dari anggota PBB. Pada tanggal 28 Desember 1966 secara resmi Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Masuknya kembali Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh sejumlah negara terutama dari Asia.

Di PBB inilah bangsa Indonesia memperjuangkan negara-negara yang belum merdeka dan aktif ikut serta menciptakan perdamaian dunia dengan dikirimnya pasukan perdamaian PBB dari Indonesia seperti Pasukan Garuda untuk perdamaian Kamboja, Timur Tengah, dan sebagainya.



Adapun tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional/dunia.
- b. Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antarbangsa.
- c. Bekerja sama secara internasional untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan, dan untuk memajukan rasa hormat untuk hak-hak manusia dan kemerdekaan-kemerdekaan asasi.
- d. Untuk menjadi pusat bagi persesuaian tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha mencapai tujuan bersama.



*Gambar 3.3: Pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi Libanon tanggal 30 Juli 2006
Sumber: Sindo, 1 Agustus 2006*

Setelah Perang Dunia II banyak negara Asia Afrika yang merdeka seperti Indonesia, Libia, Burma, Srilanka, Vietnam, Pakistan, India, dan Filipina. Tetapi masih banyak juga yang belum merdeka. Bangsa Asia Afrika masa lalunya sangat menderita karena penjajahan bangsa lain.

Banyak negara-negara Asia Afrika yang berpandangan sama atas situasi dunia saat itu. Terasa betul adanya “perang dingin” antara Amerika Serikat dengan Uni Sovyet. Bangsa-bangsa Asia Afrika memandang bahwa “perang dingin” itu sebagai ancaman bagi perdamaian dunia, maka pada bulan Desember 1954 tercapai kesepakatan antara lima negara Asia untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang



dilaksanakan pada tanggal 18–25 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Pemrakarsa KAA adalah Indonesia diwakili oleh PM Mr. Ali Sastroamijoyo; India diwakili oleh PM Jawaharlal Nehru; PM Pakistan oleh Mohammad Ali; PM Srilanka Sir John Kotelawala, dan PM Burma oleh U Nu.

Tujuan diadakan KAA antara lain:

- a. Memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia Afrika dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.
- b. Memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme.
- c. Memperbesar peranan Asia Afrika di dunia dalam mengusahakan perdamaian dunia.



*Gambar 3.4: Sidang KAA
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Konferensi Asia Afrika menghasilkan dokumen bersejarah dengan nama Dadasila Bandung yang berisi prinsip-prinsip hubungan internasional dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia. Prinsip-prinsip itu adalah:

- a. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.
- b. Menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa
- c. Mengakui persamaan ras dan persamaan bangsa, baik besar maupun kecil.
- d. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.



- e. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB.
- f. 1) Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar.
2) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
- g. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
- h. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, Arbitase atau penyelesaian hukum atau cara damai lain-lain lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan Piagam PBB.
- i. Memajukan kepentingan bersama dan bekerja sama.
- j. Menghormati hukum dan kewajiban internasional.

Dengan hasil keputusan dan prinsip-prinsip Konferensi Asia Afrika telah mempengaruhi situasi politik dunia saat itu antara lain:

- a. Ketegangan dunia semakin berkurang.
- b. Perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika demi kemerdekaannya semakin meningkat.
- c. Australia dan Amerika Serikat mulai berusaha menghapuskan rasdiskrimasi di negaranya.
- d. Politik bebas aktif yang dijalankan oleh Indonesia, India, Burma, dan Srilanka mulai diikuti oleh negara-negara lain yang tidak termasuk Blok Barat dan Blok Timur.
- e. Belanda kesulitan dalam menghadapi negara-negara Asia Afrika di PBB sebab dalam Sidang Umum PBB, negara Asia Afrika mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat.
- f. Diselenggarakan konferensi-konferensi berbagai golongan masyarakat Asia Afrika, antara lain 1) Konferensi Ahli Hukum Asia Afrika di Tokyo tahun 1961; 2) Konferensi Pengarang Asia Afrika di Kolombo tahun 1962; 3) Konferensi Wartawan Asia Afrika di Jakarta tahun 1963 dan 4) Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung tahun 1965.



2. Peran Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Nonblok

Gerakan Nonblok adalah organisasi negara-negara yang tidak masuk Blok Barat dan Blok Timur. Gerakan Nonblok disebut juga *nonaligned* yang artinya tidak memihak. Gerakan negara-negara nonblok lahir sekitar tahun 1960-an, ketika politik dunia dikuasai oleh Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dengan menganut liberalisme dalam pengaruh Amerika Serikat dan Blok Timur yang menganut komunisme dalam pengaruh Uni Sovyet. Dua kubu yaitu Blok Barat dan Timur saling berebut pengaruh sehingga timbul ketegangan antara kedua kekuatan tersebut sehingga terjadilah perang dingin antara dua kekuatan tersebut. Ketegangan yang makin memuncak mendorong terbentuknya Gerakan Nonblok.



*Gambar 3.5: Peran Indonesia dalam KTT Nonblok
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Lahirnya Gerakan Nonblok dilatarbelakangi oleh:

- a. Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang mengancam perdamaian dunia.
- b. Timbulnya solidaritas negara-negara Asia Afrika setelah adanya Konferensi Asia Afrika dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia.

Adapun prinsip Gerakan Nonblok adalah sebagai berikut:

- a. Tidak berpihak terhadap persaingan Blok Barat dan Blok Timur.

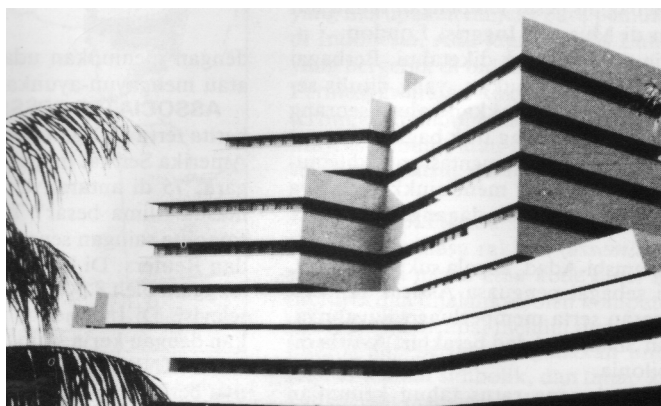


- b. Berpihak kepada perjuangan antikolonialisme.
- c. Menolak ikut serta berbagai bentuk aliansi militer.
- d. Menolak ikut serta aliansi bilateral dengan negara adikuasa.
- e. Menolak pendirian basis militer negara adikuasa di wilayah masing-masing.

Konferensi tingkat tinggi pertama Gerakan Nonblok di Beograd, Yugoslavia. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT Nonblok yang ke-10 di Jakarta yang berlangsung tanggal 1 sampai dengan 6 September 1992 yang dihadiri oleh 108 negara. Indonesia juga termasuk salah satu penggagas berdirinya Gerakan Nonblok. Tokoh penggagas Gerakan Nonblok lainnya adalah Presiden Josep Broz Tito dari Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Perdana Menteri Panditt Jawaharial Nehru dari India, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana.

Kegiatan-kegiatan Gerakan Nonblok meliputi bidang ekonomi dan politik.

3. Peran Indonesia dalam ASEAN (Association of South East Asia Nation)



*Gambar 3.6: Gedung ASEAN
Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia*

Indonesia juga aktif dalam kerja sama regional ASEAN yaitu organisasi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN sekarang beranggotakan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia,



Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pada awalnya ASEAN didirikan oleh 5 negara di Kawasan Asia Tenggara. Tokoh pendiri ASEAN itu adalah Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia), Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri Malaysia), S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura), Narisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina), dan Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand).

ASEAN dibentuk dalam upaya menggalang kerja sama bidang ekonomi dan sosial budaya di Kawasan Asia Tenggara.

Tujuan dibentuknya ASEAN antara lain:

- a. Mempererat kemajuan ekonomi dan sosial budaya di Kawasan Asia Tenggara.
- b. Meningkatkan kerja sama antarbangsa untuk saling membantu satu sama lain, mengatasi masalah bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta pengetahuan dan teknologi.
- c. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib hukum di Kawasan Asia Tenggara.
- d. Bekerja sama dalam upaya meningkatkan pendayagunaan pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana distribusi dan komunikasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat.



Secara formal, sejumlah negara di dunia bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO/World Trade Organization) yang memudahkannya perdagangan antar-negara.

4. Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)

APEC merupakan forum kerja sama bidang ekonomi antarnegara-negara di Kawasan Asia dan Pasifik. APEC dibentuk di Canberra, Australia pada bulan Desember 1989. Indonesia sebagai anggota juga berperan aktif. Hal ini terbukti pada saat pertemuan di Seattle, Indonesia ditunjuk menjadi ketua periode 1994–1995.

Indonesia telah menunjukkan keberhasilannya dalam penyelenggaraan pertemuan APEC di Bogor pada tanggal 14–15 November 1994. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 18 negara anggota APEC. Indonesia mempunyai peranan penting dalam organisasi ini dalam upaya menjalin kerja sama



antarbangsa dalam bidang ekonomi dan berupaya menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia ini dilandasi oleh politik luar negeri bebas aktif yang sejai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

5. AFTA

AFTA merupakan bentuk pasar bebas negara-negara ASEAN. Dalam pasar bebas setiap negara mau tidak mau harus menerima produk dari negara-negara kelompok ASEAN dan harus menerima persaingan tenaga kerja. Maka kita tidak boleh heran apabila orang jualan sate saja, bakso saja, soto saja mungkin berasal dari negara lain. Maka khusus bangsa Indonesia harus meningkatkan kualitas produksi, perdagangan, pelayanan jasa maupun meningkatkan sumber daya manusianya, agar nantinya kita dapat bersaing dalam era pasar bebas.



Gambar 3.7:
Pertemuan AFTA ke-13 di Singapura
Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*



Kegiatan Siswa

Bacalah dengan saksama permasalahan di bawah ini kemudian diskusikan permasalahan tersebut dengan kelompok belajar kalian dan hasil diskusi setelah dipresentasikan dikumpulkan kepada guru kalian untuk dinilai!

Mau Gaul? Ya Bergaulah yang Benar

Kata siapa gaul itu harus ngerti musik, olahraga, film, dan fashion? Kata siapa gaul itu suka nongkrong sama teman-teman remaja di mall, bioskop, kafe, atau tempat nongkrong lainnya? Mungkin betul tapi itu sih versi orang lain, versi MTV kali? Yang benar, kalo kita mau gaul, yah bergaul ... he he he.

Banyak lho tempat agar kita bisa gaul. Namun kita perlu hati-hati, kita boleh gaul asal kita masih tetap dalam koridor agama. Karena pengen gaul sehingga ada remaja putri yang berpakaian buka-bukaan dan remaja putra berpakaian yang “disliwir-sliwir” atau pakaiannya disobek-sobek. Intinya bergaul melakukan kegiatan yang positif. Masalah yang harus diskusikan:



1. Apakah kegiatan yang positif itu?
2. Beri contoh kegiatan positif yang dilakukan siswa di sekolah dan masyarakat tempat tinggal kalian!
3. Apakah kegiatan negatif itu?
4. Beri contoh kegiatan negatif yang dilakukan kaum remaja baik sebagai siswa maupun sebagai anggota masyarakat!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Sebutkan politik luar negeri kita dan beri artinya!
2. Apakah tujuan kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia?
3. Sebutkan kerja sama internasional yang diikuti oleh Indonesia!
4. Sebutkan kerja sama regional dan Indonesia berperan di dalamnya!
5. Sebutkan peran serta Indonesia dalam hubungan internasional!



C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Kita makin meyakini bahwa globalisasi dan kemajuan iptek akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dampak positif globalisasi dan kemajuan iptek antara lain masyarakat semakin mudah mendapat informasi baik informasi kehidupan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan globalisasi dan kemajuan iptek, masyarakat semakin luas wawasannya sehingga mendorong untuk menanggapi berbagai persoalan kemasyarakatan seperti demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan, gender, lingkungan hidup dan berbagai nilai-nilai universal. Selain contoh pengaruh positif globalisasi tersebut masih ada pengaruh positif lainnya antara lain:



1. Bidang politik

Masyarakat semakin berani menggunakan hak politiknya secara bebas. Antara lain masyarakat berani berargumentasi dan mengkritisi pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya sehingga program pembangunan berjalan dengan baik.

2. Bidang ekonomi

Taraf hidup dan pendapatan per kapita makin meningkat, tersedianya lapangan kerja, meningkatnya sumber daya manusia, dan meningkatnya jumlah barang produksi dari industri.

3. Bidang sosial budaya

Bidang pendidikan para siswa telah banyak menggunakan komputer dan internet, bidang arsitektur, banyak bangunan bergaya Eropa dengan ornamen khasnya, bidang kesehatan berubahnya cara tradisonal menjadi cara-cara pengobatan modern, dan bidang mode mengkombinasikan mode tradisonal dengan budaya modern.

4. Bidang hukum

Pertahanan dan keamanan bidang hukum, makin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh penegak hukum, semakin menguatnya desakan masyarakat terhadap supremasi hukum; bidang keamanan dan ketertiban, semakin kuatnya kedudukan masyarakat sipil dengan memposisikan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban.

Selain dampak positif, globalisasi dan kemajuan iptek membawa dampak negatif dalam kehidupan manusia. Dampak negatif tersebut terlihat dengan munculnya beberapa paham antara lain:

1. Paham hedonisme

Paham ini melihat bahwa kesenangan atau kenikmatan menjadi tujuan hidup dan tindakan hidup manusia.

2. Paham materialisme

Paham ini selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi. Dengan demikian hubungan batiniah manusia tidak menjadi bahan pertimbangan dalam hubungan antarmanusia.



3. Paham sekulerisme

Paham ini mencerminkan kehidupan keduniawian.

4. Paham individualisme

Sikap yang mementingkan kepentingan sendiri.

5. Paham elitisme


Paham ini cenderung bergaya hidup berbeda dengan rakyat kebanyakan.

Sikap terbuka sekaligus waspada terhadap pengaruh globalisasi dan penerapan iptek amatlah penting. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang modern.

Masyarakat disebut modern, apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi apabila masyarakat mengalami peningkatan pendapatan atau produksi dalam kurun waktu tertentu atau dalam bahasa ekonomi, masyarakat mengalami pertumbuhan ekonomi. Apabila dilihat dari sudut pandang politik masyarakat disebut modern apabila tercipta integrasi politik yang kukuh yang diikuti partisipasi dalam proses politik oleh berbagai segmen dan lapisan masyarakat.

Menurut para ahli sosiologi yang dikatakan masyarakat modern adalah masyarakat yang telah mengalami diferensiasi sosial, yaitu proses semakin bertambahnya pembagian dan spesialisasi kerja serta mengalami peningkatan dalam intensitas hubungan antarsatuan sosial yang ada.

Dalam kondisi global saat ini pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan iptek. Karena pembangunan sangat memerlukan iptek mengingat era globalisasi menuntut dinamisasi ekonomi untuk bergerak serba cepat. Di lain pihak, hasil-hasil pembangunan akan memacu perkembangan iptek. Tetapi di sisi lain, pembangunan di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri yang kian kompleks telah mengubah tata nilai yang ada dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi selain menimbulkan dampak positif berupa peningkatan kemakmuran rakyat dan etos kerja yang disiplin, juga menimbulkan dampak negatif. Karena dengan kemajuan ekonomi akan mengubah pola hidup rakyat menjadi konsumtif atau budaya hidup mewah. Sehingga barang-barang yang dibeli bukan didasarkan kebutuhan tetapi hanya berdasarkan pada gengsi belaka.



Info
Kewarganegaraan

Banyak kalangan menilai bahwa globalisasi akan menimbulkan bentuk kolonialisme baru negara maju terhadap negara berkembang.



Perkembangan iptek khususnya bidang media komunikasi telah membuat dunia menjadi sempit tidak ada lagi batas ruang dan waktu antarnegara di dunia. Globalisasi telah menghilangkan batas-batas negara dan perbedaan antarbangsa. Pada era globalisasi tidak ada bagian dunia yang terisolir. Suatu peristiwa yang terjadi di belahan dunia secara cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Contoh peristiwa gempa di DIY dan Jawa Tengah, Sabtu, 27 Mei 2006 yang meratakan ribuan rumah dan lebih dari 6.000 ribu jiwa meninggal dengan hitungan detik sudah tersiar ke seluruh dunia.

Kita menganut paham menghormati bangsa-bangsa lain dan membina solidaritas antarbangsa. Kita ingin ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam pergaulan antarbangsa yang di dalamnya terdapat era teknologi komunikasi modern, begitu banyak paham dan nilai yang masuk ke dalam masyarakat kita.



*Gambar 3.8: Penghancuran miras oleh Kepolisian
Sumber: Solo Pos, 23 September 2006*

Benturan, pergeseran, dan penggoyahan nilai-nilai khas bangsa dan nilai-nilai yang ingin dikembangkan berdasarkan budaya Pancasila, tidak dapat dihindari. Oleh karena itu perlu diusahakan pembinaan dan pemantapan masyarakat kita di dalam nilai-nilai yang kita anggap sesuai. Apabila masyarakat dibina untuk tidak bersifat fanatisme dan kepicikan, maka daya tahan dan daya tangkal masyarakat akan mampu menahan benturan dan pergeseran.



Kesimpangsiuran norma sopan santun umum, kebebasan seks, komersialisasi seks, pola hidup mewah, individualisme, liberalisme anarkistik, otonomi pribadi dan bebas nilai banyak melanda masyarakat modern. Masyarakat modern yang bertumpu pada iptek, sering berpikir dengan pola empirisme. Empirisme dapat mengakibatkan agnostisisme, materialisme, dan ateisme. Mentalitas empirik lebih senang menganut paham pragmatisme dan utilitarisme. Pemikiran-pemikiran metafisik transedental karena ditolak dianggap tidak relevan dan membuang-buang waktu.

Globalisasi merupakan suatu proses atau bentuk di mana kelompok-kelompok masyarakat dari seluruh penjuru dunia saling mengenal, bekerja sama, berinteraksi sebagai masyarakat baru. Globalisasi dapat dilakukan dengan melewati batas-batas negara sehingga globalisasi memiliki dampak dalam kehidupan. Dampak itu dapat berupa positif maupun bersifat negatif. Dampak yang positif dapat berupa dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi; makin luasnya wawasan, pertukaran kebudayaan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mudahnya menerima informasi. Di samping dampak positif ada dampak negatif yang harus diwaspadai seperti terjadinya pergeseran budaya dan terjadinya dominasi dari yang kuat terhadap yang lemah.

Dalam pandangan Bapak Sutrisno mantan wakil presiden RI tahun 1993–1998 kondisi bangsa yang terpuruk ini disebabkan komponen bangsa cenderung melupakan landasan dan tumpuan berpijak. Landasan dan pijakan bangsa Indonesia tidak lain adalah Pancasila. Jadi Pancasila dalam era globalisasi ini harus dijadikan landasan berpijak bagi kehidupan bangsa Indonesia.

1. Dilupakannya Pancasila

Hampir sebagian besar komponen bangsa sudah melupakan Pancasila, padahal Pancasila merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara dan ideologi negara serta dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup bangsa



merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad bangsa itu untuk mewujudkan. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup, cita-cita moral dan kesadaran yang meliputi kejiwaan dan watak bangsa yang sudah berakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila suatu budaya yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika manusia dapat menyelaraskan kemajuan lahiriah dan rohaniah.

2. Ditinggalkannya wawasan nusantara

Wawasan nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang berarti cara pandang bangsa atas diri dan lingkungannya sebagai sebuah negara kepulauan yang disatukan oleh lautan dalam sebuah kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

3. Diabaikannya ketahanan nasional

Hakikat ketahanan nasional berisi kondisi dinamis bangsa serta keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan nasional guna menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang membahayakan dan mengancam integritas, identitas, ekonomi bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

4. Diremehkannya kewaspadaan nasional

Derasnya arus globalisasi tidak hanya membawa serta muatan nilai globalisasi, liberalisme, materialisme, kapitalisme dan hedonisme, namun juga aksi-aksi subversi yang kini telah berubah pola dan demensinya berkembang menjadi perang modern multidimensi yang ditujukan kepada negara-negara berkembang yang berpotensi konflik.

5. Dirombaknya secara draktis sistem politik nasional

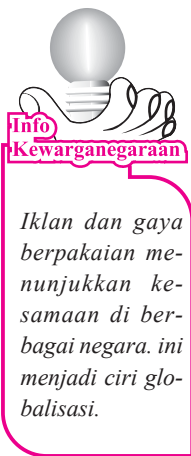
Perombakan sistem politik atau sistem apapun ke arah yang lebih baik memang diperlukan bahkan keharusan. Tetapi,



perombakan yang dilakukan secara habis-habisan sampai kebablasan dan dilaksanakan secara draktis dalam waktu demikian singkat tentu memberikan dampak yang kurang kondusif dalam sistem kehidupan nasional.

6. Tercabik-cabiknya persatuan dan kesatuan nasional

Dengan semakin berkembangnya fanatisme kepentingan individu dan kelompok-kelompok primordialisme sempit, maka persatuan dan nasional yang telah dengan susah payah dirajut para pendahulu bangsa kini tercabik-cabik. Fanatisme primordial sempit keluar dari bingkai persatuan dan kesatuan nasional dengan latar belakang kepentingan berdasarkan suku, daerah, agama, sekte, aliran, ras, keturunan, partai, organisasi massa, kampung, bidang profesi atau latar belakang pendidikan, telah mencederai persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia.



7. Diliberalisasikannya sistem ekonomi nasional

Sistem ekonomi nasional yang bertumpu pada sistem kapitalisme dan liberalisme belum mampu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat kecil. Etika bisnis dan efisiensi dikalangan dunia usaha belum bisa terwujud karena perilaku KKN, pungli, *mark up*, penggelapan pajak, suap-menyuap masih tumbuh subur dalam praktik kehidupan sehari-hari.

8. Dilepasnya sistem sosial budaya nasional

Kurangnya pembinaan dan pengendalian terhadap aspek sosial budaya nasional telah menyebabkan pintu terbuka lebar bagi derasnya pengaruh nilai-nilai asing yang tidak seluruhnya baik dan cocok bagi bangsa Indonesia. Gaya hidup materialistik, pemisif, hedonistik dan konsumtif, telah merusak dalam kehidupan generasi muda.

9. Dikesampingkannya sistem hankamrata

Eforia demokratisasi dan kebebasan yang kebablasan telah menerbitkan phobia, rasa kebencian, dan dendam tak beralasan, di kalangan para tokoh dan eleit politik tertentu. Akibatnya muncul konsepsi bahwa Angkatan Perang (TNI) harus



dipinggirkan, bahkan dilemahkan. Karena perasaan phobi dan benci terhadap Angkatan Perang (TNI). Atau bisa saja secara sadar atau tidak bangsa Indonesia menjadi bagian dari sasaran perang modernmultidemensi. Salah satu sasaran mereka adalah Angkatan Perang (TNI) yang merupakan tentara rakyat dengan doktrin pertahanan wilayah harus dipisahkan dari rakyatnya dan diputuskan dari wilayah (teritorial) yang dijaga dan dipertahankannya. Selanjutnya sistem hankamrata makin dikesampingkan, bahkan dituntut pembubaran Kodam, Korem, Kodim dan satuan Teritorial lainnya.

Sistem hankamrata merupakan konsepsi strategi pertahanan rakyat bersenjata sebagai sistem penyangga kekuatan Angkatan Perang yang terbatas kekuatannya.

10. Kurangnya perhatian dan kepedulian kepemimpinan nasional

Surutnya kebangsaan Indonesia merupakan dampak dari kurangnya perhatian dan kepedulian pemimpin nasional terhadap perkembangan kondisi kebangsaan Indonesia.



Kegiatan Siswa

Baca makalah pakar komputer berikut ini, kemudian silakan masing-masing siswa nantinya memberi tanggapan di depan kelas dengan mempresentasikan tanggapan tersebut!

Tanggapan harus ditulis dalam kertas kerja dan setelah dipresentasikan hasilnya diserahkan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk dinilai.

Pakar Komputer AS Kupas “Kecerdasan Buatan“

Pakar komputer dari Amerika Serikat (AS) Henri J Maramis, mengupas “kecerdasan buatan “memalui jaringan syaraf tiruan atau *Artificial Neural Network* (ANN) di kampus STIKOM Surabaya.



“Manusia bisa menirukan kecerdasan seperti yang ada pada otak, karena saat ini sudah banyak dikembangkan kecerdasan buatan di antaranya dengan ANN “, ujarnya dalam seminar bertajuk “ANN dan Aplikasi Kecerdasan Buatan “.

Menurut Maramis yang merupakan *Platform Development Engineering Intel Corporation AS* itu, kecerdasan buatan mirip otak manusia dalam sistem komputer adalah alat otomatisasi seperti yang diterapkan pada robot.

“Untuk menciptakan kecerdasan buatan itu bisa dilakukan pada *hardware* maupun *software*. Hal itu tergantung pada penerapan apa saja yang sedang dibutuhkan“, ungkapnya.

Sistem itu, katanya dapat mengenali dan mengidentifikasi objek berdasarkan ciri yang bisa dikenali atau ditebak seperti wajah seseorang mulai dari mata, hidung, *face* (muka), dan suara pada sinyal wicara.

“Proses kerja sistem itu hampir mendekati cara kerja sistem otak manusia ,“ ucapnya, sambil memberi contoh gambar pola sistem kerja otak manusia yang hampir sama dengan sistem kerja ANN.

Kesamaannya, katanya, terlihat ketika ada data atau objek muka cirinya akan dicari.

“Untuk mengetahui hal itu maka dibuatkanlah *training* dengan sistem *neural* yakni ANN dalam bentuk *mapping* pemaparan data ciri seseorang. Jadi, aplikasi jaringan syaraf tiruan ada pada pembuatan robot,” ucapnya.

Menanggapi paparan itu, Ketua Program Studi S-1 Sistem Komputer (SK) STIKOM Surabaya, Tjio Hok Hoo ST, ST MSc menilai pemanfaatan metode ANN itu sangat luas.

“Salah satu aplikasinya dapat diterapkan pada mata kuliah robot, karena itu saya berharap mahasiswa dapat menambah wawasan dengan mengikuti seminar tersebut,” tuturnya.

Dikutip dari *Sijori Mandiri (Batam)*,
Minggu, 27 Mei 2007.





Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Sebutkan dampak positif terhadap pengaruh globalisasi!
2. Sebutkan dampak negatif terhadap pengaruh globalisasi!
3. Jelaskan yang dimaksud masyarakat modern itu?
4. Sebutkan dampak positif dan negatif terhadap pembangunan ekonomi!
5. Jelaskan bahwa perkembangan bidang media komunikasi membuat dunia seakan-akan menjadi sempit!



D. Sikap terhadap Dampak Globalisasi

Telah kita ketahui bersama bahwa globalisasi ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antarnegara artinya antarnegara di dunia ini seolah-olah tidak memiliki batas geografis. Hal ini berdampak pada keberadaan suatu bangsa. Suatu bangsa akan kehilangan jati diri dan nilai-nilai budayanya. Maka dengan adanya globalisasi yang melanda dunia ini perlu kita sikapi. Misalnya menyikap masalah sosial akibat dampak globalisasi yaitu:

1. Sikap dalam menghadapi kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial adalah tingkat kehidupan masyarakat yang tidak sama, ada yang kaya ada yang miskin, ada yang dapat mengenyam pendidikan tinggi dan ada warga masyarakat tidak mampu bersekolah. Sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi hal ini antara lain pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan kerja baru, mengembangkan hidup bertoleransi, dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki.



2. Sikap dalam menghadapi kesenjangan ekonomi

Kesenjangan ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak merata. Dengan ini sikap yang harus dikembangkan untuk menghadapi hal itu antara lain meningkatkan semangat belajar, tidak menutup diri terhadap kemajuan ekonomi dunia, membangun ekonomi mandiri dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.



*Gambar 3.9: Berbagai jenis handphone
Sumber: Solo Pos, 26 September 2006*

3. Sikap dalam hal kebudayaan

Menghadapi dampak ini sikap terpenting bagi kita bangsa Indonesia adalah menyaring kebudayaan atau nilai-nilai asing yang masuk ke negara kita yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Maka perlunya memahami dan menghayati yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai agama dan Pancasila yang merupakan filter masuknya budaya dan nilai-nilai asing yang masuk. Di sini Pancasila mengandung prinsip hidup masyarakat Indonesia yang dapat membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Selain itu untuk memelihara kebudayaan kita dapat dilakukan dengan cara menggali dan memupuk nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kebudayaan daerah masyarakat tertentu, misalnya budaya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan bangga terhadap bangsa dan negara kita sendiri serta mengembangkan kebudayaan daerah yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat.



Untuk menghadapi dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Bidang politik

Berkaitan dengan upaya menghadapi tantangan globalisasi arah kebijakan bidang politik antara lain:

- a. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar-bangsa berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
- b. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.
- c. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.
- d. Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

2. Bidang ekonomi

Berkaitan dengan tantangan globalisasi kebijakan bidang ekonomi antara lain:

- a. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.



- b. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

3. Bidang agama

Berkaitan dengan upaya menghadapi tantangan globalisasi salah satu arah kebijakan bidang agama adalah “Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

4. Bidang pendidikan

Dalam era globalisasi arah kebijakan pendidikan salah satunya adalah “Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni”.

5. Bidang sosial budaya

Berkaitan dengan upaya menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan iptek, arah kebijakan bidang sosial budaya antara lain:

- a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk ke-percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
- b. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang



dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai.

- c. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya (narkoba) melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.



Tugas

Pada suatu hari, Dini dan kakaknya Beni berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan di kota Solo. Saat itu waktunya makan siang, mereka berdua pergi ke tempat makan yang tersedia di tempat perbelanjaan tersebut. Di tempat itu tersedia berbagai jenis makanan luar negeri seperti KFC, Mcdonald's, *fried chicken*, *burger pizza*, *milshake*, *french fries*, dan *ice cream*. Karena mereka ada yang belum pernah makan makanan yang tersedia tersebut, mereka lalu mememesannya. Setelah di makan mereka berkata "Makanannya enggak enak, ya?"

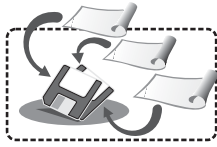
Dari hasil pengalaman tersebut, cobalah kalian memberi tanggapan!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Bagaimana kita menyikapi dampak globalisasi?
2. Sebutkan cara yang dapat kita lakukan terhadap dampak globalisasi!
3. Berikan contoh manfaat globalisasi terhadap kegiatan belajar di sekolah!
4. Sebutkan beberapa manfaat globalisasi bagi petani!
5. Apa pentingnya nilai-nilai Pancasila terhadap pengaruh globalisasi?





Rangkuman

Globalisasi adalah suatu proses masuknya segala sesuatu ke dalam ruang lingkup dunia sehingga antara negara di dunia seolah-olah tidak memiliki batas-batas. Globalisasi terjadi akibat dari perkembangan kebutuhan manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia.

Globalisasi telah mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, dan sosial budaya. Bentuk-bentuk globalisasi di sekitar kita dapat dilihat adanya gaya hidup, makanan, pakaian, komunikasi, transportasi, dan nilai-nilai. Globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif bagi seluruh manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa di dunia, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dalam menerapkan hubungan internasional. Peran Indonesia dalam hubungan internasional melalui organisasi internasional dan regional. Peran serta Indonesia dalam rangka menciptakan ketertiban dunia dengan mengirimkan pasukan perdamaian.

Globalisasi sangat mempengaruhi pola kehidupan kita. Pengaruh itu dapat berupa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh yang positif misalnya mudahnya menerima informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain pengaruh positif juga ada pengaruh negatif seperti bergesernya budaya, penggunaan narkoba, dan perilaku kekerasan dalam masyarakat.

Dengan adanya dampak tersebut diperlukan sikap waspada dan selalu berpegang teguh pada kepribadian bangsa. Untuk menanggulangi pengaruh negatif dari globalisasi, Pancasila harus betul-betul dijadikan landasan kehidupan bagi bangsa Indonesia.





Glosarium

dampak	= pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)
era	= kurun waktu dalam sejarah, sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah
informasi	= penerangan, keterangan atau pemberitahuan
internet	= jaringan komunikasi antarkomputer dengan penghubung kabel telepon atau satelit
internasional	= menyangkut bangsa-bangsa atau negeri-negeri seluruh dunia, antarbangsa
interaksi	= hal yang saling mempengaruhi
komunikasi	= pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami
negatif	= kurang baik atau menyimpang dari ukuran umum
politik	= segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain
positif	= bersifat nyata dan membangun, praktis, dan konstruktif
sikap	= perbuatan yang didasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan)





Tugas

Baca permasalahan berikut dengan saksama! Kemudian diskusikan permasalahan tersebut dengan kelompok belajar kalian! Hasil diskusi dipresentasikan lalu hasilnya dimasukkan dalam *file* pribadi kalian!

Globalisasi dan Tantangan Ideologi Pancasila

Dalam era globalisasi sekarang ini, Pancasila menghadapi berbagai pertarungan di antara ideologi besar seperti kapitalisme, liberalisme, hingga komunisme. Ideologi besar komunisme telah runtuh, tetapi sekarang pertarungan besar justru menghadapi ideologi kapitalisme dan liberalisme.

Harus diakui ideologi kapitalisme dan liberalisme telah menguasai banyak perilaku kehidupan umat manusia, termasuk di bumi Indonesia yang menganut Pancasila. Ideologi Pancasila bahkan tinggal dipelajarinya di sekolah-sekolah, tetapi alam pikiran dan perilaku bangsa kita sudah semakin jauh meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Ideologi Pancasila sudah tidak lagi menjadi pijakan ke mana sesungguhnya arah bangsa ini hendak dibangun. Inti pokok ideologi Pancasila ialah komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, namun komitmen tersebut juga tidak kunjung terwujud. Bahkan sistem perekonomian sudah jauh mengusung sistem kapitalisme dan liberalisme sementara tatanan sosial ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila sudah semakin pudar.

Ideologi Pancasila digali dari sendi-sendi kehidupan dan nurani rakyat, kemudian menjadi puncak pemikiran yang terdalam dan sekaligus suatu dokumen hidup yang terus-menerus dapat dipakai sebagai referensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kini sendi-sendi kehidupan dan nurani rakyat semakin liberal, apakah Pancasila masih menjadi ideologi bagi masa depan?



Pertanyaan semacam ini bukan tidak berdasar. Pancasila akan kehilangan roh dan esensinya jika tidak terus-menerus disegarkan. Selama ini, Pancasila menjadi ideologi bangsa yang tidak saja ditunjukkan oleh kemampuannya menyelamatkan bangsa Indonesia dari kemelut sejarah yang secara berturut-turut menimpa bangsa Indonesia. Tetapi juga sebagai suatu dokumen yang hidup, dinamis, terbuka, dan memiliki perspektif kemampuan dalam memecahkan persoalan dan kemampuan memberi petunjuk bagi perilaku sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

Potensi ancaman terhadap bangsa Indonesia tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Tantangan keindonesiaan semakin kompleks dengan berbagai rentetan peristiwa yang memilukan, seperti kekerasan antarpemeluk agama, penutupan tempat ibadah secara sepihak, hingga aksi kekerasan (terorisme) yang mengatasnamakan agama. Sementara itu, kekuatan liberal terus melakukan pengusuran dan pelanggaran HAM serta kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi besar. Bahkan tidak jarang, tindakan mereka seolah tidak ada yang bisa mengoreksi, karena kekuatan mereka seperti negara dalam negara.

Fenomena tersebut tentu saja menghentak kesadaran kita yang telah mengklaim sebagai negara Pancasila. Pada suatu sisi, ada problem mendasarkan yang belum terselesaikan menyangkut penghayatan terhadap kehidupan berbangsa yang terwujud dalam perilaku kehidupan sosial. Sementara, di sisi lain, muncul kekuatan mobilisasi yang sering kali menimbulkan konflik yang bisa mengancam keutuhan bangsa yang plural. Muncul konflik, kekerasan, dan reaksi destruktif yang tidak toleran merupakan justifikasi dari pemahaman kebangsaan yang keliru. Demikian pula, kebijakan negara yang bias dan tunduk pada pemilik kapital demi mengamankan investasi, tanpa dibarengi HAM dan lingkungan serta mengeliminasi ketimpangan, merupakan wujud dari pemahaman yang keliru tentang nilai-nilai Pancasila.

Globalisasi yang memunculkan sejumlah konflik, haruslah disikapi secara bijak sehingga perasaan keindonesiaan tetap tumbuh dalam kehidupan berbangsa. Kita memerlukan situasi yang kondusif agar perasaan keindonesiaan tetap kuat dalam masyarakat.



Perasaan keindonesiaan mengandaikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kehidupannya sesuai dengan cita-citanya tentang cara hidup bersama yang wajar, baik, dan adil.

Menyikapi kondisi ini, diperlukan sikap pemimpin nasional dan elite politik yang bisa memberikan respons secara sepihak dan mengayomi semua pihak untuk menjaga agar kehidupan berbangsa tetap kondusif. Bukan sebaliknya, sebuah respon yang justru berpotensi menyulut gerakan menjadi semakin membesar.

Perasaan keindonesiaan ini sangat penting untuk kita teguhkan karena konstruksi masyarakat kita sangat plural. Pluralitas ini adalah sebuah realitas, yang kemudian kebhinekaan dan kesatuan bangsa ini diteguhkan para *founding father* dalam konstitusi.

Komitmen luhur para *founding father* ini harus kita jaga dan terus kita lestarikan, sebab proses integrasi nasional pada suatu sisi terus berjalan, pada sisi lain juga memunculkan potensi-potensi yang disintegrasikan, bahkan sangat mungkin potensi konflik itu tak pernah akan hilang.

Daripada bereaksi apabila sudah ada ancaman, lebih tepat mengusahakan agar ancaman tersebut tidak sampai terjadi. Oleh sebab itu, perlu ditempuh upaya-upaya untuk mewujudkan rasa keindonesiaan melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai nasional (Pancasila) secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak kalah penting, meningkatkan integrasi elite dan pimpinan dengan rakyat melalui keteladanan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan penegakkan hukum untuk semakin mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa keadilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeahlian dan profesional serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Kondisi tersebut, meminta pertanggungjawaban supaya perumusan ideologi tidak terlepas dari kerangka permasalahan manusia Indonesia yang aktual. Membiarkan Pancasila semata-mata sebagai ideologi statis, dengan kekaburan makna dan kehilangan rujukannya yang praktis, tidak akan menjadikan Pancasila sebuah kekuatan sejarah.



Secara praktis, ideologi Pancasila harus terus-menerus disegarkan karena Pancasila adalah ideologi terbuka sehingga Pancasila dituntut mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Di sinilah makna Pancasila.

Di sini jugalah tanggung jawab penyelenggaraan negara untuk secara serius mewujudkan cita-cita tersebut. Penyelenggaraan negara harus melaksanakan nilai-nilai semangat ideologi Pancasila. Penegasan ini dimaksudkan agar Pancasila tidak semakin ditinggalkan. Artinya, nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh diimplementasikan dalam rumusan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Oleh Fahrudin Salim
Peneliti di Lembaga Pemerhati
Kebijakan Publik (LPKP) Kandidat
Doktor Unpad Bandung
Sindo, Senin 5 Juni 2006

Coba Diskusikan dengan kelompok belajar kalian tentang masalah berikut:

1. Dalam Era Globalisasi saat ini Pancasila mengalami tantangan besar. Coba Mengapa hal itu terjadi?
2. Mengapa di era globalisasi ini banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia?
3. Bagaimana menjawab tantangan yang muncul dari era globalisasi tersebut?
4. Globalisasi juga menimbulkan banyak konflik. Jelaskan!





Uji Pemahaman Konsep

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era globalisasi harus tertanam dalam perilaku sehari-hari bangsa Indonesia sebab Pancasila merupakan
 - a. jati diri dan kepribadian bangsa
 - b. sumber dari segala sumber hukum
 - c. alat pemersatu bangsa Indonesia
 - d. alat perjuangan bangsa Indonesia
2. Untuk menangkal pengaruh era globalisasi terhadap keutuhan bangsa dan negara diperlukan pemahaman Wawasan Nusantara sebab Wawasan Nusantara merupakan
 - a. pedoman penyatuan wilayah Nusantara dari ancaman negara lain
 - b. cara pandang bangsa atas diri dan lingkungannya sebagai sebuah negara kepulauan
 - c. penyatuan seluruh potensi kewilayahan yang membentang dari Sabang sampai Merauke
 - d. alat melindungi keutuhan wilayah yang meliputi segenap aspeknya
2. Globalisasi ekonomi dunia sangat mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia. Konsep sistem ekonomi Indonesia adalah
 - a. sistem liberalisme
 - b. sistem kapitalisme
 - c. sistem kerakyatan
 - d. sistem demokrasi
3. Lemahnya kewaspadaan nasional tak pelak semakin membuka peluang bagi masuknya
 - a. pengaruh asing yang merusak bangsa
 - b. kebudayaan asing yang merusak tatanan sosial



- c. aksi-aksi ancaman perang modern
 - d. alat-alat canggih ke Indonesia
4. Sistem hankamrata harus tetap dipertahankan untuk menghadapi era perang modern karena adanya pengaruh globalisasi sebab
- a. sistem hankamrata merupakan sistem pertahanan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk perang
 - b. sistem pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan lapisan masyarakat dan angkatan perang sebagai inti pertahanan
 - c. sistem pertahanan dan keamanan yang menggunakan alat-alat canggih untuk menghalau musuh yang datang dari luar negeri
 - d. sistem pertahanan dan keamanan yang melibatkan semua kekuatan TNI dan Polri dan rakyat sebagai pendukung
5. Dengan perubahan UUD 1945 akan berakibat
- a. rakyat mengalami kesulitan dalam memahami UUD 45
 - b. negara Indonesia akan menjadi negara yang demokratis
 - c. berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia secara drastis
 - d. jumlah bab dan pasal-pasalnya menjadi lebih banyak
6. Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pesatnya penggunaan freon berakibat
- a. sumber daya alam rusak
 - b. menipisnya lapisan ozon
 - c. bumi semakin panas
 - d. sumber daya manusia rendah
7. Dengan dampak globalisasi sistem pertahanan global diperlukan sikap
- a. komponen bangsa mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman yang datang
 - b. bangsa-bangsa dunia untuk menanggulangi potensi konflik antarbangsa yang pada kenyataannya mengakibatkan penderitaan rakyat



- c. masing-masing bangsa menahan diri untuk tidak menggunakan alat-alat canggih untuk menyerang negara lain
 - d. mengendalikan kondisi ketahanan negara dengan melibatkan seluruh unsur angkatan perang dan keamanan rakyat
8. Terjadinya sikap fanatisme kepentingan individu atau kelompok maupun daerah karena berkembangnya sikap
- a. liberalisme sempit
 - b. primordialisme sempit
 - c. fanatisme sempit
 - d. eksklusif sempit
9. Etika bisnis di kalangan dunia usaha belum terwujud karena adanya, *kecuali*
- a. perilaku KKN
 - b. penggelapan pajak
 - c. suap-menyuap
 - d. izin usaha satu pintu
10. Demokratisasi dan kebebasan yang kebablasan telah memunculkan
- a. fobia, rasa kebencian, dan dendam tak beralasan di kalangan elite politik tertentu
 - b. pandangan mengenai demokrasi yang harus dikembangkan dalam era global
 - c. perilaku tokoh dan elite politik untuk mengejar kekuasaan dengan mengabaikan etika politik
 - d. etika politik yang dibangun sudah mengarah pada sistem demokrasi kita
11. Meskipun era globalisasi melanda Indonesia, bagi kita bangsa Indonesia, tatanan masyarakat modern harus tetap tumbuh, bertambah kukuh dan berkembang di atas
- a. kebebasan bangsa
 - b. kehidupan demokrasi
 - c. kepribadian bangsa sendiri
 - d. kekuatannya sendiri



12. Masyarakat lemah terhadap kepribadiannya tidak mungkin dapat membangun untuk mewujudkan
- kebahagiaan hidupnya
 - cita-cita hidupnya
 - harapan hidupnya
 - kehendak hidupnya
13. Pembangunan bagi bangsa Indonesia merupakan perubahan dan pembaharuan. Untuk itu, yang perlu diingat dalam melaksanakan pembangunan adalah
- modal dasar pembangunan
 - landasan pembangunan
 - tujuan pembangunan
 - arah kebijakan pembangunan
14. Yang menjadi permasalahan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah
- rendahnya serapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - rendahnya serapan tenaga kerja dalam usia kerja
 - kurikulum yang sering berganti-ganti setiap saat
 - lemahnya sarana dan prasarana pendidikan
15. Ketidaknyamanan investor tinggal di Indonesia disebabkan
- rendahnya sumber daya manusia
 - kurangnya penguasaan teknologi
 - ketatnya perizinan berusaha
 - faktor keamanan dan ketertiban
16. Lunturnya jiwa kebangsaan saat ini disebabkan adanya
- pemahaman wawasan kebangsaan yang sempit
 - pengaruh budaya yang datang dari luar negeri
 - jauhnya sikap merasa memiliki dan menjaga
 - kurangnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan
17. Meskipun negara kita terdiri dari aneka ragam baik budaya, agama, suku bangsa, bahasa, maupun adat istiadat, konsep negara yang dianut bangsa Indonesia adalah
- Negara Indonesia yang bersatu
 - Negara kebangsaan Indonesia
 - Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Negara yang berkedaulatan rakyat



18. Landasan bangsa Indonesia atas kepluralitasnya yang ada dalam masyarakat kita adalah
- UUD 1945
 - Pancasila
 - undang-undang
 - norma-norma
19. Pancasila menkristalisasikan seluruh nilai sosiokultural yang bersifat
- mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang telah diyakini kebenarannya
 - teoritis yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara untuk dijadikan landasan
 - fundamental ke dalam nilai-nilai luhur yang dikandungnya dengan berpijak pada fakta sejarah bangsa Indonesia
 - universal sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dihayati dan diamalkan
20. Ada prinsip dasar yang perlu digaribawahi dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia yaitu
- keinginan untuk merdeka
 - keinginan untuk bersatu
 - kemampuan berjuang
 - kekuatan hidup mandiri
21. Abad globalisasi semakin diwarnai dengan persaingan antarbangsa dalam upaya mewujudkan
- tujuan negara yang tercantum dalam preambuli
 - kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya masing-masing
 - ambisinya untuk menguasai dunia dalam ekonominya
 - kekuatannya dalam menyerang negara lain yang lemah
22. Kita bangsa Indonesia sepatutnya memiliki rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab
- dianugerahi aneka ragam kelimpahan rahmat dan karunia-Nya
 - memiliki penduduk yang sangat besar jumlahnya
 - memiliki banyak pulau besar dan kecil yang sangat luas
 - dikelilingi oleh laut yang luas sehingga kekayaan lautnya besar



23. Sikap dan gaya hidup global telah merambah hingga jauh ke pelosok-pelosok wilayah Nusantara. Hal ini disebabkan oleh
- kemakmuran seluruh rakyat Indonesia
 - keberhasilan pembangunan nasional
 - arus informasi dan teknologi canggih
 - akibat tingkat pengendalian diri lemah
24. Adanya pergeseran nilai tradisional dengan nilai-nilai global, komponen bangsa dituntut seperti berikut ini, *kecuali*
- meningkatkan kemampuannya dalam menerima globalisasi
 - dapat mengolah masuknya pengaruh globalisasi
 - mendayagunakan informasi dan teknologi untuk kesejahteraan
 - dapat menguasai perekonomian liberal yang saat ini berkembang
25. Untuk menanggulangi pengaruh era globalisasi bangsa Indonesia dituntut untuk
- mengembangkan kemajuan secara bebas
 - memiliki ketahanan budaya yang kuat
 - mengembangkan budaya tradisional
 - menghadapi pengaruh globalisasi
26. Seiring dengan arus globalisasi, budaya masyarakat semakin maju yang ditandai dengan semakin
- mudahnya hubungan komunikasi dan interaksi antarbangsa
 - tumbuhnya gaya hidup mewah dan berfoya-foya
 - berkembangnya sikap kritis sebagian besar rakyat Indonesia
 - mudahnya masyarakat menggunakan produk luar negeri
27. Dengan melihat berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang sangat diperlukan adalah
- kelimpahan modal pembangunan
 - kekayaan alam yang memadai
 - tersedianya SDM yang berkualitas
 - tersedianya lapangan pekerjaan



28. Kriteria manusia Indonesia yang berkualitas antara lain
 - a. memiliki kemampuan mengembangkan teknologi
 - b. menghindari pengaruh globalisasi dalam hidupnya
 - c. menjauhkan diri dari perilaku yang merugikan negara
 - d. memiliki wawasan kebangsaan dan semangat nasionalis
29. Guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dilakukan melalui
 - a. lingkungan
 - b. pendidikan
 - c. pembangunan
 - d. kesehatan
30. Banyaknya penggunaan narkoba dan miras di lingkungan masyarakat merupakan akibat dari
 - a. banyak pengangguran
 - b. adanya pengaruh globalisasi
 - c. kesulitan mencari pekerjaan
 - d. tuntutan ekonomi keluarga

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Kemajuan luar biasa di bidang komunikasi dan trans-portasi menjadikan dunia bagaikan sebuah desa. Hal ini disebut
2. Yang sangat diperlukan dalam menghadapi dampak negatif globalisasi dan kemajuan iptek adalah
3. Pancasila merupakan norma dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu Pancasila harus menjadi
4. Dampak positif adanya globalisasi dan kemajuan iptek antara lain
5. Masyarakat modern adalah masyarakat yang
6. Masyarakat yang tertib, saling menghormati, saling menolong, demokratis, dan mandiri disebut masyarakat
7. Dalam menuju masyarakat Indonesia yang modern dan manusiawi, diperlukan peningkatan mutu generasi muda terutama dalam hal



8. Keberhasilan pembangunan nasional harus dinilai berdasarkan manfaat dan pengaruhnya terhadap
9. Dalam era globalisasi diperlukan sikap
10. Era globalisasi selain membawa berbagai peluang bagi peningkatan kesejahteraan bangsa juga menimbulkan

III . Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan kriteria sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas!
2. Sebutkan alasan bangsa Indonesia harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa!
3. Sebutkan dampak positif era globalisasi terhadap bangsa Indonesia!
4. Sebutkan landasan untuk menghadapi masuknya pengaruh globalisasi dunia sekarang ini!
5. Sebutkan nilai-nilai Pancasila yang luhur untuk menyaring masuknya pengaruh globalisasi!
6. Sebutkan pengaruh negatif era globalisasi terhadap kehidupan generasi muda!
7. Sebutkan faktor belum siapnya Indonesia menerima era globalisasi!
8. Sebutkan faktor penyebab surutnya kadar kebangsaan bagi bangsa Indonesia!
9. Sebutkan dua faktor yang menjadi landasan pembentukan konsep Negara Kesatuan RI!
10. Apa yang dimaksud memiliki ketahanan diri yang kuat dalam menghadapi pengaruh globalisasi?





Bab 4

Prestasi Diri



Sumber: Solo Pos, 10 November 2006

Pada bab prestasi diri ini akan dipelajari hal-hal sebagai berikut:

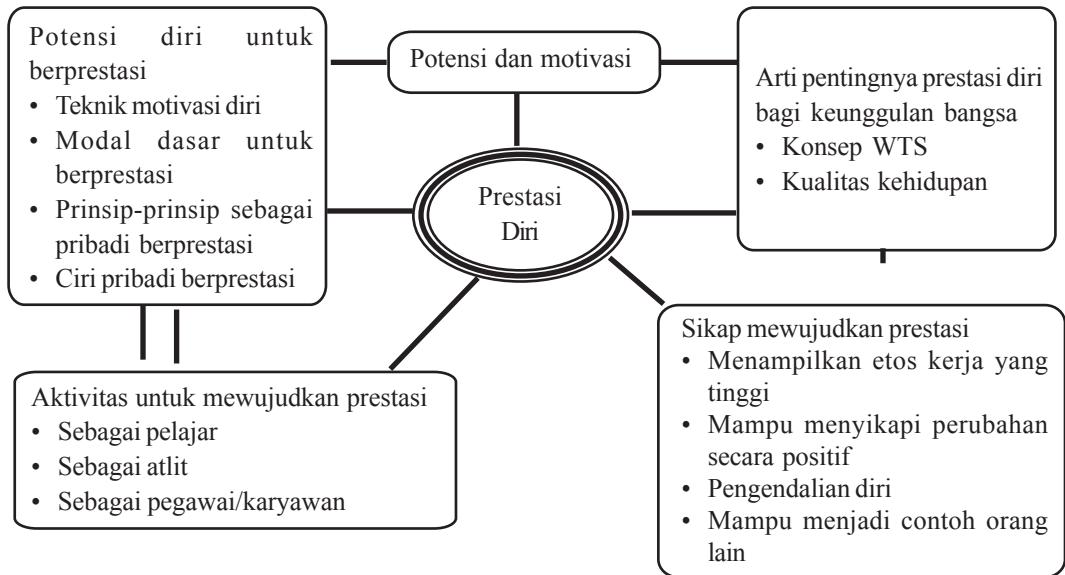
- A. Arti pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa
- B. Potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan
- C. Aktivitas untuk mewujudkan prestasi

Setelah bab ini berakhir, para siswa diharapkan mencoba menganalisis tugas dan menjawab soal-soal pengembangan materi.





Peta Konsep



Kata Kunci

Setiap warga negara harus mengetahui, memahami dan menyadari penting usaha meningkatkan prestasi diri

Kata-kata kunci pelajaran ini:

Prestasi diri, konsep meningkatkan prestasi diri, kebiasaan merusak prestasi, motivasi meningkatkan prestasi. Ciri-ciri berprestasi dan aktivitas, modal dasar, prinsip mewujudkan prestasi.



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kebutuhan warga negara ini para siswa diharapkan mampu:

1. memberikan pengertian prestasi diri;
2. menjelaskan konsep meningkatkan prestasi;
3. menyebutkan kebiasaan yang merusak prestasi diri;
4. menyebutkan motivasi meningkatkan prestasi diri;
5. menyebutkan ciri- ciri berprestasi;
6. mengaktualisasikan aktivitas untuk mewujudkan prestasi.

Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus mengembangkan potensi yang dimiliki dan motivasi diri. Mengembangkan potensi dan motivasi akan menghasilkan prestasi yang diharapkan. Potensi atau kemampuan diri dapat dikembangkan dengan melalui proses pembelajaran dan pengalaman hidupnya. Untuk memacu prestasi atau kemampuan, kita harus memiliki motivasi tinggi.



A. Arti Pentingnya Prestasi Diri bagi Keunggulan Bangsa

Tidak ada istilah terlambat melakukan sesuatu untuk masa depan yang lebih baik atau untuk berprestasi. Kesuksesan seseorang dalam berprestasi dipengaruhi oleh berbagai aspek lahiriah dan batiniah secara seimbang. Kekayaan materi juga merupakan salah satu sarana membuat perjalanan seseorang



menuju berprestasi. Kesuksesan hidup juga termasuk kesehatan pikiran dan tubuh, energi dan semangat hidup, pemenuhan hubungan, kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi, stabilitas emosi dan jiwa, rasa sejahtera, kedamaian pikiran dan kebahagiaan. Pengalaman hidup juga mendukung terwujudnya seseorang meningkat prestasi hidupnya.



*Gambar 4.1:
Gubernur Jawa
Tengah, H. Mardiyanto
menyerahkan piala
kepada Mukhtar Amin,
juara Olimpiade Sains
Nasional V
Sumber: Solo Pos, 10
September 2006*

Kesuksesan berprestasi tidak ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan umur. Bahkan banyak di antara orang yang sukses berprestasi besar di dunia ini pendidikan akademisnya rendah dan umurnya relatif muda. Di sini faktor penentu utamanya adalah motivasi dan pengembangan potensi yang dimiliki. Seseorang dapat sukses dalam berprestasi apabila ia dapat bekerja sebaik-baiknya; dapat menggunakan segala kemampuan pemberian Tuhan dan dapat bersikap positif.

Rumus keberhasilan berprestasi:

$$\text{Keberhasilan} = \text{Usaha} \times \text{Kemampuan} \times \text{Sikap Mental Positif}$$

Dalam mewujudkan prestasi seseorang juga menghadapi persaingan. Dengan adanya persaingan, manusia akan terpacu untuk menggali dan memanfaatkan kreativitas pikiran dan kekuatannya serta giat bekerja/berusaha untuk menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa, termasuk pelayanannya, dengan lebih menarik, lebih efektif, dan lebih efisien, sehingga



produk yang dihasilkan itu dapat bersaing. Dengan adanya persaingan, maka terciptalah peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Untuk meningkatkan prestasi seseorang khususnya pelajar harus memiliki konsep yaitu pola hidup tertib diri dan disiplin diri. Tertib diri berarti semua perilaku sehari-hari harus sesuai dengan aturan, baik aturan yang dibuat sendiri maupun aturan yang dibuat bersama, misal belajar tertib, makan tertib, tidur tertib, olahraga tertib, dan sebagainya. Untuk membiasakan diri hidup tertib kita sebagai pelajar harus membuat jadwal kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Contoh jadwal jam 04.30 bangun, bagi pemeluk agama Islam sholat subuh, jam 05.00 masak atau merapikan rumah, dan sebagainya sampai akan tidur.



Sebagai pelajar harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Sumber daya manusia meningkat dapat mengantisipasi perkembangan dan kemajuan globalisasi yang melanda dunia saat ini. Dan sebagai pelajar harus banyak belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta keahliannya.

Tertib dan disiplin apabila dikembangkan akan memperoleh hasil atau prestasi yang memuaskan. Selain tertib dan disiplin pelajar harus mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Potensi diri menjadi pondasi dasar untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan berkualitas. Keunggulan harus dimiliki setiap individu agar dapat menjawab tantangan era global saat ini

Keunggulan yang harus dimiliki setiap individu dalam era saat ini adalah keunggulan mentalitas, moralitas, dan spiritual yang baik. Dengan moralitas, mentalitas, dan spiritualitas yang baik akan membentuk kepribadian seseorang.

Keunggulan diri akan sempurna apabila dibekali kekuatan pengungkit yaitu cita-cita masa depan. Cita-cita masa depan memberi energi bagi setiap individu untuk belajar, beraktivitas dan melakukan apapun untuk kesejahteraan masa depan.

Cita-cita yang tidak disertai perbuatan dan sebuah keyakinan untuk bisa mencapai tujuan tersebut, sama halnya telah mengalami



setengah kegagalan. Maka keyakinan dalam mewujudkan prestasi diri harus mendapat tempat dalam diri kita. Jadi keyakinan menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita atau prestasi.

Untuk itu sebagai pelajar harus melaksanakan tugasnya yaitu:

1. Taat dan siap melakukan pekerjaan apapun yang ditugaskan oleh guru atau sekolah.
2. Melaksanakan tugas dengan niat yang ikhlas dan tulus.
3. Menganggap tugas yang diberikan kepadanya sebagai kepercayaan dan bukan beban.
4. Dalam melaksanakan tugas semua potensi yang dimiliki pada diri kita, kemampuan dan keterampilan kita digunakan secara maksimal.
5. Miliki semangat tinggi karena sadar bahwa semangat yang tinggi akan mencapai hasil yang maksimal.

Sebagai pelajar harus mampu meningkatkan prestasi diri dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu pelajar harus memiliki keterampilan, kemampuan, dan pengalaman keterampilan hidup. Selain itu kita perlu belajar kepada orang lain yang memiliki kelebihan. Belajar tidak harus di dalam kelas, tetapi di mana saja kita bisa belajar, dari buku, dari lingkungan, di dalam kantor, dalam pabrik, di jalan, yang penting kita dapat menambah pengetahuan dan keterampilan. Konsep ini mendorong kita selalu belajar dan berlatih sehingga kualitas kehidupan meningkat. Konsep ini secara otomatis dan berkesinambungan menjadi proses pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan diri sehingga kemampuan berprestasi yang rendah akan meningkat

Apabila kita memiliki pola pikir yang berkualitas akan berdampak dalam setiap langkah kehidupan kita. Terdapat lima kualitas yang perlu kita jaga dan pertahankan dalam kehidupan sebagai seorang yang berprestasi (Amir Tengku Ramly 2006: 33-34) yaitu:

1. Kulaitas iman dan takwa

Kualitas iman dan takwa antara lain rohani yang tenang dan terkendali, bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain, mempunyai disiplin yang tinggi dan memiliki iman atau spiritual yang kuat.



2. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani



*Gambar 4.2: Olahraga sepak bola membuat jasmani sehat
Sumber: Solo Pos, 9 Januari 2005*

Kualitas kesehatan jasmani dan rohani meliputi fisik yang sehat, hidup hemat, sehat dan bersahaja, belajar dan bekerja lebih giat dari sebelumnya.

3. Kualitas belajar



*Gambar 4.3:
Pengembangan karier yang dibuat oleh Universitas Trisakti menarik minat mahasiswa
Sumber: Sindo, 26 Agustus 2006*

Kualitas studi dan karir meliputi lulus dengan nilai terbaik bagi diri sendiri, belajar sesuai jalur sukses pribadi, mencintai prestasi baik di dunia belajar maupun masyarakat, masuk sekolah atau instansi yang mampu mewujudkan cita-cita, mempunyai spesialisasi keahlian, memiliki semangat dan kepribadian sejati dalam kompetensi belajar, menemukan peluang yang menguntungkan, mengelola hidup dengan baik, mampu menuangkan ide, melakukan investasi secara bijaksana, melihat peluang dibalik aktivitas dan peristiwa, menjadi bos atas diri sendiri dan berani mengambil risiko.



4. Kualitas harmonisasi keluarga



*Gambar 4.4: Keharmonisan keluarga dalam perayaan ulang tahun anaknya
Sumber: Dokumen Pribadi*

Kualitas harmonisasi keluarga meliputi memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, memiliki hasrat menjadi figur yang bisa diteladani, dan mempunyai pasangan hidup yang mendukung impian dan cita-cita di masa depan.

5. Kualitas hubungan sosial



*Gambar 4.5: Kerja bakti warga dalam program Kotaku Hijau
Sumber: Solo Pos, 14 Juli 2006*

Kualitas hubungan sosial meliputi memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan berinteraksi secara wajar dan bermanfaat.



Dalam mencapai prestasi ada kebiasaan-kebiasaan hidup yang merusak peningkatan prestasi kebiasaan adalah perilaku, baik sadar maupun tidak disadari dikerjakan secara berulang-ulang. Kebiasaan mempunyai nilai subjektif yang tinggi. Kebiasaan tidak baik akan membawa akibat pada peningkatan prestasi dan lingkungan.



Kegiatan Siswa

Baca dengan saksama kemudian diskusi permasalahan di bawah ini dan hasil diskusi presentasikan kepada teman kalian lain kelompok. Setelah dipresentasikan silakan hasilnya dikumpulkan untuk dinilai.

Ukir Prestasi Melalui Peduli

Tahu nggak siapa remaja yang tulalit? Mereka adalah remaja yang tidak peduli, kerjanya cuma nongkrongin TV, main games, dengerin musik, pacaran, apalagi tawuran. Mereka tidak peduli terhadap masa depannya, tidak peduli dengan kehidupan di akhirat kelak, dan tidak peduli pada sekitarnya. Mereka hanya bisa senang-senang saja.

Pada hal dengan peduli kamu bisa lebih berprestasi. Apabila kamu peduli dengan akhirat maka kamu akan berprestasi dalam ibadah, tentu saja berprestasi di mata Allah, bukan di mata manusia apalagi di mata calon mertua. Jika kamu peduli dengan masa depan kamu, maka kamu akan meraih prestasi di sekolah kamu.

Jika kamu peduli dengan remaja di Indonesia yang mengkhawatirkan, maka kamu akan berprestasi membawa mereka ke jalan yang benar. Emang benar remaja Indonesia mengkhawatirkan? Tidak semua sih, tetapi cukup banyak. Banyak remaja yang sudah dicekokin oleh hidup hedonisme (senang senang doang). Jika hidup semasa remaja hanya untuk senang-senang doang, mau jadi apa nantinya setelah dewasa? Jika senang-senang saja, pasti lalai ibadah, lalu bagaimana nanti di akhirat?



Kalo lagi ada acara seneng-seneng, pasti bejibun dech. Mereka kumpul dengan mudah seperti semut mengerubutin gula. Bagaimana dengan pengajian, atau kegiatan positif lainnya? Kamu pasti bisa jawab. Nach kalo kamu peduli dengan mereka, maka kamu akan berbuat sesuatu bagi mereka, dan itu adalah prestasi bagi kamu.

Jangan sampai salah peduli. Kalau masalah pakaian peduli abis. Lama sedikit sudah tidak mau pake. Kalo sama ejekan orang peduli banget, misalnya ejekan “Hari gini nggak punya HP?” kelimpungan ingin beli HP, maksa-maksain kepada orang tuanya. Sedikit saja ketinggal info tentang film, buru-buru beli majalah film atau nonton film ke sana ke sini. Kacian dech. Mudah-mudahan kamu bukan remaja yang seperti itu.

Sumber dari: *Sijori Mandiri (Batam),
Minggu, 27 Mei 2007*

Sebagai bahan diskusi:

1. Apa isi artikel di atas?
2. Coba cari hal-hal apa yang disampaikan dalam artikel di atas!
3. Bagaimana tanggapan kalian sebagai remaja Indonesia?



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Apakah yang dimaksud prestasi diri?
2. Seberapa pentingkah prestasi diri bagi keunggulan bangsa Indonesia?
3. Sebutkan lima kualitas yang perlu dijaga dan dipertahankan sebagai seorang yang berprestasi!
4. Jelaskan tugas pelajar yang harus dilaksanakan agar memiliki prestasi!
5. Sebutkan rumus keberhasilan seseorang!





Info Kewarganegaraan

*Kebiasaan Merusak Prestasi
(Soejitno Irmim,
2004 :49-66)*

- Menyalahgunakan kedudukan atau jabatan untuk memenuhi kepentingan pribadi;
- Selalu tidak menepati janji dan suka berbohong;
- Sulit mengakui kelebihan dan keberadaan orang lain;
- Tidak menepati waktu dan suka menunda pekerjaan;
- Selalu berpikir negatif;
- Takut menghadapi risiko;
- Senang membicarakan kelemahan orang lain.

B. Potensi Diri untuk Berprestasi sesuai Kemampuan

Potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kekuasaan, dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan; sesuatu yang menjadi aktual. Potensi diri adalah daya, kekuatan atau kemampuan seseorang yang dimiliki yang memungkinkan dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang aktual. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan.

Potensi diri dalam mewujudkan prestasi perlu dikembangkan dan dilatih. Ada dua hal yang penting dalam diri manusia untuk dapat berprestasi yaitu potensi dan motivasi diri. Potensi diri atau kemampuan diri setiap saat bisa ditambah dan ditingkatkan. Potensi diri semakin lama semakin tinggi sejalan proses pembelajaran dan pengalaman. Potensi diri baru dapat berubah menjadi karya atau prestasi jika ada motivasi. Tanpa motivasi yang tinggi potensi yang ada dalam diri seseorang akan sia-sia.

Teknik memotivasi diri agar dapat berprestasi antara lain:

1. Membangun niat di dalam diri kita untuk dan selalu menyikapi perubahan secara positif, tepat, dan benar.
2. Sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita terikat kontrak kerja dengan Tuhan Yang Maha Esa, sebab kita menyadari bahwa semua rezeki, kesehatan, dan kemampuan kita datang dari-Nya. Maka kita mempunyai kewajiban untuk bekerja sebagai bentuk ibadah kita kepada-Nya.
3. Membangun keinginan kita untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
4. Untuk menambah semangat kerja, kita harus mencermati hasil kerja atau prestasi yang telah tercapai. Apabila prestasi kita itu belum tercapai maka semangat kita perlu ditingkatkan.
5. Secara normal setiap orang akan merasa puas bila dalam melaksanakan tugas memberi hasil kerja yang baik. Setiap orang mendambakan prestasi yang memuaskan.



6. Dalam meningkatkan prestasi, kekecewaan akan menurunkan motivasi dan semangat seseorang. Apabila hal itu terjadi niscaya tidak mungkin akan menghasilkan prestasi yang memuaskan. Dalam hal ini kita harus mampu mengelola rasa kecewa
7. Jika kita bekerja motivasinya hanya mencari penghargaan dalam bentuk materi dan pangkat atau jabatan, maka yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan belaka. Jika demikian motivasi kerja akan turun. Materi, pangkat, atau jabatan harus dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi diri saja agar hasil atau prestasi diri meningkat dan maksimal.



*Gambar 4.6: Taufik menerima penghargaan dari pemerintah Yunani atas prestasinya sebagai pemain bulu tangkis
Sumber: Sindo, 12 Juli 2006*

Menjadi pribadi yang berprestasi merupakan harapan bagi semua orang. Pribadi yang berprestasi berarti unggul dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Pribadi yang berprestasi memiliki sifat-sifat yang terpuji yang bisa diteladani oleh orang lain. Setiap langkah dan tindakan yang diambil selalu dipikirkan terlebih dahulu agar dirinya bermanfaat bagi orang lain. Orang yang berprestasi tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas dan memalukan apalagi merugikan orang lain atau pihak lain.

Untuk berprestasi seseorang harus mempunyai kompetensi diri yang dapat mengarahkan, mengelola dan mengendalikan kehidupan. Bagian yang terpenting dari kompetensi diri adalah visi, manajemen, dan *leadership*. Sebagai modal dasarnya:





Musuh Seorang Pribadi Unggul (Soejitno Irmim, 2004 :71)

- *Orang yang munafik*
- *Orang yang memakai jam karet*
- *Orang yang tidak bertanggung jawab*
- *Orang yang hanya berpikir yang tidak baik*
- *Orang yang tidak disiplin*
- *Orang yang tidak mengindahkan kewajibannya*
- *Orang yang suka menyulitkan orang lain*
- *Orang yang suka bikin masalah*
- *Orang yang egois dan mau enak sendiri*
- *Orang yang tidak punya tanggung rasa*
- *Orang yang menganggap dirinya paling benar*
- *Orang yang tidak mau bercermin diri*

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki kejujuran yang tinggi.
3. Memiliki disiplin yang tinggi.
4. Memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.
5. Memiliki kepekaan dan daya juang yang tinggi.
6. Memiliki kesabaran dan ketabahan yang tinggi.
7. Memiliki toleransi dan tenggang rasa yang tinggi.
8. Memiliki kemampuan mengendalikan diri.
9. Memiliki kecerdasan intelektual yang memadai.
10. Memiliki kemampuan membedakan antara yang hak dan batil.

Selain modal dasar pribadi untuk berprestasi, harus memiliki prinsip-prinsip sebagai pribadi berprestasi yang unggul. Prinsip-prinsip itu (Soejitno Irmim 2004 : 69) adalah:

1. Setiap melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan selalu menetapkan target.
2. Berpikir sebelum bertindak.
3. Memanfaatkan waktu secara efisien dan mengalokasikan waktu menurut skala prioritas.
4. Selalu berpikir positif.
5. Selalu berupaya agar dirinya bermanfaat bagi orang lain.
6. Berusaha menjadi contoh dan teladan bagi orang lain.
7. Mau dan mampu mengintrospeksi diri.
8. Tidak pernah berhenti untuk belajar.

Manusia yang unggul dalam berprestasi memiliki ciri-ciri pribadi yang pantas dalam kehidupannya. Ciri-ciri manusia yang berprestasi (Soejitno Irmim, 2004 : 69) adalah:

1. Memiliki fisik dan mental yang sehat.
2. Jujur, disiplin, dan loyal.
3. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
4. Memiliki tenggang rasa yang tinggi.
5. Berpikir tentang masa depan.
6. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
7. Tidak mudah menyerah dan putus asa.
8. Mempunyai gairah dan semangat hidup yang tinggi.
9. Banyak inisiatif dan kreatif.
10. Selalu meningkatkan prestasi kerja
11. Memiliki kemampuan berkomunikasi



Dalam mewujudkan prestasi setiap pribadi harus memiliki sikap-sikap yang positif. Sikap-sikap itu adalah:

1. Menampilkan etos kerja yang tinggi

Yang termasuk etos kerja yang tinggi adalah:

a. Pandai menghargai dan mengatur waktu

Setiap orang diberi waktu yang sama artinya siapapun oleh Tuhan diberi waktu satu hari 24 jam. Tetapi hanya orang yang dapat mengatur dan memanfaatkan waktu dengan tepat yang dapat berprestasi dalam hidupnya.

b. Memiliki disiplin yang tinggi

Tidak ada keberhasilan tanpa disiplin yang tinggi, tidak ada satu pun orang yang sukses tanpa disiplin yang tinggi, tidak ada satu pun aturan yang bisa dilaksanakan dengan baik tanpa disiplin yang tinggi. Jadi disiplin merupakan kunci sukses seseorang.

c. Memiliki perencanaan yang matang

Dalam mewujudkan prestasi perencanaan sangatlah penting. Jika perencanaan dilaksanakan dengan baik maka separuh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sehingga potensi untuk sukses sangat tinggi.

d. Menentukan target yang menantang

Target yang asal-asalan dan mencari enaknyanya dalam kegiatan bukan merupakan ciri orang yang berprestasi. Kalau kita menentukan target yang menantang akan membuat diri kita berusaha keras agar prestasi dapat memuaskan.

e. Melaksanakan suatu pekerjaan tidak setengah-setengah

Bekerja asal kerja atau setengah-setengah tidak akan menghasilkan prestasi yang maksimal. Setiap tugas atau kerja harus diselesaikan secara tuntas.

f. Mengoptimalkan potensi diri

Potensi diri atau kemampuan seseorang harus digunakan secara maksimal agar prestasi yang diharapkan dapat diwujudkan.



Aset Seorang Pribadi Unggul (Soejitno Irmim, 2004 : 71)

- Ibadah merupakan sinar kehidupannya
- Doa merupakan senjata ampuhnya
- Kerja keras adalah kebiasaannya
- Ikhlas adalah teman dekatnya
- Kejujuran adalah motto hidupnya
- Disiplin merupakan hobby utamanya
- Loyalitas adalah pakainya sehari-hari
- Kerja sama adalah kendaraannya
- Kepuasan kerja merupakan hiburannya
- Hak dan kewajiban merupakan timbangannya
- Belajar adalah makanannya pokoknya
- Hati nurani merupakan kendali dirinya



g. Tidak putus asa

Putus asa merupakan penyakit hati. Penyakit ini apabila menjangkiti kita maka target yang diharapkan tidak akan tercapai, sebab ada sedikit kesulitan sudah tidak mau melanjutkan.

h. Berani mengambil risiko

Salah satu orang yang berprestasi adalah berani mengambil risiko, tidak takut gagal, dan berani bertanggung jawab dengan langkah yang diambil. Berani mengambil risiko bukan berarti tidak ada perhitungan dan prediksi dalam mencapai prestasi.

i. Memiliki prinsip dan pendirian yang kuat

Prinsip ini dapat mengantisipasi perubahan sehingga kredibilitas pribadi menjadi tidak mudah goyang oleh pengaruh yang negatif.

2. Mampu menyikapi perubahan secara positif

Keadaan setiap saat akan mengalami perubahan baik itu positif maupun perubahan negatif. Perubahan yang terjadi perlu kita sikapi, maka untuk mencapai prestasi perlu:

a. Menyadari bahwa setiap perubahan akan membawa perubahan positif maupun negatif

Perubahan apapun pasti ada sisi positif dan negatifnya. Dalam perubahan pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, ada yang senang dan ada yang tidak senang. Kita harus menyadari bahwa perubahan apapun apa itu perubahan terhadap peraturan atau pemerintahan serta pergantian pimpinan berakibat tidak menguntungkan semua orang dan juga perubahan juga tidak merugikan semua orang. Itu untuk memacu kita untuk berprestasi harus menyikapi perubahan secara positif. Orang untuk menuju prestasi harus berpikir positif terhadap perubahan apapun.

b. Menyikapi bahwa perubahan yang terjadi merupakan hal yang terbaik

Orang tidak mengetahui rahasia Tuhan, tetapi apabila berpikir yang positif terhadap semua perubahan akan membawa kita untuk maju dan berprestasi.



c. *Mampu mengantisipasi terhadap perubahan*

Di era globalisasi dan reformasi saat ini yang namanya perubahan terjadi secara tiba-tiba tanpa memberi tahu lebih dahulu dan frekuensinya sangat cepat. Untuk itu kita harus tanggap terhadap perubahan itu, sehingga prestasi yang diharapkan akan terwujud.

d. *Mampu mengambil manfaat dari setiap perubahan yang terjadi*

Di depan sudah diuraikan bahwa setiap perubahan membawa dampak. Apabila perubahan itu diambil sisi positifnya sebetulnya sangat bermanfaat bagi peningkatan prestasi seseorang. Seseorang dapat belajar dari perubahan-perubahan tersebut sehingga dapat mengambil kelebihan dari perubahan itu.

3. Pengendalian diri yang kuat

Dalam mewujudkan prestasi seseorang harus memiliki pengendalian diri yang kuat. Pelaksanaan pengendalian diri dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Mampu mengontrol perbuatan.
- b. Mampu mengendalikan nafsu.
- c. Mampu meredam rasa iri hati.
- d. Mampu mengalahkan godaan.
- e. Mampu menghilangkan rasa malas.
- f. Mampu mengendalikan kekecewaan.
- g. Mampu berpikir dengan kepala dingin.
- h. Berpikir sebelum bertindak.
- i. Mampu menyadari kelemahan diri sendiri.
- j. Menghargai prestasi orang lain.

4. Mampu menjadi contoh orang lain

Seseorang telah memiliki prestasi diri dalam kehidupannya, harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Perilaku orang yang menjadi contoh atau teladan adalah:



Mimpi Seorang Pribadi Unggul (Soejitno Irmim, 2004 :70)

- *Menjadi pemecah masalah*
- *Menjadi motor penggerak kebaikan*
- *Merubah sesuatu menjadi lebih baik*
- *Semua orang mencontoh dirinya*
- *Menciptakan perubahan positif*





Gambar 4.7: Daya juang tinggi menunjang prestasi
Sumber: Jawa Pos, 15 November 2006

- a. Bersifat jujur.
- b. Menghindari perbuatan yang tercela.
- c. Mempunyai semangat tinggi dalam bekerja atau belajar.
- d. Memiliki daya juang yang tinggi.
- e. Mau menularkan ilmunya kepada orang lain.
- f. Menghargai orang lain.
- g. Tidak menunda tugas atau pekerjaan.
- h. Selalu berpikir yang positif terhadap lingkungan.



Kegiatan Siswa

Bacalah hasil prestasi berikut!

Robot Buatan Siswa SMA Menang Kompetisi Internasional

Siswa-siswa SMA dari Indonesia kembali membawa harum nama bangsa di pentas dunia. Dua buah robot buatan siswa-siswi SMA Indonesia memenangkan dua penghargaan dalam *The Internastional Project Competition Info Matrik* kelima yang berlangsung di Rumania, 14–15 Mei 2007.

Dalam kompetisi tahunan tingkat internasional yang diselenggarakan Lumina University, Universitatea Din Bucharest, dan Departemen Pendidikan Rumania itu, masing-masing memperoleh medali emas dan perak. Medali emas diberikan kepada Amanah Rahmadia, siswi SMA Kharisma Bangsa, Tangerang, Banten. Sedangkan, medali perak diperoleh Dipa Raditya dari SMA Pribadi, Depok, Jawa Barat dan Riyandi Pratama Putra dari SMA Semesta, Semarang Jawa Tengah.



Robot bernama Bombuster yang dibuat Amanah sukses melakukan simulasi memindahkan replika bom ke tempat yang aman. Sedangkan robot buatan Dipa dan Riyan berhasil mendemonstrasikan kemampuannya menemukan titik api dan memadamkannya secara otomatis serta mengirimkan peringatan adanya bahaya kebakaran melalui SMS.

Keberhasilan ini cukup mengejutkan. Sebab, seperti dituturkan kepala KCM melalui telepon usai tiba di tanah air, Dipa mengatakan, ia dan rekan satu timnya baru pertama kali mengikuti lomba tersebut. Bahkan, ia sendiri baru mempelajari teknologi robotika sejak 3–4 bulan lalu atas bimbingan seorang dosen Universitas Gunadarma Purnawarman Musa. Beruntung ketiganya sama-sama di sekolah yang bergabung dalam jaringan kerja sama Indonesia – Turki di bawah Yayasan Tasiad dan mendapat dukungan dari staf pengajar dan pengasuh.

“Awalnya saya diberitahu guru komputer kalau ada lomba di Internet lalu dikenalkan kepada seorang dosen Gunadarma,” ujar Dipa yang masih duduk di tingkat dua. Kemudian atas inisiatif pimpinan masing-masing sekolah, ia dipertemukan dengan Riyan untuk mengerjakan proyek bersama di Depok.

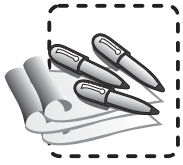
Meski kedua tim dari Indonesia sama-sama membuat robot, Infomatrix pada dasarnya bukan kompetisi robotika. Ada 4 kategori yang dilombakan, yakni *computer art*, *programming digital content*, dan *hardware controlling*, tim dari SMA Fatih Banda Aceh yang membuat *Drunk Detector Car* juga mendapatkan medali perak.

Sumber: *Sjori Mandiri (Batam)*,
Minggu, 27 Mei 2007

Coba diskusikan dengan kelompok bejar kalian:

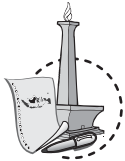
1. Prestasi apa yang ada dalam berita tersebut?
2. Mengapa mereka dapat berprestasi?
3. Penghargaan apa yang mereka diperoleh?
4. Mungkinkah kalian juga dapat berprestasi, beri penjelasan!





Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Jelaskan yang dimaksud potensi itu!
2. Sebutkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak prestasi seseorang!
3. Agar seseorang dapat berprestasi harus memiliki prinsip, sebutkan prinsip tersebut!
4. Sebutkan ciri-ciri manusia berprestasi!
5. Sebutkan sikap yang termasuk etos kerja tinggi!



C. Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi

Prestasi pribadi atau kelompok dapat dicapai apabila seseorang secara individu atau kelompok dengan me-ngembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing pribadi. Potensi diri semakin lama semakin bertambah dan meningkat hal ini sejalan dengan proses pembelajaran dan pengalaman seseorang. Potensi yang ada baru dapat berubah menjadi karya dan prestasi jika ada motivasi dalam dirinya. Motivasi pada diri seseorang sifatnya labil tergantung pada keadaan dan perasaan seseorang. Bila semangat beraktivitas tinggi akan menghasilkan karya atau prestasi yang maksimal.

Kesuksesan seseorang bukan karena pendidikannya tinggi, tetapi adalah semangat dan etos kerjanya. Pada dasarnya setiap diri manusia senantiasa ingin berprestasi, tetapi dalam mewujudkan prestasi diri tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Prestasi dapat tercapai harus berusaha dan bekerja keras atau beraktivitas.

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan agar tercapai prestasi yang diinginkan. Bentuk aktivitas dapat dilakukan menurut tugas dan kedudukan seseorang dalam kehidupan masyarakat.



1. Kedudukan sebagai pelajar

Untuk mencapai prestasi yang memuaskan, sebagai pelajar harus mengembangkan potensi dan kemampuannya. Banyak pelajar yang dapat kita teladani karena prestasinya, misalnya juara pertama Olimpiade Sains baik tingkat nasional maupun internasional, juara lomba karya tulis, juara lomba robot internasional di Rumania. Usaha-usaha untuk mencapai prestasi bagi pelajar adalah:

- a. Mengadakan aktivitas belajar, membaca, diskusi, dan mengadakan penelitian
- b. Disiplin artinya dalam mewujudkan prestasi yang memuaskan diperlukan penggunaan waktu harus secara tertib tidak membuang-buang waktu. Hampir di semua sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan pramuka, olahraga, elektro, maupun kesenian. Seorang siswa yang mengikuti kegiatan tersebut yang pasti harus membagi waktu yang sebaik-baiknya, agar tidak terjadi tumbukan kegiatan satu dengan proses belajar intrakurikuler. Kepandaian mengatur waktu dan kegiatan itulah yang digolongkan sebagai siswa yang disiplin dan tertib waktu.
- c. Mematuhi dan taat pada aturan yang telah dibuat sekolah. Tata tertib atau peraturan sekolah dibuat bertujuan agar proses belajar mengajar berjalan dengan tertib dan mendidik para siswa untuk hidup tertib dan disiplin
- d. Membaca buku-buku dalam perpustakaan maupun meminjam buku untuk dibaca di rumah sebagai pengisi waktu luang. Seorang siswa yang giat membaca buku apa saja di perpustakaan akan memperoleh ilmu pengetahuan yang luar biasa, misalnya membaca buku-buku penerapan teknologi, setelah membaca siswa akan dapat parktek secara langsung membuat teknologi tepat guna.

2. Karyawan atau pegawai

Tidak ada keberhasilan tanpa disiplin yang tinggi, hal ini juga berlaku bagi pegawai atau karyawan. Karyawan atau pegawai harus memiliki etos kerja yang tinggi. Banyak karyawan atau pegawai dalam jam kerja bersantai-santai saja.



Untuk mencapai prestasi bagi pegawai atau karyawan harus menjauhkan diri dari sikap mau bekerja apabila disuruh. Agar prestasinya dapat meningkat diperlukan pelatihan-pelatihan keterampilan dan keahlian.

3. Atlet olahraga



Gambar 4.8: Atlet berprestasi
Sumber: Kompas, 28 Desember 2004

Banyak para atlet kita yang telah berhasil, misalnya prestasi olahraga bulu tangkis yang mengukir sejarah dalam olimpiade sebab dari cabang itu telah meraih juara pertama bulu tangkis. Para atlet itu berprestasi sebab para pemainnya berlatih dan bekerja keras.

Contoh pemain bulu tangkis Susi Susanti yang pernah menjuarai olimpiade dengan memperoleh medali emas, Susi Susanti juga berlatih terus. Juga kita dapat memetik pengalaman dari film kartun Captain Tsubasa, bagaimana ia dapat sukses bermain sepak bola, ia berlatih terus tanpa pantang menyerah.

Dalam beraktivitas agar hasil yang diperoleh maksimal hendaknya kita mengembangkan sikap-sikap:

- a. Bekerja dengan semangat tinggi artinya dalam bekerja harus memiliki semangat tinggi, pantang menyerah, tidak takut tantangan, penuh pertimbangan, dan perhitungan.
- b. Memiliki daya juang yang tinggi artinya kesuksesan akan tercapai apabila tidak pernah putus asa, tidak takut risiko.



Tantangan demi tantangan harus dihadapi, masalah demi masalah juga harus dihadapi untuk diselesaikan. Kita orang beriman yakin bahwa selama orang mau berusaha dan bekerja keras yakin apa yang direncanakan dapat terwujud.

- c. Berusaha tidak menunda-nunda waktu atau menunda-nunda kesempatan. Apabila kita mau mengamati, menunda waktu atau kesempatan penyakit laten bagi kita dalam beraktivitas, sehingga kesempatan memperoleh kesuksesan hilang.
- d. Berusaha menaati aturan yang ada. Keberhasilan tidak akan didapat apabila kita dalam bekerja atau beraktivitas tidak mengindah atauran-aturan, misalnya pelajar tidak berprestasi apabila tidak mengindahkan aturan jam-jam belajar untuk belajar, orang tidak akan sehat apabila istirahat, makan, atau minum tidak menurut aturan, dan masih banyak contoh yang kita lihat.



Kegiatan Siswa

Bacalah dan cermati!

Kebiasaan Sejak Dini itu Penting

Kebiasaan susah bangun pagi tidak akan menjadi sebuah masalah selama hal itu tidak disebabkan oleh “faktor x” dan tidak terjadi secara terus-menerus. Ini terjadi karena adanya disorientasi yaitu karena pola kebiasaan yang salah.

Salah satu hal yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah pola asuh dalam lingkungan keluarga, seorang anak belajar dari kebiasaan apa yang diajarkan dari kedua orang tuanya di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Contohnya, keluarga yang menerapkan anaknya untuk menghargai waktu sejak dini, maka akan menanamkan sifat disiplin waktu terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, peranan keluarga juga penting.



Selain itu, kapasitas tidur yang kurang juga menyebabkan susah bangun tidur. Kebiasaan nonton TV atau dengerin musik biasa dilakukan oleh para remaja sebelum tidur dan merupakan hal yang wajar, tetapi jangan sampai kebiasaan itu berubah menjadi sebuah ketergantungan.

Intinya, rasa tanggung jawab dan kesadaran diri sendiri untuk mengubah kebiasaan susah bangun tidur perlu diantisipasi sejak dini. Istilah memang penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi semuanya harus diimbangi dengan kegiatan yang bersifat positif.

Gali potensimu ...!

Pendidikan emang harta yang paling berharga. Gimana tidak kalo demi pendidikan, kebanyakan orang rela merantau ke luar negeri. Khususnya sekolah di Indonesia, gimana sih untuk meningkatkan prestasi?

1. Teladan

Banyak siswa teladan yang sekolah otomatis bakal nama sekolah itu makin dikenal. Terus gimana untuk menciptakan banyak siswa teladan? Satu saja kuncinya yaitu dengan meningkatkan mutu pengajaran di sekolah itu, trus sering-sering deh menang di perlombaan.

2. Disiplin

Aturan super ketat yang diterapkan di sekolah, akhirnya bakal bikin sekolah itu punya nilai plus sendiri di masyarakat. Apalagi kalo sekolah itu merupakan sekolah ternama, dijamin bakal jadi sekolah yang punya disiplin tinggi. Kalo sekolahnya aja udah disiplin, gimana dengan siswanya?

Sumber: *Sijori Mandiri (Batam)*,
Minggu, 27 Mei 2007

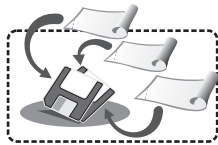
Setelah kalian membaca, coba beri tanggapan secara kelompok. Tanggapan tersebut dibacakan di depan kelas masing-masing oleh wakil kelompok!





Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Apa yang membuat manusia dapat berprestasi?
2. Sebutkan aktivitas yang dapat dilakukan untuk tercapainya prestasi!
3. Sebutkan sikap-sikap dalam beraktivitas agar hasil dapat maksimal!
4. Apa akibatnya apabila dalam memperoleh prestasi tidak menaati peraturan yang berlaku?
5. Sebutkan cara untuk mengembangkan potensi bangsa dalam bidang pendidikan!



Rangkuman

Menyadari atau tidak setiap manusia dalam hidupnya akan selalu berusaha berprestasi. Manusia agar berprestasi harus dapat mengembangkan potensi dirinya. Potensi diri meliputi pengembangan akal pikiran, mengembangkan cipta dan karya serta mengembangkan rasa.

Semua potensi diri dapat dikembangkan melalui belajar dan berlatih. Untuk memacu peningkatan prestasi masih banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu atau kelompok. Aktivitas yang dimaksud sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya. Misalnya ahli sepak bola dikembangkan kariernya di bidang sepak bola, pelajar ditingkatkan belajarnya dengan baik, dan karyawan atau pegawai juga dapat ditingkatkan etos kerjanya.





Glosarium

aktivitas	= keaktifan, kegiatan, kesibukan atau kerja atau salah satu kegiatan kerja, yang dilaksanakan di tiap bagian di dalam perusahaan
bangsa	= kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri
diri	= orang seorang (terpisah dari orang lain), badan
keunggulan	= keadaan (lebih) unggul, keutamaan, kepandaian (kecakapan, kebaikan, kekuatan) yang lebih dari yang lain
kemampuan	= kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan.
potensi	= daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kekuasaan, kemungkinan untuk dapat dikembangkan, sesuatu untuk dapat aktual



Tugas

Hadapi OSI, Amin Targetkan Medali Emas

Pelajar kelas VI SDN Ngombakan I Polokarto, Sukoharjo, Mukhtar Amin yang beberapa waktu lalu merebut tiga gelar sekaligus dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) V menargetkan medali emas dalam Olimpiade Sains Internasional (OSI)

Mukhtar Amin mengungkapkan targetnya itu. “Kalau saya menargetkan meraih medali emas dalam Olimpiade sains Internasional. Karena dengan target tersebut, saya akan lebih terpacu untuk mengejar cita-cita tersebut” tutur bocah pendiam itu.



Menurut Amin dirinya yakin bisa menggapai cita-cita tersebut. Karena dari awalnya memang akan diberikan yang terbaik untuk SDN Ngombakan I Polokarto, Sukoharjo, Indonesia, dan yang pasti kedua orang tuanya. Disinggung kualitas lawan-lawannya, Amin mengaku dirinya dan anak-anak lainnya pada dasarnya sama. “Tetapi saya tetap yakin bisa menyelesaikan soal-soal, baik teori dan praktek”, imbuh dia.

Sementara itu hingga kini belum diketahui jelas lokasi penyelenggaraan Olimpiade Sains Internasional yang menurut rencana diadakan, Selasa (14/11) mendatang.

Meski Amin menargetkan medali emas, namun pihak sekolah di mana dia belajar justru memasang target lebih rendah. Ditemui Espos di ruang kerjanya, Kepala Sekolah SDN Ngombakan I Polokarto, Heru Purwanto, S.Pd. mengatakan pihak sekolah berani menargetkan medali perak lantaran melihat potensi yang dimiliki bocah yang kerap dipanggil Amin itu.” Kami dari pihak sekolah optimis dia (Amin) bisa menggondol medali perak dalam Olimpiade Sains Internasional November mendatang” kata Heru.

Menurut Heru, “Mukhtar Amin selain memiliki kecerdasan dan cerdas dalam mengerjakan soal, dirinya juga memiliki satu kunci yang jarang dimiliki siswa lain yang seangkatan dengannya, yang pasti, dia ulet dan rajin belajar. Itu saja,” tegasnya.

Tahap latihan

Terkait persiapan Amin dalam menghadapi even itu, pendamping yang juga guru sekolah Amin, Kirnadi mengatakan, pekan lalu, Mukhtar Amin dan empat juara OSN V lainnya ditambah 10 siswa lainnya yang masuk jalur B telah menjalani tahap latihan perdana di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di Jakarta Selatan. Dalam latihan tersebut, Mukhtar Amin dilatih dosen-dosen berkualitas dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia. ”Dosen-dosen itu diterjunkan khusus untuk mendidik Amin dan peserta lainnya supaya lebih matang dalam mengerjakan soal-soal Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang meliputi biologi dan fisika“.



Kendati mendapat pelatihan dari akar handal, Kirnadi mengatakan kendala yang dihadapi Amin dan peserta lainnya adalah bahasa Inggris karena semua soal Olimpiade Sains Interenasional berbahasa Inggris. sementara itu, semua pelajar jarang mengerjakan soal seperti itu“, tambahnya. Hal tersebut juga dibenarkan Amin. “Untuk soal-soal, semuanya tergolong bisa dikerjakan. Tapi karena soal menggunakan bahasa Inggris itu yang membuat saya kesulitan“. terkait hal itu, pihak sekolah sudah mempersiapkan beberapa *software dan compact disc (CD)* berisi soal-soal bertaraf internasional“.

Sumber: *Solo Pos*, 27 September 2006

Diskusikan dengan kelompok belajar kalian dengan memberi tanggapan atas keberhasilan Amin dalam Olimpiade Sains Nasional V! Sebutkan faktor-faktor keberhasilan Amin!



Uji Pemahaman Konsep

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Taat dan siap melakukan pekerjaan apapun yang ditugaskan kepada kita sebagai konsekuensi keseimbangan antara hak dan kewajiban, hal ini merupakan
 - a. peran sebagai pekerja
 - b. peran sebagai guru
 - c. peran sebagai murid
 - d. peran sebagai pemimpin
2. Agar kita sebagai pekerja dapat berprestasi diperlukan sikap
 - a. disiplin
 - b. berlatih
 - c. apatis
 - d. masa bodoh



3. Konsep peran sebagai guru berarti mempersiapkan diri untuk
- menjadi pemimpin bangsa
 - meningkatkan kualitas
 - menambah pengetahuan
 - menghindari perubahan
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Takut persaingan.
 - 2) Mementingkan diri sendiri.
 - 3) Ketidakmampuan mengatur pekerjaan.
 - 4) Meremehkan pekerjaan rendah.
 - 5) Tidak menerima orang lain.
 - 6) Kurang berlatih.
- Di atas ini yang merupakan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam berprestasi
- 1, 2, 3, dan 4
 - 2, 3, 4, dan 5
 - 3, 4, 5, dan 6
 - 4, 5, 6, dan 1
5. Sebagai warga negara, kita menghormati kebebasan orang lain menjalankan ibadah keagamaannya merupakan sikap warga negara yang sesuai dengan jiwa Pancasila sila
- Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - Persatuan Indonesia
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
6. Kepandaian yang kita miliki digunakan untuk
- menghadapi semua lawan-lawan
 - menyatakan bahwa dirinya pandai
 - menunjukkan kehebatan kita
 - kesejahteraan manusia dan kemanusiaan
7. Setelah tamat sekolah, saya akan berwiraswasta, karena



- a. sesuai dengan anjuran pemerintah
 - b. mendatangkan untung yang banyak
 - c. bekerja sesuai dengan kemampuannya
 - d. pekerjaan tersebut sesuai dengan cita-cita
8. Manfaat utama yang dapat diambil dalam perkemahan Pramuka ialah
- a. melaksanakan pengembaraan
 - b. untuk melatih kemandirian
 - c. rasa tanggung jawab bersama
 - d. untuk mengisi kegiatan liburan
9. Kita wajib melestarikan hutan-hutan dari erosi sebab
- a. hutan merupakan keindahan alam
 - b. hutan menjaga keseimbangan alam
 - c. hutan memberi kekayaan yang melimpah
 - d. hutan memberi perlindungan pada kita
10. Keunggulan pribadi yang memiliki prestasi dapat dilihat dari
- a. kepekaan dan daya juang tinggi
 - b. memiliki tenggang rasa yang tinggi
 - c. mau dan mampu mengintrospeksi diri
 - d. banyak inisiatif dan kreatif
11. Menjadi pribadi yang unggul harus mampu mengembangkan
- a. prestasi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan zaman
 - b. hubungan vertikal dan horizontal yang harmonis
 - c. mempunyai gairah dan semangat hidup yang tinggi
 - d. rasa tanggung jawab yang tinggi
12. Seseorang yang memiliki keunggulan prestasi tidak akan
- a. menyelesaikan permasalahan dengan prinsip *win-win solution*
 - b. berpikir yang terpuji untuk diteladani orang lain di sekitarnya



- c. melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain
 - d. berusaha menjadi contoh dan teladan bagi orang lain
13. Di bawah ini yang *bukan* pantangan pribadi yang memiliki keunggulan prestasi
- a. meminta yang bukan menjadi haknya
 - b. mementingkan diri sendiri
 - c. menyulitkan orang lain
 - d. menciptakan perubahan positif
14. Sebagai seorang siswa yang berprestasi di bidang akademis akan selalu bertindak, *kecuali*
- a. jujur dan disiplin
 - b. berpikir sebelum bertindak
 - c. tidak pernah berhenti belajar
 - d. mengikuti upacara setiap hari
15. Ciri seorang pelajar yang memiliki keunggulan prestasi, *kecuali*
- a. memiliki fisik dan mental yang sehat
 - b. memiliki kejujuran dan loyalitas
 - c. berorientasi pada kebahagiaan semata
 - d. banyak berinisiatif dan kreatif
16. Di bawah ini *bukan* usaha meningkatkan prestasi kerja yaitu
- a. belajar dan berlatih terus
 - b. tekun dan disiplin
 - c. mengadakan perubahan nilai
 - d. mengoreksi kesalahan
17. Yang menjadi musuh bebuyutan seorang pelajar dalam mencapai prestasi yang diharapkan antara lain, *kecuali*
- a. tidak bertanggung jawab
 - b. tidak mengindahkan kewajiban
 - c. menghargai karya orang lain
 - d. menganggap dirinya paling benar
18. Yang sangat menentukan seseorang dapat berprestasi dalam hidupnya adalah



- a. sikap mental mengembangkan potensi yang dimiliki
 - b. mengharapkan orang lain untuk melatih dirinya
 - c. menjauhkan diri dari pergaulan dengan orang lain
 - d. tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang secara formal
19. Bangsa Indonesia ingin mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tetapi dalam mewujudkannya mengalami banyak hambatan, *kecuali*
- a. kurangnya layanan pendidikan tinggi
 - b. kurangnya layanan kesehatan masyarakat
 - c. sarana pendidikan yang kurang memadai
 - d. kurangnya dana untuk menunjang pendidikan
20. Modal yang harus dimiliki seseorang mencapai sukses berprestasi antara lain
- a. pendidikan yang memadai
 - b. kejujuran dan disiplin tinggi
 - c. kekayaan dan finansial tinggi
 - d. kemampuan dan kepandaian
21. Prinsip-prinsip yang harus menjadi landasan untuk memperoleh prestasi adalah
- a. memanfaatkan waktu secara efisien menurut skala prioritas
 - b. setiap langkah selalu berpikir terlebih dahulu agar menjadi kebiasaan
 - c. mempunyai gairah dan semangat hidup tinggi apabila ada motivasi
 - d. memiliki motivasi untuk menjadi orang yang memiliki kemampuan tinggi
22. Hal-hal yang harus dihindari yang merupakan pantangan untuk mewujudkan pribadi yang berprestasi antara lain
- a. mementingkan kepentingan orang lain
 - b. melakukan perbuatan yang memalukan
 - c. mengadakan hubungan kerja sama dengan yang lain
 - d. mengadakan latihan-latihan keterampilan yang cocok



23. Bagi orang yang ingin mencapai kesuksesan, memandang kegagalan merupakan
- kehancuran masa depannya
 - tidak dipercaya orang lain
 - awal dari keberhasilan
 - ujian bagi kehidupannya
24. Prestasi yang ditunjukkan oleh para pelajar SMP dan SMA di tingkat internasional di antaranya adalah
- juara bulu tangkis
 - juara tenis internasional
 - juara lukis internasional
 - juara lomba olimpiade
25. Pengaruh yang melanda generasi muda saat ini, sehingga sebagian generasi muda sulit untuk mewujudkan prestasinya adalah
- penggunaan narkoba di kalangan remaja
 - pengaruh adanya globalisasi dunia
 - adanya budaya yang masuk ke Indonesia
 - adanya tekanan generasi tua terhadap generasi muda
26. Belajar dengan tekun dan rajin merupakan sarana untuk
- membekali diri sendiri
 - memenuhi kewajiban pelajar
 - meraih prestasi yang memuaskan
 - menjauhkan diri dari pengaruh teman
27. Berbohong dan berperilaku tidak jujur merupakan pantangan sebagai seorang yang ingin
- berprestasi
 - berharga
 - bernilai
 - bermoral
28. Prestasi putra bangsa Indonesia bidang konstruksi yang sudah diakui oleh internasional adalah



- a. pembuatan kapal terbang
 - b. pembangunan jembatan
 - c. kontruksi cakar ayam
 - d. pengecoran beton tiang
29. Penghargaan dari pemerintah pusat kepada kota di bidang kebersihan disebut
- a. Adi Kencana
 - b. Adi Pura
 - c. Kalpataru
 - d. Satya Lencana
30. Penghargaan pemerintah kepada seseorang yang berhasil melestarikan lingkungan hidup disebut
- a. Tri Sakti
 - b. Adi Kencana
 - c. Adi Pura
 - d. Kalpataru

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Siswa yang menginginkan berprestasi harus
2. Bangsa Indonesia telah berprestasi swasembada pangan di bidang
3. Atlet Susi Susanti pernah meraih medali emas dalam olimpiade dalam cabang olahraga
4. Menghargai karya orang lain termasuk pengamalan sila
5. Prestasi bagi pelajar dalam bidang penelitian dapat diwujudkan dalam bentuk
6. Giat berlatih sepak bola selain membuat badan sehat juga akan memperoleh
7. Penghargaan dari pemerintah terhadap warga negara yang telah menjaga lingkungan hidupnya disebut
8. Olimpiade sains diadakan bertujuan
9. Sumber daya manusia akan dapat meningkat kualitasnya apabila
10. Agar lingkungan hidup kita tidak kumuh perlu peningkatan



III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan usaha pelajar untuk memperoleh prestasi yang memuaskan!
2. Sebutkan prestasi putra-putra bangsa Indonesia yang telah diakui dunia!
3. Sebutkan pantangan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang yang memiliki keunggulan prestasi!
4. Sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki prestasi dalam hidupnya!
5. Sebutkan musuh kita bangsa Indonesia dalam meningkatkan prestasi sebagai bangsa yang memiliki keunggulan!
6. Sebutkan macam-macam penghargaan bagi orang atau kelompok yang berprestasi sesuai bidangnya!
7. Sebutkan prestasi putra bangsa Indonesia bidang teknologi dirgantara yang telah diakui dunia!
8. Sebutkan sebab-sebab kegagalan seseorang dalam berprestasi!
9. Sebutkan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berprestasi!
10. Sebutkan cara meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan waktu yang ada!





Pelatihan Ulangan Umum

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan adalah
 - a. mempertahankan kemerdekaan
 - b. mengisi kemerdekaan
 - c. mengusir musuh dari bumi Indonesia
 - d. mencegah masuknya orang asing
2. Penghancuran negara yang datang dari dalam negeri seperti berikut, *kecuali*
 - a. penyerangan kepulauan Blok Ambalat Kalimantan
 - b. adanya pemberontakan sebagai usaha untuk memisahkan diri dari NKRI
 - c. adanya budaya korupsi, nepotisme, dan kolusi
 - d. pelanggaran hukum negara yang telah disepakati
3. Berbekal dari sumber datangnya usaha penghancuran negara, maka negara kita menerapkan pola pertahanan keamanan dengan sistem
 - a. pertahanan keamanan rakyat semesta
 - b. pertahanan rakyat terlatih
 - c. pertahanan perlindungan masyarakat
 - d. pertahanan keamanan konvensional
4. Penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk menghasilkan kualitas manusia Indonesia yang dapat
 - a. mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara
 - b. mengembangkan keahliannya dalam menangkal musuh yang datang
 - c. mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan setia bangsa dan negara Indonesia
 - d. mengembangkan kemampuan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia



5. Salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menumbuhkan
 - a. motivasi dan dedikasi kepada warga negara agar mempunyai rasa turut memiliki, rasa ikut bertanggung jawab, serta turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional
 - b. keterampilan dan keahliannya dalam usaha mengembangkan kepribadiannya menuju manusia Indonesia mandiri dan bertanggung jawab
 - c. membina dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka menyongsong era globalisasi kemajuan teknologi
 - d. mengembangkan sikap dan kepribadian warga negara Indonesia yang memiliki rasa cinta, bangga, dan bertanggung jawab dalam mempertahankan negara
6. Pendidikan pendahuluan bela negara bertujuan seperti berikut, *kecuali*
 - a. menumbuhkan kecintaan kepada tanah air
 - b. menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia
 - c. menumbuhkan keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa
 - d. menumbuhkan sikap mengembangkan kepribadian bangsa
7. Pola operasi pertahanan bertujuan
 - a. untuk menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional Indonesia serta kewibawaan pemerintah
 - b. untuk mencegah dan menghancurkan serangan terbuka terhadap kedaulatan nasional NKRI
 - c. mencegah dan menghancurkan serangan terbuka terhadap kedaulatan nasional negara RI
 - d. ikut dalam pemeliharaan kemampuan hankam di Asia Tenggara oleh negara-negara Asia Tenggara
8. Menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional Indonesia serta kewibawaan pemerintah baik pusat maupun daerah, yang terutama dilakukan dengan meniadakan atau menghancurkan usaha spionase, subversi, sabotase, dan pemberontakan merupakan tujuan dari



- a. pola operasi keamanan dalam negeri
 - b. pola operasi pertahanan
 - c. pola intelejen strategis
 - d. pola kerja sama pertahanan
9. Kewarganegaraan merupakan suatu pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang bertolak dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkualitas seperti amanat Pancasila dan UUD 1945, hal ini merupakan
- a. fungsi kewarganegaraan
 - b. hakikat kewarganegaraan
 - c. tujuan kewarganegaraan
 - d. makna kewarganegaraan
10. Sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkualitas yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, hal ini merupakan
- a. hakikat kewarganegaraan
 - b. fungsi kewarganegaraan
 - c. tujuan kewarganegaraan
 - d. makna kewarganegaraan
11. Perhatikan pernyataan berikut!
- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
 - 2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk dan berdasarkan pada kualitas-kualitas masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain.
 - 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa dan dalam perca-turan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



- 5) Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkualitas yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.
- 6) Pembentukan diri yang bertolak dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkualitas yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dari pernyataan di atas yang merupakan tujuan pelajaran kewarganegaraan adalah

- a. 1, 2, 3, dan 4
 - b. 2, 3, 4, dan 5
 - c. 3, 4, 5, dan 6
 - d. 4, 5, 6, dan 1
12. Peran serta pelajar dalam pembelaan negara dapat dilakukan dengan jalan
 - a. ikut latihan militer
 - b. mendaftarkan menjadi tentara
 - c. belajar dengan rajin
 - d. mengikuti kegiatan OSIS
 13. Tugas pokok TNI antara lain
 - a. menjaga rakyat dari bahaya yang mengancam keselamatannya
 - b. melatih bertempur rakyat agar terhindar dari bahaya ancaman
 - c. meletakkan dasar-dasar dalam membentuk kepribadian keprajuritan
 - d. membentuk barisan dalam membela negara agar terlepas dari pengaruh asing
 14. Pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku disebut
 - a. *externe souveriniteif*
 - b. *interne souveriniteif*
 - c. *interne legelitas*
 - d. *externe legalitas*



15. Di bawah ini yang *bukan* tokoh teori kedaulatan Tuhan adalah
- Agustinus
 - Thomas Aquinas
 - Jullius Stahl
 - Nicolo Machiavelli
16. Latar belakang berkembangnya teori kedaulatan raja adalah
- banyak berkembangnya aliran kedaulatan
 - munculnya Revolusi Industri di Eropa
 - munculnya para pemikir-pemikir demokrasi
 - bergesernya kekuasaan gereja ke tangan raja
17. Teori yang berpandangan bahwa negara menciptakan hukum, sehingga negara tidak harus tunduk terhadap hukum adalah
- teori kedaulatan hukum
 - teori kedaulatan negara
 - teori kedaulatan rakyat
 - teori kedaulatan raja
18. Perhatikan pernyataan berikut!
- | | |
|---------------|------------|
| 1) Liberte | 4)Property |
| 2) Egalite | 5)Legality |
| 3) Fraternite | 6)Live |
- Pernyataan di atas yang merupakan semboyan Revolusi Amerika dan Prancis adalah
- 1, 2, 3, 4, dan 5
 - 2, 3, 4, 5, dan 6
 - 3, 4, 5, 6, dan 1
 - 4, 3, 2, 1, dan 6
19. Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, *kecuali*
- ekonomi
 - peradilan
 - kesejahteraan rakyat
 - pendidikan



20. Daerah yang otonom meliputi daerah
- provinsi dan kecamatan
 - provinsi dan desa
 - kabupaten dan kota
 - kabupaten dan kelurahan
21. Maksud dan tujuan demokrasi menurut Paricles adalah
- merupakan relasi kemerdekaan dan persamaan martabat dari warga negara
 - kebebasan yang mendasar bagi warga negara dalam mengembangkan aspirasinya
 - martabat dan fungsi warga negara dihargai sesuai dengan kecakapannya dalam memerintah
 - setiap warga negara diberi kekuasaan untuk menjalankan semua kemauannya sendiri
22. Berdasarkan prinsip demokrasi dalam kekuasaan negara dibentuk
- melalui pemilihan umum yang demokratis
 - dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
 - melalui keputusan politik suatu negara yang berdaulat
 - melalui dewan perwakilan rakyat melalui pemilu
23. Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi
- Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR
 - Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya republik
 - Presiden adalah orang Indonesia asli yang dipilih melalui pemilihan umum
 - Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik
24. Sila ke-4 Pancasila memberikan gambaran kepada bangsa Indonesia bahwa kedaulatan di Indonesia didasarkan pada
- pengambilan keputusan dengan suara terbanyak
 - sistem parlementer secara murni
 - musyawarah untuk mufakat
 - kepribadian bangsa Indonesia



25. Salah satu peran aktif rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah
- memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat
 - memilih presiden dan wakil presiden dengan mempertimbangkan tingkat ketenarannya
 - membangun lembaga hukum yang demokratis demi kepentingan rakyat
 - membuat rancangan undang-undang sebagai pedoman kehidupan bernegara
26. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota meliputi hal-hal berikut, *kecuali*
- ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
 - perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - pengendalian lingkungan hidup
 - penanganan bidang kesehatan
27. Perhatikan pernyataan berikut!
- Bagian dari sistem sosial secara keseluruhan yang ada dalam masyarakat.
 - Sistem politik memerlukan energi atau tenaga untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas politiknya.
 - Komponen-komponen yang berwujud struktur-struktur dalam sistem politik harus ada pembagian kerja.
 - Kemampuan sistem politik dapat dijadikan tolok ukur atau barometer berhasil atau tidaknya suatu sistem politik.
 - Kemampuan ekstratif menunjukkan kinerja suatu sistem politik dalam mengelola sumber daya alam dan manusia.
 - Kemampuan regulatif merupakan kemampuan sistem politik dalam mengontrol perilaku individu.
- Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri suatu sistem politik dapat dilihat melalui
- 1, 2, 3, dan 4
 - 2, 3, 4, dan 5
 - 3, 4, 5, dan 6
 - 4, 5, 6, dan 1



28. Sebagai lembaga, DPRD kabupaten mempunyai hak-hak seperti yang tercantum dalam UU No. 32/2004 yaitu
- membentuk Perda bersama bupati
 - interpelasi dan angket
 - membahas APBD
 - membentuk tim ekonomi daerah
29. Di bawah ini yang *bukan* hak anggota DPRD kota, *kecuali*
- menyampaikan usul dan pendapat
 - mengajukan rancangan Perda
 - membentuk panitia pemilihan daerah
 - mengajukan pertanyaan
30. Tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota diatur dalam UU No. 32/ 2004 tentang
- keanggotaan DPRD kabupaten/kota
 - susunan dan kedudukan DPRD
 - otonomi daerah
 - pemerintah daerah
31. Perhatikan pernyataan berikut!
- Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 serta peraturan perundangan lainnya.
 - Mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum.
 - Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.
 - Menjunjung supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
 - Ikut dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Mengajukan calon untuk mengisi anggota dalam dewan perwakilan rakyat.
- Pernyataan di atas yang merupakan kewajiban partai politik adalah
- 1, 2, 3, dan 4
 - 2, 3, 4, dan 5
 - 3, 4, 5, dan 6
 - 4, 5, 6, dan 1



32. Partai di Indonesia dilarang melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut, *kecuali*
- melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara RI
 - menerima sumbangan berupa apapun dari pihak asing
 - menyebarkan ajaran komunisme/marxisme
 - menerima semua hasil pemilihan umum
33. Salah satu contoh kebijakan publik yang dianggap oleh publik memberatkan adalah
- kebijakan kenaikan bahan bakar minyak
 - kebijakan peningkatan posyandu
 - kebijakan pemerintah sekolah gratis
 - kebijakan peningkatan kesejahteraan
34. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Pembukaan UUD 45 alinea III.
 - Pembukaan UUD 45 alinea IV.
 - UUD 45 Pasal 1 Ayat 1.
 - UUD 45 Pasal 28.
 - UU No. 9 Tahun 1998.
 - UU No. 39 Tahun 1999.
- Pernyataan di atas yang merupakan landasan hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah
- 1, 2, 3, dan 4
 - 2, 3, 4, dan 5
 - 3, 4, 5, dan 6
 - 4, 5, 6, dan 1
35. Generasi muda yang merupakan calon pemimpin masa depan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, *kecuali*
- kemurnian idealismenya
 - inovasi dan kreativitasnya
 - semangat pengabdian
 - membangun diri pribadi
36. Tanpa mengharapkan pujian dan imbalan merupakan ciri dari



- a. keikhlasan dan kejujuran
 - b. pemimpin yang demokratis
 - c. pemimpin yang ideal
 - d. pemimpin masa kini
37. Timbulnya situasi krisis yang belum berakhir ini akibat dari tindakan pemimpin yang
- a. penuh tanggung jawab
 - b. sarat KKN
 - c. mengutamakan rakyat
 - d. kritis terhadap keadaan
38. Budaya kolusi sudah merebak di semua kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan oleh
- a. kurang tanggung jawab dan kejujuran
 - b. keinginan membangun bangsa yang tinggi
 - c. kemajuan zaman yang semakin mengglobal
 - d. kemajuan teknologi komputer
39. Seorang pemimpin harus memiliki keikhlasan diri dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, hal ini apabila sudah melekat pada jiwa seorang pemimpin maka kehidupan rakyat akan
- a. kecukupan kebutuhannya
 - b. kekurangan kebutuhan hidupnya
 - c. merasa aman, damai, dan sejahtera
 - d. ditiru oleh rakyat sikap tersebut
40. Perjanjian rahasia yang diwarnai dengan pemberian sejumlah uang atau fasilitas disebut tindakan
- a. KKN
 - b. korupsi
 - c. nepotisme
 - d. kolusi

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Partai penentang di dewan perwakilan rakyat yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan yang tengah berkuasa disebut
2. Kekuasaan tertinggi negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut



3. Pemerintah daerah bebas mengatur daerahnya sendiri disebut
4. Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung didasarkan pada
5. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, hal ini merupakan bunyi pasal
6. Dalam pemerintahan daerah fungsi utama DPRD adalah
7. Kekuasaan atau wewenang tertinggi yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain disebut
8. Menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi, dan tuntutan rakyat dalam sistem politik merupakan fungsi partai sebagai
9. Zaman Orde Baru Pemilu pertama kali tahun 1971 diikuti oleh
10. Untuk memecahkan permasalahan dalam pembangunan harus diusahakan dengan jalan

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan tiga fungsi negara!
2. Sebutkan asas pemerintahan daerah!
3. Sebutkan kekuatan cadangan nasional!
4. Sebutkan bentuk hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara!
5. Sebutkan tiga fungsi DPRD kabupaten/kota!





Pelatihan Prediksi Ujian Akhir

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Contoh sikap yang didasari ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan keluarga adalah
 - a. beribadah secara teratur untuk anggota keluarga
 - b. menyantuni fakir miskin setiap hari
 - c. tidak mengganggu dan membicarakan orang lain
 - d. saling menghormati pemeluk agama yang berbeda
2. Hubungan sikap takwa dengan ketenangan hidup adalah
 - a. kehidupan seseorang yang bertakwa akan terhindar dari tindakan yang mengganggu ketenangan
 - b. orang yang bertakwa merasa tenteram hidupnya karena selalu dekat kepada yang memiliki hidup ini
 - c. orang yang bertakwa merasa tenteram hidupnya karena selalu berusaha menjalankan semua kewajiban manusia
 - d. orang yang bertakwa merasa tenteram karena hidupnya selalu berdoa kepada Tuhan dan pasti terpenuhi keinginannya
3. Politik menutup pintu, menyaring secara ketat terhadap pengaruh globalisasi tidak dapat dipertahankan, maka yang perlu diusahakan adalah
 - a. pembinaan dan pemantapan nilai-nilai yang dianggap perlu
 - b. penertiban kebudayaan yang masuk dari luar negeri
 - c. membuat peraturan perundang-undangan agar tidak masuk
 - d. mengadakan pelatihan kader penangkal pengaruh asing
4. Kreteria pemimpin yang baik adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - a. beriman, bermoral, dan demokratis
 - b. terampil, beriman, dan berilmu



- c. demokratis, ateis, dan berilmu
 - d. demokratis, terampil, dan berilmu
5. Perhatikan pernyataan berikut!
- 1) Bendera atau lambang negara RI.
 - 2) Lambang negara atau lambang pemerintah.
 - 3) Nama dan gambar seseorang.
 - 4) Mempunyai persamaan dengan gambar partai lain.
 - 5) Menyerupai gambar binatang.
 - 6) Mempunyai kesamaan dengan gambar negara.
- Pernyataan di atas yang tidak boleh digunakan oleh partai politik adalah
- a. 1, 2, 3, dan 4
 - b. 2, 3, 4, dan 5
 - c. 3, 4, 5, dan 6
 - d. 4, 5, 6, dan 1
6. Partai politik tidak diperbolehkan melakukan kegiatan seperti di bawah ini, *kecuali*
- a. bertentangan dengan UUD 1945 atau peraturan yang lain
 - b. membahayakan keutuhan NKRI
 - c. bertentangan dengan kebijakan negara
 - d. tidak mengembangkan paham komunisme/marxisme
7. Salah satu sikap warga negara yang bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia adalah
- a. belajar dengan tekun agar dapat mencapai cita-cita
 - b. menguasai bahasa Indonesia
 - c. menghadapi musuh yang datang bila seluruh teman juga melakukannya
 - d. mewakili bangsa sebagai atlet tingkat internasional
8. Wujud bela negara yang dapat dilakukan seorang pelajar di sekolah adalah
- a. mengerjakan tugas piket kebersihan kelas
 - b. mengerjakan setiap pekerjaan rumah
 - c. membuang sampah pada tempatnya
 - d. mengikuti pelajaran yang menyenangkan



9. Dalam Wawasan Nusantara ditegaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan bidang pertahanan keamanan. Hal ini mengandung arti bahwa ancaman terhadap
- suatu wilayah negara merupakan ancaman terhadap seluruh tanah air
 - sebagian wilayah Nusantara merupakan ancaman daerah tersebut
 - suatu wilayah negara harus dapat diatasi oleh aparat wilayah tersebut
 - sebagian wilayah negara harus dapat diatasi secepatnya oleh TNI
10. Contoh sikap bekerja keras bagi pelajar adalah
- tekun belajar serta mematuhi peraturan yang berlaku
 - pandai mengisi waktu luang secara berkelompok
 - selalu mengikuti berbagai kegiatan teman di sekolah
 - selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
11. Di bawah ini bukan prasyarat sistem dwipartai yang dikemukakan oleh Pulzer adalah
- komposisi masyarakatnya adalah homogen
 - konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat
 - adanya kontinuitas sejarah
 - adanya persamaan tujuan dalam kontrak sosial dalam masyarakat yang homogen
12. Dalam Pemilu 2004 partai politik pemenang adalah
- | | |
|-----------|--------|
| a. PDIP | c. PPP |
| b. Golkar | d. PKB |
13. Dalam Era Reformasi telah dilaksanakan Pemilu sebanyak
- | | |
|--------------|---------------|
| a. dua kali | c. empat kali |
| b. tiga kali | d. lima kali |
14. Salah satu penyebab terjadinya KKN dalam kehidupan berbangsa dan negara yang melibatkan seorang pemimpin adalah



- a. mekanisme rekrutmen yang demokratis
 - b. mekanisme rekrutmen yang jujur
 - c. proses rekrutmen yang transparan
 - d. proses rekrutmen mengutamakan sanak saudara
15. Di bawah ini macam-macam budaya politik, *kecuali*
- a. budaya politik parokial
 - b. budaya politik kaula
 - c. budaya politik simpatisan
 - d. budaya politik partisipan
16. Hal yang menunjukkan bahwa budaya demokrasi di Indonesia berakar dari budaya sosial masyarakat adalah
- a. seluruh anggota masyarakat ikut serta saat pemilihan presiden secara langsung
 - b. anggota masyarakat ikut serta dalam menanggulangi semua bencana alam yang menimpa bangsa
 - c. beberapa tokoh masyarakat selalu mencalonkan dirinya sebagai kepala desanya
 - d. anggota masyarakat bermusyawarah setiap memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama
17. Praktek budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut, *kecuali*
- a. menjamin tegaknya keadilan dan supremasi hukum
 - b. berusaha agar dapat menjadi seorang pemimpin dengan jalan apapun
 - c. menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga bukan kekerasan
 - d. mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat dan kepentingan
18. Salah satu contoh sikap hidup sederhana di sekolah adalah
- a. membatasi pergaulan dengan orang-orang tertentu
 - b. memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin
 - c. menyisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung
 - d. menyukai kesendirian daripada mengobrol
19. Perwujudan tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat misalnya



- a. memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadat
 - b. membantu menyelenggarakan perayaan hari besar agama tertentu
 - c. memberi dan menerima bantuan dalam penyebaran agama masing-masing
 - d. menjelaskan kelebihan agama yang kita yakini kepada orang lain
20. Contoh gotong royong yang dilaksanakan di sekolah adalah
- a. memberi kado teman yang ulang tahun
 - b. spontanitas mengejakan tugas kliping
 - c. mengerjakan ulangan umum bersama-sama
 - d. membersihkan kelas sesuai jadwal tugasnya
21. Perhatikan pernyataan berikut!
- 1) Beban berat menjadi ringan.
 - 2) Meningkatkan rasa percaya diri.
 - 3) Membina rasa kebersamaan.
 - 4) Pekerjaan selesai tepat waktu.
 - 5) Hasil pekerjaan sangat memuaskan.
 - 6) Mempererat rasa kekeluargaan.
- Dari pernyataan di atas, yang merupakan makna kegiatan gotong royong dalam kehidupan adalah
- a. 1, 3, 5, dan 6
 - b. 1, 2, 4, dan 5
 - c. 2, 3, 5, dan 6
 - d. 2, 3, 4, dan 6
22. Akibat krisis ekomoni yang berkepanjangan pabrik sepatu terpaksa mengurangi sebagian tenaga kerjanya dengan tujuan
- a. memenuhi hak-hak tenaga kerjanya yang rajin
 - b. dapat memenuhi hak-hak tenaga kerja dengam baik
 - c. meringankan pemerintah mengatasi tenag kerja
 - d. memupuk kelangsungan hidup pabrik tersebut
23. Salah satu alasan menghormati dan menghargai orang lain adalah
- a. kita mendapat bantuan bila memerlukan
 - b. sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa



- c. mempunyai hak dan kewajiban yang sama
 - d. saling ketergantungan dan membutuhkan
24. Pancasila mengajarkan kepada semua warga negara kita untuk saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, maka sikap yang harus kita lakukan adalah
- a. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan persatuan antarbangsa
 - b. mengembangkan rasa persahabatan dan perdamaian antarbangsa
 - c. mengembangkan organisasi di Kawasan Asia Tenggara
 - d. bekerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya
25. Apabila persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kukuh maka
- a. kesejahteraan seluruh rakyat akan meningkat
 - b. pertahanan keamanan nasional semakin mantap
 - c. stabilitas nasional semakin mantap dan dinamis
 - d. menyelesaikan setiap permasalahan dengan cepat
26. Pengaruh kemajemukan bangsa Indonesia bagi persatuan dan kesatuan adalah
- a. mudah tercerai berai dan dikuasai bangsa lain
 - b. mendorong timbulnya pemikiran disintegrasi
 - c. memperlancar pelaksanaan otonomi daerah
 - d. memperkaya adat istiadat dan budaya bangsa
27. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Memberi bantuan tanpa pamphrih.
 - 2) Memberi sumbangan sesuai dengan permintaan.
 - 3) Membantu sesuai dengan kemampuan.
 - 4) Membantu untuk mempertimbangkan masa depan.
 - 5) Membantu tanpa membedakan suku.
 - 6) Memberi bantuan agar mendapat perhatian.
- Dari pernyataan di atas, contoh sikap dan perilaku rela berkorban adalah
- a. 1, 3, dan 6
 - b. 2, 4, dan 6
 - c. 1, 3, dan 5
 - d. 3, 4, dan 5



28. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 memberi jaminan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah, karena
- manusia sebagai makhluk yang sempurna
 - manusia mempunyai cipta, rasa, dan karsa
 - memeluk agama merupakan hak asasi yang hakiki
 - memeluk agama merupakan kewajiban manusia
29. Perhatikan pernyataan berikut!
- Menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung.
 - Mengurangi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Dapat memanfaatkan sesuatu yang dimiliki.
 - Tidak bergaya hidup mewah dalam masyarakat.
 - Membudayakan gaya hidup yang bersifat konsumtif.
 - Membiasakan hidup wajar sesuai dengan kemampuan.
- Dari pernyataan di atas sikap yang sesuai dengan pola hidup sederhana adalah
- 1, 2, 3, dan 4
 - 1, 4, 5, dan 6
 - 2, 3, 4, dan 6
 - 1, 3, 4, dan 6
30. Perlunya kerja sama dengan negara tetangga bila ditinjau dari kepentingan nasional agar
- tidak merugikan pelestarian kebudayaan nasional
 - tercapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa
 - dapat memajukan bidang ekonomi dan sosial
 - tidak membawa dampak yang berarti pada ke-hidupan
31. Jika tidak ada sikap kerja sama antarsiswa dengan guru di lingkungan sekolah dapat berakibat
- kurang harmonis dalam pergaulan
 - proses belajar mengajar terganggu
 - suasana sekolah tidak aman
 - prestasi sekolah tidak seimbang
32. Kerukunan dan kerja sama antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari dapat mewujudkan terciptanya
- ketenangan hidup dalam suatu keluarga
 - ketenteraman hidup bermasyarakat
 - kebahagiaan hidup sebagai makhluk pribadi
 - kebahagiaan hidup lahir dan batin



33. Salah satu contoh perilaku yang mencerminkan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari adalah
- memelihara kepentingan umum
 - mendukung penutupan pabrik yang berpolusi
 - tidak menyebarkan virus penyakit kepada orang lain
 - tidak menimbulkan pencemaran lingkungan
34. Salah satu cara menjaga harga diri di lingkungan pergaulan dengan
- memelihara kehormatan keluarga
 - mengakui kehormatan keluarga yang dimiliki orang lain
 - memelihara hubungan dengan setiap orang
 - memelihara semua kepentingan pribadi
35. Sikap rela berkorban dalam pelaksanaan pembangunan adalah
- meringankan biaya pembangunan
 - meningkatkan mutu pembangunan
 - mempercepat hasil pembangunan
 - mempermudah pelaksanaan pembangunan
36. Contoh sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga adalah
- mengecilkan bunyi televisi karena ada yang sakit
 - membersihkan pekarangan rumah dengan ikhlas
 - memberi uang jajan kepada anak dengan ikhlas
 - memberikan sebagian uang jajan kepada pengemis
37. Kemerdekaan suatu bangsa erat hubungannya dengan sikap rela berkorban warga negara, salah satu buktinya ialah banyaknya
- orang yang memberikan harta dan nyawa sesuai imbalan
 - orang yang mengorbankan nyawa agar menjadi pahlawan
 - anggota cacat veteran akibat perang kemerdekaan
 - anggota keluarga yang terpisah dari saudaranya



38. Yang termasuk manfaat disiplin waktu adalah
- menemukan buku-buku yang kita perlukan setiap saat
 - melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan orang lain
 - mengikuti pelajaran dengan baik dan penuh perhatian
 - terbina dan terbentuknya pola hidup yang teratur
39. Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBD ditetapkan sesuai dengan
- PP
 - Tap. MPR
 - UUD 1945
 - peraturan perundang-undangan
40. Anggota keluarga yang memiliki sikap disiplin tampak dari perilakunya yang selalu
- meminta izin jika pergi ke sekolah
 - mengumpulkan piring kotor sesudah makan
 - mematikan keran air sebelum bak penuh
 - menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal
41. Alasan pentingnya pengendalian diri dalam kehidupan bermasyarakat adalah
- dapat menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak sehat
 - dapat menjauhkan diri dari perbuatan melanggar hukum
 - agar orang mau menghormati sesama sebagaimana mestinya
 - agar orang mau bergaul dengan baik dan sopan santun
42. Penerapan pengendalian diri dalam kehidupan bersama bermanfaat untuk
- mewujudkan kepercayaan masyarakat yang sudah luntur
 - meniadakan hal-hal yang menghambat perkembangan masyarakat
 - mencegah terjadinya pelanggaran peraturan yang berlaku
 - menghindari terwujudnya cita-cita hukum positif di masyarakat



43. Contoh sikap pengendalian diri dalam bertutur kata adalah
- a. guru menghindari kata-kata yang menyinggung siswa
 - b. jaksa menuntut terdakwa agar diberi hukuman mati
 - c. orang tua menasihati anak-anaknya bila diperlukan
 - d. atasan menghindari permasalahan dengan bawahannya
44. Tugas pokok kejaksaan sebagai penegak hukum adalah
- a. mengadakan penyidikan perkara kejahatan
 - b. memutus perkara sesuai dengan peraturan
 - c. membuat tuntutan untuk diajukan dalam persidangan
 - d. mewakili tergugat dalam membela persidangan
45. Tujuan diberlakukannya peraturan hukum adalah
- a. mewujudkan rasa keadilan tiap-tiap orang
 - b. memberantas kejahatan dan pelanggaran
 - c. menciptakan ketertiban dan keteraturan
 - d. mengatur tata kehidupan masyarakat
46. Makna keadilan sosial adalah keadilan yang
- a. menaati peraturan perundangan yang berlaku
 - b. memperhatikan kesadaran hukum orang lain
 - c. berlaku di segala bidang kehidupan
 - d. memenuhi tuntutan hukum yang berlaku
47. Contoh kerukunan hidup antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah
- a. mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan
 - b. menyelesaikan pembangunan tempat ibadah
 - c. mengikuti pemakaman jenazah tetangga
 - d. kerja bakti memperbaiki jalan kampung
48. Akibat yang timbul jika kerukunan hidup antarumat beragama tidak terwujud adalah
- a. menurunkan moral dan akhlak bangsa Indonesia
 - b. kepercayaan masyarakat terhadap pemuka agama berkurang



- c. stabilitas nasional terganggu sehingga terjadi perpecahan bangsa
 - d. berkembangnya konflik sosial dalam wilayah negara Indonesia
49. Yang dimaksud kedaulatan keluar yang dianut oleh pemerintah Indonesia adalah
- a. kekuasaan yang diperoleh dari rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
 - b. pemerintahan yang ditata oleh rakyat dengan menjalankan sistem demokrasi
 - c. mampu mempertahankan kemerdekaan terhadap gangguan keamanan dari luar
 - d. melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kadilan sosial dan perdamaian
50. Teori kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia adalah teori
- a. kedaulatan negara dan hukum
 - b. kedaulatan rakyat dan hukum
 - c. kedaulatan rakyat dan negara
 - d. kedaulatan negara dan raja
51. Salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia yang ditegaskan dalam UUD 45 adalah
- a. negara Indonesia berdasarkan sistem kekeluargaan
 - b. Indonesia negara yang berdasarkan atas moral
 - c. kekuasaan negara tertinggi di tangan presiden
 - d. kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
52. Wadah penyalur segala kritik, saran, dan ide-ide para siswa yang bersifat konstruktif demi kemajuan sekolah lewat
- a. wali kelas
 - b. Osis
 - c. kepala sekolah
 - d. pramuka
53. Cara menyampaikan pendapat warga negara yang baik dan benar adalah lewat
- a. mengadakan kritikan di media massa
 - b. mengadakan surat menyurat dengan pemerintah



- c. tulisan yang dikirim kepada presiden
d. lembaga perwakilan rakyat yang ada
54. Di bawah ini *bukan* pembagian kekuasaan menurut teori Trias Politica yaitu kekuasaan
- legislatif
 - eksekutif
 - yudikatif
 - federatif
55. Tokoh yang berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan ke dalam kekuasaan pelaksana undang-undang, pembuat undang-undang, dan peradilan adalah
- John Locke
 - J.J.Rousseau
 - Montesquieu
 - Abraham Lincoln
56. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh masyarakat internasional ditunjukkan dengan Indonesia
- memnolak agresi militer AS ke Irak
 - bergabung negara penghasil minyak
 - menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa
 - menolak segala bentuk tindak terorisme
57. Pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa campur tangan dari negara lain. Hal ini merupakan perwujudan dari kedaulatan
- rakyat
 - hukum
 - ke luar
 - ke dalam
58. Ajaran kedaulatan rakyat sebenarnya bersumber pada ajaran
- hukum
 - monarki
 - demokrasi
 - kontrak sosial
59. Perhatikan pernyataan berikut!
- Masa jabatan anggota majelis atau dewan perwakilan rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
 - Menetapkan anggota DPR /MPR melalui pemilihan umum.
 - Adanya kontrol yang dilakukan oleh DPR terhadap jalanya pemerintahan.



- 4) Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD.
 5) Memiliki lembaga perwakilan rakyat.
 6) Ada kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri negara yang menganut asas kedaulatan rakyat adalah
- a. 1, 2, 3, dan 4 c. 3, 4, 5, dan 6
 b. 2, 3, 4, dan 5 d. 4, 5, 6, dan 1
60. Sifat-sifat dasar kedaulatan rakyat adalah sebagai berikut, *kecuali*
- a. asli c. permanen
 b. bulat d. tinggi
61. Kekuasaan lembaga dalam membuat dan menetapkan undang-undang di Indonesia adalah
- a. DPR dan MPR c. DPR dan Presiden
 b. DPR dan DPD d. DPR dan MK
62. Kebersihan bagi diri sendiri mengandung makna
- a. dapat terhindar dari berbagai kesulitan
 b. menciptakan aparatur negara yang bersih
 c. dapat terhindar dari berbagai penyakit
 d. memperpanjang usia seseorang
63. Tugas pokok DPR adalah
- a. mengadakan perubahan terhadap usul RUU dari pemerintah
 b. mengesahkan rencana pendapatan dan belanja negara
 c. memegang kekuasaan legislatif dan mengawasi jalannya pemerintahan
 d. mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden
64. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang disebut hak
- a. angket c. petisi
 b. bertanya d. interpelasi



65. Pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya merupakan pengertian dari
- tujuan pembangunan nasional
 - cita-cita nasional Indonesia
 - hakikat pembangunan nasional
 - makna pembangunan nasional
66. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
- 1) Warga negara Republik Indonesia.
 - 2) Berumur 17 tahun atau sudah kawin.
 - 3) Memiliki tempat tinggal.
 - 4) Diajukan oleh parpol peserta pemilu.
 - 5) Sudah terdaftar dalam daftar pemilih.
- Yang merupakan persyaratan untuk memilih dalam pemilu adalah
- 1, 2, dan 3
 - 1, 2, dan 5
 - 2, 3, dan 4
 - 2, 4, dan 5
67. Salah satu contoh perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah
- penetapan pajak bumi dan bangunan
 - pemilihan pengurus rukun tetangga
 - menunjuk petugas pelayanan kamling
 - memberi santunan bagi orang miskin
68. Contoh peran serta warga negara dalam kegiatan pemilihan umum antara lain
- tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak sesuai aspirasi yang berkembang
 - mengusulkan supaya tidak perlu diadakan pemilihan umum karena menghabiskan dana
 - mendukung dan menggunakan hak pilihnya dengan rasa tanggung jawab
 - melibatkan diri agar pemilu dapat dipercepat untuk membentuk pemerintahan
69. Menurut Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa yang disebut warga negara Indonesia adalah



- a. bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia
 - b. bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
 - c. semua orang Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
 - d. semua orang Indonesia dan orang keturunan yang berdomisili di Indonesia
70. Hal-hal yang harus dihindari dalam mengembangkan demokrasi ekonomi Indonesia adalah
- a. monopoli dalam perusahaan
 - b. sistem perdagangan yang sehat
 - c. sistem bagi hasil dalam perdagangan
 - d. sistem perkoperasian dan perkreditan
71. Indonesia adalah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain secara bebas sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki
- a. kedaulatan rakyat
 - b. kedaulatan hukum
 - c. kedaulatan ke dalam
 - d. kedaulatan ke luar
72. Kekuasaan tertinggi tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi merupakan pengertian sifat kedaulatan
- a. permanen
 - b. bulat
 - c. asli
 - d. utuh
73. Memperhatikan aspirasi serta kehendak seluruh rakyat dan menampungnya disebut dengan asas
- a. demokrasi
 - b. musyawarah mufakat
 - c. kerakyatan
 - d. permusyawaratan
74. Kedaulatan berada di tangan rakyat berarti
- a. kekuasaan rakyat dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat



- b. rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
 - c. kekuasaan rakyat dilaksanakan oleh undang-undang dasar
 - d. kekuasaan rakyat dilaksanakan dengan mengadakan pemilihan umum
75. Di bawah ini yang *bukan* merupakan tokoh teori kedaulatan rakyat adalah
- a. John Locke
 - b. Montesquieu
 - c. J.J.Rousseau
 - d. Hugo Krabe
76. Negara sebagai organisasi yang dibentuk rakyat berke-wajiban mewujudkan tujuan dan cita-cita rakyat. Tujuan dan cita-cita tersebut dimuat dalam
- a. UUD negara
 - b. haluan negara
 - c. hukum negara
 - d. program pembangunan
77. Menurut John Locke negara dibentuk berdasarkan *pactum unionis* artinya
- a. negara terbentuk adanya perjanjian antara rakyat dan penguasa
 - b. negara terbentuk adanya perjanjian antarindividu
 - c. negara terbentuk dengan adanya perjanjian dengan masyarakat
 - d. negara terbentuk adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan
78. Menurut Rousseau bahwa negara terbentuk atas
- a. kemauan para tokoh politik
 - b. kemauan Tuhan melalui kekuasaan raja
 - c. kemauan rakyat melalui kontrak sosial
 - d. kemauan raja melalui kontrak sosial
79. Prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat ditandai dengan adanya
- a. partisipasi masyarakat dalam perumusan berbagai kebijakan publik
 - b. pemilihan presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat



- c. pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat secara proporsional
- d. daerah terwakili dalam lembaga perwakilan daerah yang langsung dipilih rakyat
80. Sistem politik adalah sebagai sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka hal ini dikemukakan oleh
- | | |
|------------------|----------------------------|
| a. David Easton | c. Gabriel A.Almond |
| b. Robert A.Dahl | d. Modern Polical Analysis |
81. Dalam Pemilu yang berhak ikut serta menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia yang telah berumur
- | | |
|-------------|-------------|
| a. 15 tahun | c. 19 tahun |
| b. 17 tahun | d. 21 tahun |
82. Di bawah ini yang *bukan* termasuk lembaga negara menurut UUD 45 adalah
- | | |
|--------|--------|
| a. DPR | c. KPU |
| b. DPD | d. DPA |
83. Perhatikan pernyataan berikut!
- 1) Perencanaan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu.
 - 2) Menetapkan cara pelaksanaan kampanye dalam pemilu.
 - 3) Menetapkan waktu pelaksanaan pemilu.
 - 4) Seleksi dan menetapkan partai politik yang berhak mengikuti Pemilu.
 - 5) Mengadakan pendaftaran dan peresmian keanggotaan legislatif.
 - 6) Menetapkan hasil pemungutan suara secara nasional.
- Pernyataan di atas yang termasuk tugas KPU adalah
- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. 1, 2, 3, dan 4 | c. 3, 4, 5, dan 6 |
| b. 2, 3, 4, dan 5 | d. 4, 5, 6, dan 1 |
84. Salah satu peran aktif rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah
- a. dengan bebas memimpin partai politik dan pejabat negara



- b. bebas mengadakan kritik kepada siapa saja termasuk pemerintah
 - c. memilih wakil-wakil dalam lembaga perwakilan rakyat
 - d. bebas mencalonkan diri sebagai pejabat politik negara
85. Sistem politik sebenarnya adalah bagian dari sistem sosial secara keseluruhan yang ada dalam masyarakat, hal ini merupakan ciri sistem politik
- a. identifikasi
 - b. input dan output
 - c. integrasi suatu sistem
 - d. ekstratif
86. Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum merupakan pengertian dari partai politik menurut
- a. UU No. 09/1999
 - b. UU No. 12/2003
 - c. UU No. 23/2003
 - d. UU No. 31/2003
87. Asas partai politik yang dibentuk tidak boleh
- a. bertentangan dengan hak-hak asasi manusia
 - b. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
 - c. tujuan dan cita-cita proklamasi Indonesia
 - d. tujuan partai politik yang dibentuk
88. Perhatikan pernyataan berikut!
- 1) Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya.
 - 2) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat.
 - 3) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
 - 4) Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
 - 5) Mengusulkan pergantian antarwaktu anggota di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangan.
 - 6) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.



Pernyataan di atas yang merupakan hak partai politik adalah

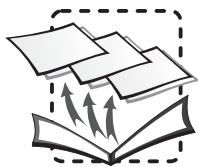
....

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. 1, 2, 3, dan 4 | c. 3, 4, 5, dan 6 |
| b. 2, 3, 4, dan 5 | d. 4, 5, 6, dan 1 |
89. Warga negara RI yang dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur
- | | |
|-------------|-------------|
| a. 15 tahun | c. 19 tahun |
| b. 17 tahun | d. 21 tahun |
90. Yang berhak menggunakan hak pilih pasif adalah warga negara Indonesia yang berumur
- | | |
|-------------|-------------|
| a. 17 tahun | c. 21 tahun |
| b. 19 tahun | d. 25 tahun |

II. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan dua asas negara demokrasi!
2. Sebutkan landasan kedaulatan hukum yang dianut bangsa Indonesia!
3. Sebutkan empat prinsip sistem pemerintahan Indonesia!
4. Sebutkan bunyi Pasal 27 Ayat 1 UUD 45!
5. Sebutkan contoh peran serta siswa dalam pemerintahan!
6. Sebutkan tiga ciri orang yang berprestasi!
7. Sebutkan dua faktor manusia dapat berprestasi!
8. Sebutkan usaha pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia!
9. Sebutkan empat prestasi internasional yang ditunjukkan oleh putra putri bangsa Indonesia!
10. Sebutkan tantangan generasi muda terhadap pengaruh globalisasi!





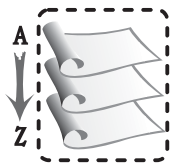
Daftar Pustaka

- Abubakar. 2004. *Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani Kelas 1 SMA*. Jakarta: Yudhistira.
- Budiyono. 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- Computa, M.K. 1999. *Undang Undang Otonomi Daerah*. Bintang Cermelang.
- Gautama, S. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni. 1973.
- Guru, Abdi T. 2006 *Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII- IX*. Jakarta: Erlangga.
- Irmim, S. 2004. *Menyikapi Perubahan dan Memacu Prestasi. Diri*. Seyma Media.
- _____. 2004. *135 Sikap Positif Karyawan Berprestasi*. Seyma Media.
- Kansil, C.S.T. 1983. *Pendidikan Moral Pancasila SMTA Kelas 1*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 1983. *Pendidikan Moral Pancasila SMTA Kelas 2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 1983. *Pendidikan Moral Pancasila SMTA Kelas 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1998*. Solo: Pabelan.
2005. *Kumpulan Perundang-undangan Anti KKN*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Materi Pelatihan Terintegrasi 1-2. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pendidikan Nasional.
- Mertosukumo, S. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ningsih, R. 2006. *PKn Kelas IV - VI*. Jakarta: Yudhistira.
- Ramly, Amir T. 2006. *Pumping Student*. Jakarta: PT Kawan Pustaka.



- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soegito, A.T. 1982. *Pancasila Tinjauan dari Aspek Historis*. Semarang: FKIS- IKIP Semarang.
- Sukadi. 1996. *Penuntun PPKn 3 untuk kelas III*. Bandung: Ganeca.
- Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. Bandung: Alumni.
- Sumantri, B. 1999. *Jalan Menuju Kesuksesan Hidup*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suparyanto, Y. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII*. Jakarta: Cempaka Putih.
- Suprpto, R. 2004. *Pancasila Menjawab Globalisasi Menuju Dunia Damai, Aman, dan Sejahtera*. Jakarta: Taman Pustaka.
- Suteng, B.S. dkk. 2003. *PPKn SMU untuk Kelas 1, 2, 3*. Jakarta.
- Sutrisno, T. 2006. *Reformasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Raya*. Jakarta: Taman Pustaka.
- Suwanto. dkk. 1997. *Sejarah Nasional dan Umum SLTP untuk Kelas III*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Suyitno, Amin. dkk. 1981 *Memahami Pancasila dan P-4*. Semarang: Satya Wacana.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004*. Solo: Kharisma.
2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002*. Bandung: Citra Umbara.
2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang –Undang tentang Referendum dan Organisasi Kemasyarakatan*. Semarang: Media Wiyata.
2000. *UUD 1945 dan Amandemennya*. Solo: Pabelan.
- UUD Republik Indonesia Amandemen I-IV*. Solo: Alfa.
1988. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945- 1975*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP*. Solo: Mayasari.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.





Indeks

Abolisi, hal. 44,
Adminstrasi, hal. 47
Advokat, hal. 51, Amnesti, hal. 44
Ancaman, hal. 17, 20
Angket, hal. 47
Agama, hal. 76, Agresi, hal. 17
Aksi, hal. 19
Aktivitas, hal. 112
Akuntabel, hal. 40
Anarki, hal. 5
APBN, hal. 55, Asas, hal. 37, 56
APBD, hal. 48
Amerika Serikat, hal. 79
Asean, hal. 84
Aspek, hal. 18, 74, 101
Atheisme, hal. 87
Badan, hal. 3
Bangsa Indonesia, hal. 75, 78
Bebas Aktif, hal. 77, 79, 82
Bela negara, hal. 13, 15, 23
Bentuk, hal. 20
Bupati, hal. 56
Camat, hal. 53
Cita-cita, hal. 75, 102
Daerah, hal. 36, 42, 45, 48
Dasa Sila Bandung, hal. 77
Dasar, hal. 16
Demokrasi, hal. 36, 50, 49
Desentralisasi, hal. 37, 40, 41, 44, 45
Diplomasi, hal. 78, Dinas, hal. 52
Disiplin, hal. 110
Diskriminasi, hal. 76
Doktrin, hal. 6, 24
Domestik, hal. 41
DPR, hal. 46



DPRD, hal. 48, 51, 52, 56
Ekonomi, hal. 42
Eksekutif, hal. 4
Eksplorasi, hal. 45
Euforia, hal. 90
Elitisme, hal. 85
Era, hal. 16, 76, 101
Esensial, hal. 4
Etika, hal. 48
Fenomena, hal. 74
Figur, hal. 102
Filosofis, hal. 5
Fungsi, hal. 2 - 5, 7, 11, 16, 22, 43, 46
Fisik, hal. 5
Gangguan, hal. 17, 20
Global, hal. 18, 36, 41
Globalisasi, hal. 74, 75, 76, 77, 85, 87, 88, 101
Grasi, hal. 44
Gubernur, hal. 56
Hak dan kewajiban, hal. 12
Ideologi, hal. 74
Ilmu pengetahuan dan teknologi, hal. 75, 85
Individu, hal. 6, 7
Individualisme, hal. 5, 85
Indonesia, hal. 74
Industri, hal. 76
Instansi vertikal, hal. 49
Internasional, hal. 47, 77, 78, 79, 85
Interpelasi, hal. 47
Investasi, hal. 42
Jasa, hal. 51
KAA, hal. 79, 82, 90
Kabupaten, hal. 53
Karl Marx, hal. 7
Kebijakan, hal. 76
Kebijakan publik, hal. 58, 59
Kemerdekaan, hal. 2, 25
Kepala Daerah, hal. 47, 48, 50, 51, 53
Kesejahteraan rakyat, hal. 50
Ketahanan nasional, hal. 89, Ketertiban, hal. 3, 4



Keunggulan, hal. 101
Kewajiban, hal. 13, 25
Kolektivisme, hal. 6
Kolusi, hal. 51
Kompetensi, hal. 102, Komponen, hal. 17, 18, 22, 23
Kondisi, hal. 25
Kondusif, hal. 43
Konsep, hal. 101
Konservasi, hal. 45
KTT, hal. 83
Kualitas, hal. 102, Kultur, hal. 43
Kurikulum, hal. 15
Korupsi, hal. 51
Legislatif, hal. 4, 48
Lembaga, hal. 48, 52, 53, 59, 76
Luar negeri, hal. 77, 78
Lurah, hal. 53
Masyarakat, hal. 2, 4, 23, 36, 38, 40 - 45, 48, 53, 59
Motivasi, hal. 101, 105, 108
Nasional, hal. 44
Narkoba, hal. 77
Negara, hal. 1 - 6, 8, 9, 11, 12, 18, 37
Negara Indonesia, hal. 8
Nilai, hal. 43, 75, 87, 88
NKRI, hal. 38, 44, 48, 50, 89
Nonblok, hal. 82, 83
Norma, hal. 48
Organisasi, hal. 1, 2, 3, 16, 43, 44, 85
Otonomi, hal. 36, 37, 41 - 44, 45, 48
Pancasila, hal. 24, 48, 75, 87, 88
Paradigma, hal. 16
Partai politik, hal. 48
Pelatihan, hal. 16, 23
Pembantuan, hal. 37
Pembelaan, ha. 1, 3, 11, 20
Pemerintahan, hal. 17, 10, 36, 37, 42, 44, 45, 49, 111
Pemerintah Daerah, hal. 40, 41, 44, 46, 48, 55
Penduduk, hal. 8, 9
Perang dingin, hal. 79
Perangkat Daerah, hal. 52



Perturan Daerah, hal. 48, 56
Perjanjian, hal. 45
Pertahanan keamanan, hal. 3, 11, 12, 27, 22
Perundang-undangan, hal. 2, 3, 38, 45, 48, 50, 51
Politik, hal. 75
Polri, hal. 12, 16, 19, 21
Potensi, hal. 101, 107, 110
Prestasi, hal. 101, 105, 111, 113
Primordialisme, hal. 89
Prinsip, hal. 21, 36, 37, 82, 109
Profesi, hal. 19, 20
Provinsi, hal. 50
Publik, hal. 40, 42, 59
Rakyat, hal. 8, 9, 23
Reformasi, hal. 111
Regional, hal. 84
RI, hal. 17, 20
Sekularisme, hal. 85, Sistem, hal. 36,
Sistem hankamrata, hal. 90
Sistem politik, hal. 89
Sosial budaya, hal. 49
Sosialisme, hal. 6, 7
Status, hal. 9
Strategis, hal. 25
Teknologi, hal. 36, 76, 77, 78
TNI, hal. 16, 17, 18, 19, 20, 23, 90
Teori, hal. 5
UU, hal. 12, 13, 15, 17, 27, 36, 43 - 46, 50, 51
UUD 1945, hal. 8, 11, 12, 13, 36, 48
Usaha, hal. 24
Uni Sovyet, hal. 79
Unsur, hal. 8,
Visi, hal. 43, 101
Warga negara, hal. 3, 9, 12, 13, 19, 25, 26, 44, 78, 101
Watak, hal. 88
Wawasan Nusantara, hal. 77, 89
Wawasan, hal. 20, 78, 88
Wilayah, hal. 9, 10, 17, 18, 25, 51, 90
Yudikatif, hal. 4
Zaman, hal. 74, 75



K Pendidikan **Kewarganegaraan**

UNTUK SMP/MTs KELAS IX

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran

ISBN 978-979-068-153-8 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-068-165-1
Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 11.146,-